



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Daerah Khusus Jakarta

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi kompas strategis bagi arah pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta lima tahun ke depan, sejalan dengan visi pembangunan Jakarta sebagai Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, Menyejahterakan Seluruh Warganya. Posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional menuntut hadirnya kebijakan strategis yang mampu memperkuat daya saing global, tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi identitas dan kebanggaan warga Jakarta.

Implementasi Renstra tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan. Persaingan kawasan global yang semakin ketat, isu keberlanjutan lingkungan, serta inklusivitas sosial budaya, merupakan pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius. Disinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, asosiasi, akademisi, komunitas kreatif, serta masyarakat luas—untuk bersama-sama mewujudkan visi Jakarta yang modern, berdaya saing, sekaligus berakar pada budaya.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam perjalanan transformasi Jakarta menuju kota global yang berbudaya. Semoga setiap strategi dan program yang tertuang dapat dijalankan secara konsisten, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dapat menjadi dokumen strategis yang mendorong terciptanya masa depan parekraf Jakarta yang membanggakan sekaligus memberikan kenyamanan dan kesan baik bagi seluruh masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi DKI Jakarta



Andhika Permata

NIP. 197610141995111001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi strategis sebagai simpul utama perekonomian nasional dan pintu gerbang internasional, didukung oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menunjukkan tren kontribusi positif pasca-pandemi. Pada tahun 2024, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4,85% terhadap PDRB Jakarta, sementara ekonomi kreatif menyumbang 10,63%, menegaskan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru (*new engine of growth*). Sejalan dengan potensi ini, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta 2025–2029 disusun untuk mengarahkan transformasi sektoral guna mewujudkan visi-misi RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 sebagai Kota Global dan Pusat Perekenomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya. Secara khusus, misi ke 2 RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 menargetkan sasaran untuk menjadikan Jakarta sebagai "Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik". Dengan demikian, mandat untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan penjabaran langsung dari arahan strategis tingkat provinsi untuk memperkuat posisi Jakarta di kancang global.

Berdasarkan mandat tersebut, Renstra Disparekraf menetapkan tujuan utamanya untuk "**Mengembangkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkebudayaan yang Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi**". Tujuan ini secara langsung menjawab visi RPJMD dengan memperkuat peran Jakarta sebagai "Pusat Perekenomian" dan meningkatkan "Daya Saing" melalui inovasi di sektor parekraf. Penekanan pada aspek "berkebudayaan" menjadi fondasi untuk membangun identitas kota yang unik, yang merupakan syarat mutlak bagi sebuah "Kota Global". Tujuan ini selanjutnya dioperasionalkan ke dalam sasaran Renstra yang lebih terukur, yaitu "**Meningkatkan Daya Tarik Kota sebagai Destinasi Wisata yang Berlandaskan Kebudayaan**", untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Fokus pembangunan pariwisata bergeser dari sekadar kunjungan destinasi menuju penciptaan pengalaman kota yang bermakna dan tak terlupakan. *Landscape* urban dan keragaman wisata Jakarta—mulai dari pesona sejarah di kawasan *heritage*, denyut MICE di pusat kota, hingga keindahan bahari di Kepulauan Seribu — diorkestrasikan menjadi sebuah panggung urban yang hidup. Mesin penggerak utama di balik transformasi ini adalah ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan berakar pada budaya. Melalui kolaborasi yang terintegrasi, produk dan jasa kreatif akan menjadi jiwa dari setiap atraksi pariwisata. Dengan menyatukan pariwisata dan ekonomi kreatif, Jakarta tidak hanya menawarkan tempat untuk dikunjungi, tetapi sebuah dunia untuk dijelajahi, dirasakan, dan dikenang, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing dan citranya sebagai destinasi urban yang dinamis dan berkelas dunia.

Meskipun memiliki potensi besar, sektor parekraf Jakarta menghadapi tantangan dan isu strategis. Renstra ini mengidentifikasi beberapa permasalahan mendasar, antara lain: kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum memadai, pengembangan destinasi yang belum terintegrasi, kesenjangan transformasi digital, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Isu strategis utama yang dihadapi meliputi: transformasi Status Jakarta, krisis Identitas Perkotaan, persaingan di kawasan global, dan krisis lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Renstra ini mengusung lima strategi utama secara bertahap:

1. Tahap 1 (2026): Penguatan Fondasi. Fokus pada perbaikan infrastruktur, regulasi, pemetaan klaster destinasi, dan pembentukan dana abadi ekonomi kreatif.
2. Tahap 2 (2027): Konsolidasi Ekosistem. Momentum perayaan 500 tahun Jakarta dimanfaatkan untuk menggelar event internasional, membentuk Jakarta *Convention & Exhibition Bureau*, dan meluncurkan sertifikasi kuliner.
3. Tahap 3 (2028): Akselerasi Daya Saing. Percepatan ekspor produk kreatif dan kampanye internasional untuk MICE.

4. Tahap 4 (2029): Integrasi dalam *Global Value Chain*. Penerapan standar pariwisata berkelanjutan global dan operasionalisasi penuh *Creative Economy Hub*.
5. Tahap 5 (2030): Transformasi Ekosistem Global. Digitalisasi penuh layanan parekraf dan menargetkan Jakarta masuk 50 besar Kota Global.

Serta arah kebijakan yang diimplementasikan melalui kebijakan konvergensi dan digitalisasi berbasis identitas kota; peningkatan kapasitas SDM; optimalisasi pembiayaan inovatif; penguatan tata kelola melalui kolaborasi *multi-level*; pariwisata inklusif dan berkelanjutan; serta ekonomi kreatif sebagai pendorong nilai tambah dan inovasi.

Program prioritas yang akan dijalankan mencakup Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Renstra ini diharapkan menjadi acuan komprehensif untuk mewujudkan Jakarta sebagai destinasi global dengan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Melalui implementasi program prioritas yang terukur, arah kebijakan yang bertahap, serta penguatan kolaborasi multipihak, Disparekraf berkomitmen untuk mengatasi tantangan struktural dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya akan diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya dalam membangun identitas kota yang kuat, menciptakan ekosistem yang inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, dokumen ini menjadi landasan strategis untuk memastikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tumbuh secara berkelanjutan, memantapkan posisi Jakarta sebagai destinasi unggul di panggung dunia.

TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029

Pengarah

Andhika Permata

Penanggung Jawab

Helma Dahlia

Editor

Dwi Lestari

Tenaga Ahli

Julyan Ferdiansyah

Zuliansyah Putra Zulkarnain

Debbie Puspasari

Rd Kaleh Putro Setio Kusumo

Fajar Wardani Wijayanti

Kamilia Qurratul Ain

Ersa Ardianti

Kontributor Data

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata

Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Unit Pengelola Kawasan Kota Tua

Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur	9
2.1.2 Sumber Daya	19
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.1.2.2 Aset/Modal	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan	27
2.1.3.1 Destinasi Wisata.....	27
2.1.3.2 Pemasaran Wisata.....	32
2.1.3.3 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	35
2.1.3.4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36
2.1.3.5 Kinerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 terkait Dampak Ekonomi dan Pendapatan Daerah	38
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	43
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	45
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja.....	49
2.1.7 Kerja Sama Daerah.....	52
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61
2.2.1 Identifikasi Permasalahan	61
2.2.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.....	66
2.2.3 Telaahan RTRW dan KLH Provinsi DKI Jakarta	71

2.2.4 Isu Strategis	77
BAB III	90
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	90
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029	90
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029.....	96
3.3 Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	99
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	104
3.5 Pohon Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	112
3.5.1. Pengelolaan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata.....	114
3.5.2. Pemasaran Pariwisata	114
3.5.3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	114
3.5.4. Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	115
3.5.5. Dukungan Manajemen dan Tata Kelola OPD	116
3.5.6 Kesimpulan.....	116
BAB IV	118
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	118
4.1 Uraian Program.....	131
4.2 Uraian Kegiatan	138
4.3 Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	150
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah....	163
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui IKU.....	166
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK	167
BAB V	171
PENUTUP	171
DAFTAR PUSTAKA	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Pelayanan	20
Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Generasi Umur	21
Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 4 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	23
Tabel 5 Rekapitulasi Aset Disparekraf DKI Jakarta Tahun 2020-2024	25
Tabel 6 Capaian Kinerja Sub Urusan Destinasi Wisata	28
Tabel 7 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke-20 Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta Tahun 2020-2024	30
Tabel 8 Capaian Sub Urusan Pemasaran Wisata	32
Tabel 9 Capaian Kinerja Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif	35
Tabel 10 Capaian Kinerja Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	37
Tabel 11 PDRB Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Atas Dasar Harga Berlaku)	38
Tabel 12 PAD dan Retribusi Pariwisata Tahun 2020-2024	39
Tabel 13 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024	42
Tabel 14 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	43
Tabel 15 IKU dan Target Disparekraf DKI Jakarta (Sektor Pariwisata) Berdasarkan Turunan RPJMN Tahun 2025-2029	68
Tabel 16 IKU dan Target Disparekraf DKI Jakarta (Sektor Ekonomi Kreatif) Berdasarkan Turunan RPJMN Tahun 2025-2029	70
Tabel 17 Arahan Lokasi Kawasan Wisata Berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044	72
Tabel 18 Pemetaan Penyelarasan Misi Kepala Daerah RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045	92
Tabel 19 Tujuan dan Sasaran Renstra Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	98
Tabel 20 Arah Kebijakan Renstra Disparekraf	111

Tabel 21 Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	119
Tabel 22 Program dan Target Kinerja	134
Tabel 23 Kegiatan dan Target Kinerja	143
Tabel 24 Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	150
Tabel 25 Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	163
Tabel 26 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui IKU	166
Tabel 27 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui IKK	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	11
Gambar 2 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2024	41
Figure 3 Pohon Kinerja Rencana Strategis Disparekraf DKI Jakarta Tahun 2025-2029	113

BAB I



PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta, sebagai simpul utama perekonomian nasional dan pintu gerbang Indonesia ke dunia internasional, memegang peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Seiring perubahan status hukum menjadi Daerah Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2024), Jakarta kini diarahkan untuk membangun identitasnya sebagai kota global yang berdaya saing tinggi dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata berbasis urban dan industri kreatif digital. Reputasi ini tercermin secara eksplisit dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2045, yakni: "Jakarta Kota Global yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan."

Kota global tidak lagi diukur semata dari skala fisik, jumlah penduduk, atau besarnya produk domestik regional bruto. Kota global adalah kota yang memiliki kapasitas untuk menghubungkan lokalitas dengan jejaring ekonomi, pengetahuan, dan budaya global, serta mampu memproduksi simbol, nilai, dan kreativitas yang beresonansi secara luas melampaui batas teritorialnya. Dalam konteks inilah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memainkan peran strategis dan transformatif.

Sektor pariwisata memegang peranan sebagai katalis daya tarik kota sekaligus kontributor ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kunjungan, dan pengembangan destinasi yang memperkuat identitas kota dengan mencerminkan dinamika urban dan keragaman budaya kota. Jakarta dapat memanfaatkan keunggulannya sebagai pusat koneksi dan gaya hidup untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata urban unggulan di Asia Tenggara. Di sisi lain, ekonomi kreatif tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan memainkan peran penting sebagai *new engine of growth* yang mendorong

pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Ekonomi kreatif disebut "*new engine of growth*" karena berbasis ide dan kekayaan intelektual yang menciptakan nilai tambah tinggi serta mendorong produktivitas, dapat diskalakan cepat melalui platform digital lintas negara, sekaligus mendiversifikasi struktur ekonomi dari ketergantungan pada komoditas menuju jasa bernilai tinggi. Produk kreatif—aplikasi, gim, musik, film, desain—mendorong ekspor jasa, menyerap tenaga kerja muda lintas keterampilan, memberi spillover ke sektor lain (UMKM, pariwisata, manufaktur), relatif tangguh terhadap guncangan, memperkuat daya saing dan citra kota melalui kawasan dan festival, serta cenderung lebih hemat sumber daya per unit nilai tambah. Tren konsumsi global yang mengutamakan pengalaman, personalisasi, dan *storytelling* semakin menguatkan momentum ini.

Pasca-pandemi COVID-19, kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali menunjukkan tren positif. Secara nasional, sektor pariwisata menyumbang 3,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 4,0% pada tahun 2024. Di sisi lain, ekonomi kreatif mencatat kontribusi sebesar 7,8% terhadap PDB nasional pada 2023 dan naik menjadi 8,0% pada 2024. Di tingkat daerah, kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jakarta mencapai 4,68% pada tahun 2023 dan naik menjadi 4,85% pada tahun 2024. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi yang lebih signifikan, yaitu sebesar 10,51% pada 2023 dan meningkat menjadi 10,63% pada 2024. Angka-angka ini menegaskan pentingnya sektor parekraf sebagai kekuatan ekonomi baru yang tidak hanya menopang pemulihan ekonomi, tetapi juga mendorong daya saing global Jakarta melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi berbasis budaya, serta konektivitas lintas sektor yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

Kajian yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta dan A.T. Kearney dalam Buku 4: Pariwisata & Penjenamaan Kota, memperlihatkan tantangan utama Jakarta mencakup beberapa hal yang mendasar dan krusial. Dari sisi *supply*, konektivitas yang masih perlu ditingkatkan agar akses udara–darat–laut lebih mulus bagi wisatawan dan pelaku MICE, yang berimbas langsung pada kualitas pengalaman berkunjung. Di sisi *demand*,

jumlah wisatawan mancanegara Jakarta masih jauh tertinggal dari kota pesaing dengan masa tinggal yang pendek (rata-rata $\pm 1,7\text{--}2,6$ hari), sehingga belanja dan multiplier ekonomi terbatas. Pada segmen MICE, performa masih lemah—Jakarta hanya menjadi tuan rumah 6 konferensi ICCA pada 2022, jauh di bawah Berlin (113), yang juga didukung kapasitas venue dan ruang pameran yang jauh lebih besar. Pengakuan destinasi juga dinilai masih terbatas, menandakan kebutuhan penguatan klaster atraksi dan penjenamaan yang konsisten. Pada ekonomi kreatif, ekosistem menghadapi celah perlindungan tenaga kerja dan keterampilan, akses pendanaan, serta proses perizinan penyelenggaraan acara yang belum ramping—tiga isu struktural yang perlu dibenahi agar nilai tambah dan monetisasi IP meningkat. Secara lintas sektor, kelemahan Jakarta pada dimensi Sumber Daya Manusia, Pertukaran Informasi, dan Pengalaman Budaya dalam Global Cities Index menambah hambatan daya saing dan visibilitas global sektor pariwisata–ekraf.

Oleh karena itu, untuk mencapai agenda kota global pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Daerah. Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 ini disusun untuk memberikan arah pembangunan sektoral secara terukur, dan adaptif terhadap dinamika global serta kebutuhan lokal. Dokumen ini menjadi landasan kebijakan yang mengintegrasikan visi pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional serta memperhatikan tuntutan perubahan lingkungan dan partisipasi publik dalam pengelolaan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
15. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta.

1.3.2 Tujuan

Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis sektoral di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Menyediakan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan;
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Mengintegrasikan indikator kinerja dengan kerangka pengukuran berbasis hasil (outcome) sesuai prinsip SAKIP dan Reformasi Birokrasi;
5. Memfasilitasi akuntabilitas dan transparansi publik terhadap penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra ini terdiri atas lima bab, yaitu:

- Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen;
- Bab II: Gambaran Pelayanan, serta permasalahan dan isu strategis yang memuat analisis permasalahan utama dan isu strategis sektoral parekraf yang relevan dengan konteks daerah dan nasional;

- Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan, menyajikan perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode Renstra, serta menjabarkan strategi pencapaian tujuan dan arah kebijakan sektoral;
- Bab VI: Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator, estimasi pendanaan, serta target keberhasilan;
- Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dan penegasan komitmen pelaksanaan Renstra.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan perubahan, dan mampu mendorong terwujudnya Jakarta sebagai kota destinasi global dengan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan inovatif.

BAB II



GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, sebagai diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DKI Jakarta.

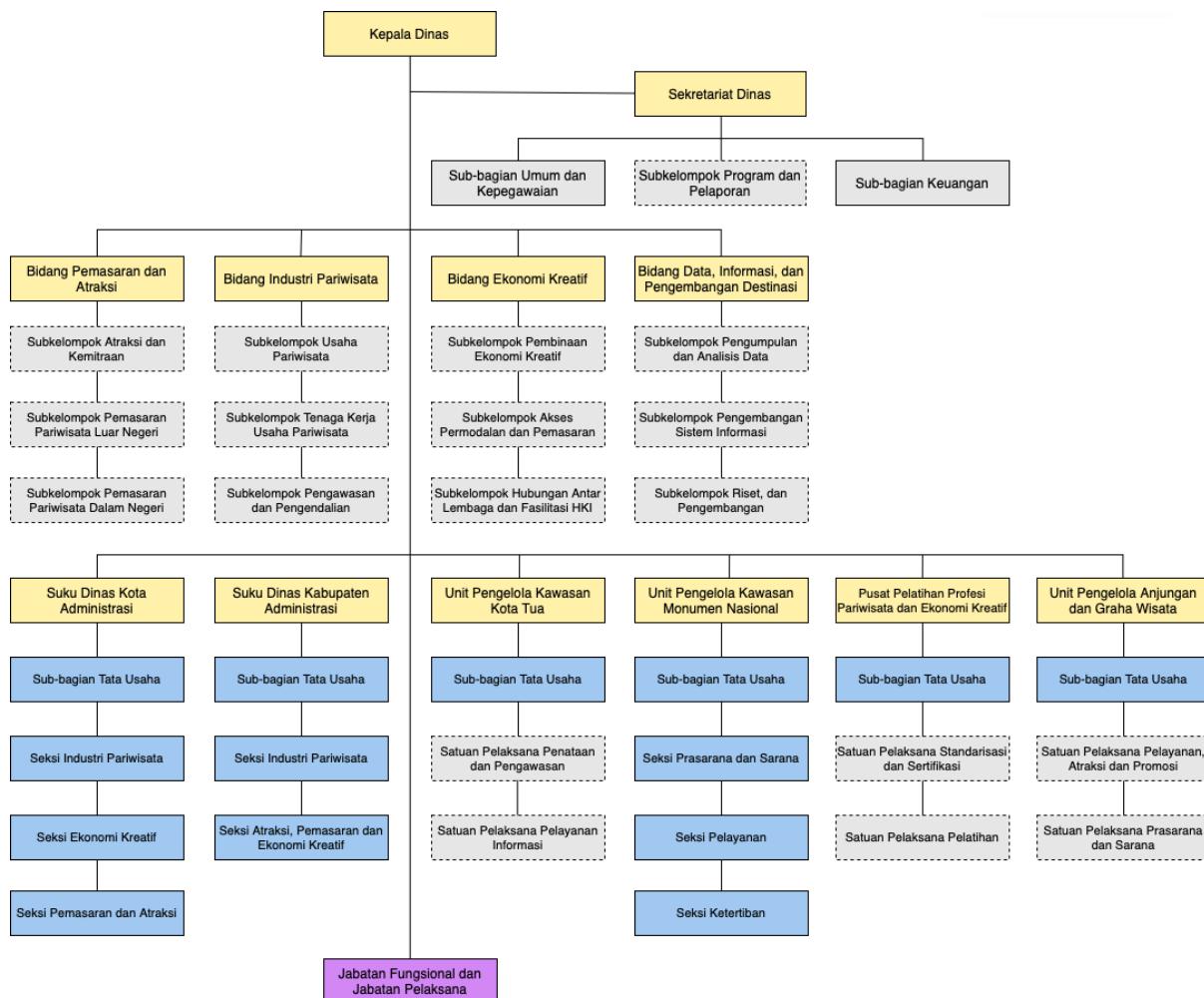
Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dijabarkan secara lebih rinci mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi Disparekraf. Pada Pergub tersebut, ditegaskan bahwa Disparekraf berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta dikoordinasikan secara fungsional oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. Kemudian, dijelaskan bahwa Disparekraf memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sub-urusan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Seluruh sub-urusan tersebut menunjukkan bahwa Disparekraf berperan sebagai pengelola ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif

secara holistik. Kedua sektor ini tidak diposisikan sebagai domain yang terpisah, melainkan dipandang sebagai subsistem yang saling terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi dan budaya kota.

Meninjau Pergub tersebut, secara garis besar fungsi utama Disparekraf meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan promosi pariwisata serta ekonomi kreatif.
3. Pembinaan pelaku usaha dan komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis pendukung.
5. Pengawasan, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah DKI Jakarta.

Secara fungsional, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengklasifikasikan urusan pariwisata sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif dikategorikan sebagai urusan pilihan yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal (Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Dengan demikian, keberadaan Disparekraf pada tingkat daerah merupakan bentuk kewenangan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan wilayah DKI Jakarta.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Struktur organisasi Disparekraf Provinsi DKI Jakarta tersusun secara hirarkis, mulai dari Kepala Dinas hingga kelompok fungsional, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Disparekraf. Tugasnya meliputi penetapan kebijakan strategis, menjalin koordinasi internal maupun eksternal, pengendalian kinerja seluruh unit organisasi, serta melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas berfungsi sebagai unit pendukung yang mengelola administrasi umum, penyusunan program, pelaporan, dan pengelolaan keuangan. Dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas mengelola administrasi umum kantor, kearsipan, kehumasan, rumah tangga, serta administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia (pegawai).

- Sub-kelompok Program dan Pelaporan

Bertugas menyusun program kerja, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran (RKA), serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Disparekraf. Sub-kelompok ini bertanggung jawab atas pengelolaan data dan sistem informasi.

- Subbagian Keuangan

Bertugas menyusun dan mengelola anggaran Disparekraf, termasuk pencairan dana, administrasi pertanggungjawaban keuangan, serta menyelesaikan tindak lanjut hasil audit.

3. Bidang Pemasaran dan Atraksi

Bidang ini bertugas mengembangkan pemasaran destinasi wisata di DKI Jakarta, baik domestik maupun internasional, serta menyelenggarakan berbagai atraksi wisata guna menarik kunjungan wisatawan. Di dalam bidang ini terdapat sub-kelompok berikut:

- Sub-kelompok Atraksi dan Kemitraan

Mengelola dan mengoordinasikan penyelenggaraan atraksi wisata, seperti festival dan event pariwisata. Sub ini juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan atraksi wisata.

- Sub-kelompok Pemasaran Pariwisata Luar Negeri

Bertugas khusus mengelola promosi pariwisata ke luar negeri, termasuk pelaksanaan roadshow, pameran internasional, serta menjalin kerja sama dengan agen perjalanan internasional.

- Sub-kelompok Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri

Fokus pada promosi wisata di pasar domestik, menyusun strategi pemasaran, menyelenggarakan kampanye wisata, serta memfasilitasi kerja sama dengan pelaku wisata lokal.

4. Bidang Industri Pariwisata

Bidang ini bertanggung jawab atas pembinaan, pengembangan, serta pengawasan berbagai usaha dalam industri pariwisata seperti hotel, restoran, dan biro perjalanan. Sub-kelompok yang ada di bawah bidang ini meliputi:

- Sub-kelompok Usaha Pariwisata

Bertugas melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha pariwisata, memantau perizinan, memberikan rekomendasi teknis industri pariwisata, serta mendukung pengembangan investasi di sektor pariwisata.

- Sub-kelompok Tenaga Kerja Usaha Pariwisata

Mengelola dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata.

- Sub-kelompok Pengawasan dan Pengendalian

Bertugas melakukan pengawasan terhadap usaha pariwisata, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menangani pengawasan perizinan usaha di bidang pariwisata.

5. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang ini bertugas mengembangkan potensi ekonomi kreatif di DKI Jakarta, mulai dari seni, budaya, desain, hingga teknologi. Sub-kelompok di bidang ini adalah:

- Sub-kelompok Pembinaan Ekonomi Kreatif

Menyusun program pembinaan usaha ekonomi kreatif, penyediaan zona kreatif dan ruang ekspresi, serta melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif melalui fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif.

- Sub-kelompok Akses Permodalan dan Pemasaran

Bertugas membantu pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses permodalan, promosi dan pengembangan pemasaran produk kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta menghubungkan pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas.

- Sub-kelompok Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi HK

Mengelola hubungan strategis antarlembaga, baik pemerintah maupun swasta, serta memfasilitasi pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan kekayaan intelektual dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif.

6. Bidang Data, Informasi, dan Pengembangan Destinasi

Bidang ini bertugas mengelola pengumpulan, analisis data pariwisata, serta pengembangan destinasi wisata di DKI Jakarta melalui pengelolaan sistem informasi dan kegiatan riset pengembangan destinasi. Fungsi utama bidang ini meliputi penyediaan informasi akurat untuk mendukung kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bidang ini terdiri dari tiga sub-kelompok utama, yaitu:

- Sub-kelompok Pengumpulan dan Analisis Data

Bertugas menghimpun, mengelola, dan menganalisis data terkait pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah DKI Jakarta, termasuk data kunjungan wisata, karakteristik wisatawan, kapasitas destinasi, serta statistik ekonomi kreatif. Informasi ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

- Sub-kelompok Pengembangan Sistem Informasi

Bertugas merancang, mengembangkan, serta mengelola sistem informasi pariwisata yang terpadu untuk kebutuhan internal Disparekraf maupun publik. Sistem informasi ini mencakup basis data destinasi wisata, aplikasi pelayanan wisatawan, serta integrasi data dengan sistem lain. Selain itu, Sub-kelompok ini juga melakukan pengelolaan *Tourist Information Center*.

- Sub-kelompok Riset dan Pengembangan

Melakukan penelitian, kajian ilmiah, serta analisis mendalam mengenai berbagai aspek pengembangan destinasi dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Hasil riset digunakan untuk perencanaan strategis, pengembangan produk wisata baru, peningkatan daya saing destinasi, serta pembuatan kebijakan berbasis data di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

7. Suku Dinas Kota Administrasi

Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada di tiap wilayah kota administrasi DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur). Bertugas melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran wisata, serta ekonomi kreatif di wilayah masing-masing. Struktur setiap Suku Dinas terdiri dari:

- Subbagian Tata Usaha: Bertugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Selain itu juga bertugas mengelola kehumasan dan pengoordinasian data dan sistem informasi.
- Seksi Industri Pariwisata: Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan industri pariwisata lokal, melalui pemberian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian.
- Seksi Ekonomi Kreatif: Mengelola, pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan

intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah setempat.

- Seksi Pemasaran dan Atraksi: Bertugas melaksanakan promosi dan atraksi wisata serta pengembangan destinasi pariwisata di tingkat kota.

8. Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bertugas khusus mengembangkan pariwisata di Kepulauan Seribu, mencakup destinasi wisata bahari, atraksi wisata, serta pembinaan ekonomi kreatif lokal.

Struktur terdiri dari:

- Subbagian Tata Usaha: Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Selain itu juga bertugas mengelola kehumasan dan pengoordinasian data dan sistem informasi.
- Subbagian Industri Pariwisata: Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan industri pariwisata lokal, melalui pemberian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian.
- Seksi Atraksi, Pemasaran, dan Ekonomi Kreatif: Bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Kepulauan Seribu.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit khusus yang bertugas secara teknis mengelola objek wisata atau fasilitas tertentu. Pada Disparekraf, UPT terdiri atas:

- 1) UPK Kota Tua

Mengelola, mengawasi, melestarikan, dan melayani pengunjung di kawasan Kota Tua. Struktur pada UPK kota Tua:

- Sub Bagian Tata Usaha

Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Satuan Pelaksana Penataan dan Pengawasan

Melaksanakan penataan, pengembangan prasarana dan sarana, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan kawasan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kawasan Kota Tua.

- b. Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi

Bertugas melaksanakan pelayanan informasi dan penyelenggaraan publikasi, seminar, lokakarya dan sejenisnya mengenai pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Kota Tua. Selain itu juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi dan publikasi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Kota Tua.

2) UPK Monumen Nasional (Monas)

Mengelola dan menjaga kawasan Monas, termasuk aspek pemeliharaan, keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada wisatawan. UPK Monas terdiri dari:

- Subbagian Tata Usaha

Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

- Seksi Prasarana dan Sarana

Menyusun dan melaksanakan pembangunan, penataan, pemeliharaan, pemantauan keindahan taman, air mancur, patung, pagar taman, tugu Monumen Nasional, sarana jalan pedestrian,

drainase, tempat pemeliharaan hewan, tempat usaha mikro dan kecil dalam Kawasan Monumen Nasional dan Taman Proklamasi.

- **Seksi Pelayanan**

Melaksanakan pengaturan, melayani, mengawasi dan mengendalikan kunjungan serta memberikan pelayanan edukatif kultural kepada pengunjung.

- **Seksi Ketertiban**

Bertugas memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, kenyamanan, mengatur pelayanan dan menertibkan parkir dalam Kawasan Monumen Nasional dan Taman Proklamasi.

3) UP Anjungan dan Graha Wisata

Mengelola fasilitas penginapan (Graha Wisata) dan Anjungan DKI Jakarta di TMII, termasuk pelayanan, promosi wisata, serta menyelenggarakan atraksi budaya. UP Anjungan dan Graha Wisata membawahi:

- **Sub Bagian Tata Usaha**

Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. **Satuan Pelaksana Pelayanan, Atraksi dan Promosi**

Menyelenggarakan atraksi, promosi dan pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi dan atraksi kepariwisataan dan kebudayaan kepariwisataan.

- b. **Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana**

Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana anjungan, atraksi serta pelayanan penginapan Graha Wisata.

4) Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (P4 Ekraf)

Menyelenggarakan pelatihan, standarisasi, dan sertifikasi profesi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Struktur pada P4 Ekraf:

- Sub Bagian Tata Usaha

Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

- a. Satuan Pelaksana Pelatihan

Bertugas melaksanakan pelatihan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan industri pariwisata dan lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan pelatihan profesi dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif.

- b. Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi

Menyusun dan mengevaluasi silabus, modul dan kurikulum pelatihan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Pegawai dengan keahlian spesifik yang bertugas secara fungsional mendukung tugas teknis dan administrasi di semua unit kerja Disparekraf. Mereka bertugas menjalankan fungsi-fungsi khusus sesuai bidang keahliannya, seperti Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Analis Pariwisata, Analis Ekonomi Kreatif, Pranata Humas, Pranata Komputer, Analis Sumber Daya Manusia, Perencana, Pustakawan, Arsiparis, serta fungsi lainnya yang relevan.

2.1.2 Sumber Daya

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen krusial dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Ketersediaan, komposisi, dan kapasitas SDM yang dimiliki akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi terkini SDM Disparekraf Provinsi DKI Jakarta menjadi landasan

penting untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Tabel 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Pelayanan

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Sekretariat	30
2	Bidang Pemasaran dan Atraksi	15
3	Bidang Industri Pariwisata	13
4	Bidang Ekonomi Kreatif	15
5	Bidang Data, Informasi, dan Pengembangan Destinasi	15
6	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat	16
7	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara	15
8	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat	15
9	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan	14
10	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur	12
11	Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Kepulauan Seribu	13
12	Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8
13	Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata	12
14	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	10
15	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	14
Jumlah		217

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Disparekraf Provinsi DKI Jakarta memiliki total 217 pegawai yang tersebar di 15 unit pelayanan. Rata-rata jumlah pegawai per unit berkisar 14-15 orang, dengan distribusi yang bervariasi tergantung pada fungsi dan kompleksitas tugas masing-masing unit. Sekretariat tercatat memiliki jumlah

pegawai tertinggi, yaitu 30 orang, mencerminkan perannya sebagai pusat koordinasi administratif. Sebaliknya, beberapa unit teknis, seperti Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun Unit Pengelola Kawasan Kota Tua memiliki jumlah pegawai yang lebih kecil.

Distribusi pegawai di lima wilayah Suku Dinas—Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur—serta di Kabupaten Kepulauan Seribu relatif seimbang, masing-masing berkisar antara 12 hingga 16 orang. Hal ini mengindikasikan SDM yang cukup proporsional untuk mendukung pelaksanaan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat kota/kabupaten. Meskipun demikian, penyebaran ini tetap perlu ditinjau secara periodik untuk memastikan kesesuaian dengan beban kerja dan dinamika wilayah, termasuk kebutuhan pengembangan destinasi, pengelolaan kawasan strategis, serta pengembangan ekonomi kreatif.

Selain itu, disparitas distribusi SDM antarunit perlu diantisipasi melalui kebijakan penataan ulang formasi atau optimalisasi kapasitas pegawai, termasuk pelatihan lintas fungsi pada unit yang mengalami kekurangan personel, guna menjaga efektivitas implementasi program dan keberlangsungan layanan Disparekraf DKI Jakarta secara menyeluruh.

Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Generasi Umur

No	Generasi	Jumlah
1	Generasi X (58-45 tahun)	97
2	Generasi Y (44-29 tahun)	92
3	Generasi Z (28-23 tahun)	28
Jumlah		217

Komposisi pegawai Disparekraf DKI Jakarta berdasarkan kategori generasi menunjukkan dominasi oleh Generasi X dan Generasi Y. Dari total pegawai 217

pegawai, Generasi X sebanyak 97 orang (44,7%) dan Generasi Y sebanyak 92 orang (42,2%), sedangkan Generasi Z hanya 28 orang (12,9%). Komposisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai Disparekraf DKI Jakarta berada dalam rentang usia produktif dengan latar belakang pengalaman kerja yang cukup matang, sehingga berpotensi menjadi sumber daya strategis dalam mendukung pelaksanaan program-program organisasi.

Akan tetapi, minimnya proporsi Generasi Z dalam struktur kepegawaian Disparekraf DKI Jakarta mengindikasikan adanya tantangan dalam proses kaderisasi dan inovasi kelembagaan di masa mendatang. Padahal, Generasi Z membawa potensi besar dari sisi kreativitas, literasi digital, serta cara pandang yang progresif terhadap isu-isu global. Apabila tidak diantisipasi melalui strategi pengembangan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan, Disparekraf DKI Jakarta berisiko menghadapi kesenjangan kompetensi antar generasi serta stagnasi dalam proses transformasi kelembagaan, terutama di tengah tuntutan lingkungan kerja yang semakin dinamis, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Oleh karenanya, pengelolaan tenaga kerja multigenerasi perlu menjadi bagian integral dari kebijakan manajemen SDM di Disparekraf DKI Jakarta, agar tercipta sinergi antargenerasi yang produktif dan adaptif.

Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	106
2	Perempuan	111
Jumlah		217

Dari aspek jenis kelamin, komposisi SDM di lingkungan Disparekraf DKI Jakarta menunjukkan proporsi yang relatif seimbang, yaitu terdiri dari 106 pegawai laki-laki (48,8%) dan 111 pegawai perempuan (51,2%). Keseimbangan ini mencerminkan

implementasi prinsip kesetaraan gender dalam sistem kepegawaian, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi tanpa diskriminasi gender ([KemenPAN-RB, 2022](#)). Komposisi gender yang seimbang ini diyakini mampu menjadi kekuatan karena akan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil, serta potensi beragam perspektif dalam pengambilan kebijakan. Meskipun demikian, Disparekraf DKI Jakarta tetap perlu memastikan peluang karier yang setara bagi seluruh pegawai, termasuk posisi kepemimpinan, sesuai dengan prinsip pengarusutamaan gender nasional.

Tabel 4 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SMA/SMK	38
2	D-3	40
3	D-4	2
4	S-1	96
5	S-2	41
Jumlah		217

Sebaran jenjang pendidikan pegawai Disparekraf DKI Jakarta menunjukkan komposisi yang beragam. Dari total 217 pegawai, sebanyak 96 orang (44,2%) telah menyelesaikan Strata 1 (S-1), sementara 41 orang merupakan lulusan Strata 2 (S-2). Di samping itu, terdapat 40 pegawai (18,4%) yang berlatar belakang Diploma 3, 2 orang (0,9%) lulusan Diplomat 4, serta 38 pegawai (17,5) dengan jenjang pendidikan SMA/SMK. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki pendidikan tinggi, yang secara kelembagaan dapat menjadi kekuatan untuk mendukung pelaksanaan program berbasis analisis dan inovasi. Tingginya proporsi S-1 dan S-2 ini juga mencerminkan kesiapan Disparekraf DKI Jakarta dalam mendukung profesionalisme aparatur,

khkusnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun demikian, keberadaan sekitar 37,5% pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah dan diploma, perlu menjadi perhatian penting dalam perencanaan SDM. Pegawai dengan jenjang pendidikan menengah dan vokasi cenderung memiliki keunggulan pada aspek teknis dan operasional, sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas melalui skema pelatihan fungsional, program pendidikan lanjutan, serta peningkatan keterampilan. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai Disparekraf DKI Jakarta memiliki kompetensi yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi ke depan.

2.1.2.2 Aset/Modal

Disparekraf DKI Jakarta memiliki berbagai bentuk aset yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya, baik pada dinas, suku dinas, maupun unit pelaksana teknis. Aset-aset tersebut tercatat dan dikelompokkan dalam sistem Kartu Inventaris Barang (KIB), yang mencakup Kelompok KIB A (tanah), KIB B (peralatan dan mesin), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (infrastruktur/jaringan), KIB E (aset tetap lainnya), dan KIB F (konstruksi dalam penggerjaan). Adapun rekapitulasi perkembangan aset Disparekraf DKI Jakarta tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 Rekapitulasi Aset Disparekraf DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	KIB A (unit)	Nilai (Rp)	KIB B (unit)	Nilai (Rp)	KIB C (unit)	Nilai (Rp)	KIB D (unit)	Nilai (Rp)	KIB E (unit)	Nilai (Rp)
2020	3	37.733.884.000	2.875	42.530.661.814	18	38.616.705.411	2	160.438.880	66	120.056.838
2021	3	37.733.884.000	2.726	41.825.564.619	4	38.658.285.411	2	160.438.880	66	120.056.838
2022	2	16.708.054.000	2.854	43.237.647.376	4	32.264.156.460	1	114.783.680	62	11.903.366
2023	6	576.675.737.785	8.319	137.966.802.303	69	81.389.715.313	56	112.426.493.855	3.753	19.595.607.378
2024	5	555.074.333.785	8.016	110.792.863.331	74	81.284.956.912	56	112.567.956.269	3.754	20.139.622.117

Pada akhir tahun 2024, jumlah aset menunjukkan dinamika yang beragam. Aset tanah (KIB A) pada awal periode relatif stabil, kemudian mengalami penurunan baik dari jumlah maupun nilai pada 2022. Tren ini berbalik pada tahun 2023 dengan peningkatan yang cukup besar, meskipun pada 2024 kembali mengalami sedikit penurunan. Hal ini dikarenakan tanah pada Gedung C ditransfer ke luar SKPD. Aset peralatan dan mesin (KIB B) cenderung stabil pada awal periode dengan nilai yang relatif sama dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan baik dari sisi jumlah unit maupun nilai aset, yang kemudian terdapat penurunan pada 2024 dikarenakan beberapa hal, seperti reklasifikasi ke aset rusak berat, transfer keluar SKPD dan lain sebagainya.

Untuk aset gedung dan bangunan (KIB C), terdapat penurunan cukup tajam dari tahun 2020 ke tahun 2022, di mana jumlah unit yang tercatat jauh lebih sedikit, hal ini dikarenakan reklasifikasi aset dan pengembalian aset (Gedung C). Tren ini berubah pada tahun 2023 ketika jumlah unit meningkat kembali secara drastis dan tetap tumbuh hingga 2024 seperti Pos Jaga, rumah panel, homestay di Kepulauan Seribu, Bangunan Bengkel, dan lain-lain. Sementara itu, Infrastruktur (KIB D) dan aset tetap lainnya (KIB E) menunjukkan tren yang serupa, yaitu relatif stagnan pada 2020-2021, lalu sedikit menurun pada 2022.

Kemudian, pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah unit serta nilai yang signifikan, dan tren ini bertahan hingga 2024. Adapun untuk aset pembangunan baru (KIB F), tidak terdapat catatan penambahan selama lima tahun terakhir, dikarenakan Disparekraf tidak memiliki tugas dan fungsi dalam hal pembangunan gedung.

Secara umum, perkembangan aset Disparekraf DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan. Lonjakan yang terjadi sejak tahun 2023 menunjukkan adanya upaya penguatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Meskipun pencatatan aset masih menjadi perhatian dalam laporan BPK (Warta BPK, 2024), tren peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan tata kelola dan optimalisasi pemanfaatan aset di masa mendatang. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi DKI Jakarta untuk memperkuat daya dukung infrastruktur dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, Disparekraf DKI Jakarta beroperasi di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan menempati dua gedung utama, yaitu: 1) Gedung A di Jl. Kuningan Barat Raya No. 2; dan 2) Gedung B di Jl. Kuningan Barat Raya No. 1. Selain itu, struktur organisasi Disparekraf DKI Jakarta diperkuat oleh enam Suku Dinas yang tersebar di seluruh wilayah administratif Jakarta, empat Unit Pelaksana yang menjalankan fungsi teknis pada lokasi strategis, seperti Anjungan Graha Wisata yang terdiri atas 3 gedung yakni Anjungan Provinsi DKI Jakarta di TMII, Graha Wisata TMII Dan Graha Wisata Ragunan, Kota Tua, Monumen Nasional, serta Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Secara umum, kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung yang dimiliki Disparekraf berada dalam kategori baik dan layak fungsi. Namun demikian, sebagian aset telah berusia cukup tua dan memerlukan perhatian dalam bentuk perawatan berkala maupun revitalisasi. Untuk jumlah kendaraan dinas sudah cukup memadai. Hingga tahun 2025, Disparekraf DKI Jakarta tercatat memiliki 127 unit dengan KDO berbahan

bakar minyak sebanyak 79 Unit dan KDO listrik sebanyak 48 Unit. Penggunaan KDO Listrik diperuntukan pada lokasi destinasi, yaitu Monas, Kota Tua dan Anjungan Taman Mini. Selain itu, Disparekraf juga memiliki 1 unit *Tourist Information Center (TIC) mobile* dan 2 unit Kereta Wisata (Roda 6).

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta (Disparekraf DKI Jakarta) selama lima tahun terakhir mencerminkan pelaksanaan kewenangan daerah yang bersifat konkuren dan telah disentralisasikan ke pemerintah provinsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait kewenangan khusus di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dalam ketentuan sektoral Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Urusan pemerintahan tersebut mencakup empat domain utama: Destinasi Wisata, Pemasaran Wisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, capaian kinerja Disparekraf juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap ekonomi dan pendapatan daerah.

2.1.3.1 Destinasi Wisata

Sebagai simpul utama aktivitas perkotaan dan pusat transit regional, Jakarta memiliki peran strategis dalam membangun daya saing melalui pengelolaan destinasi wisata yang adaptif, tematik, dan berorientasi pengalaman. Urusan destinasi wisata merupakan fondasi utama dalam pengembangan sektor pariwisata provinsi, mencakup berbagai aspek mulai dari penataan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis, dan pengembangan destinasi lintas wilayah administrasi.

Dalam lima tahun terakhir, upaya penguatan destinasi wisata Jakarta telah diarahkan pada peningkatan jumlah lokasi pariwisata yang terkelola dengan baik sehingga

mampu memenuhi kebutuhan informasi dan layanan wisatawan, penataan ulang kawasan strategis seperti Kota Tua dan Monas, serta pemutakhiran sistem registrasi usaha pariwisata untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan. Berikut ini adalah capaian kinerja yang telah dicatat dalam sub urusan destinasi wisata.

Tabel 6 Capaian Kinerja Sub Urusan Destinasi Wisata

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dalam Persentase (%)	
		2023	2024
1	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	121, 51	11,45
2	Jumlah Lokasi Pariwisata yang Terkelola dengan Baik	100	100

Sumber: LKIP dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta

Tahun 2023-2024

Indikator di atas merepresentasikan peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta. Indikator ini menekankan pada sejauh mana lokasi pariwisata dikelola secara profesional, berstandar layanan, serta mampu memberikan pengalaman yang aman, nyaman, dan informatif bagi wisatawan.

Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata merupakan penilaian yang dilaksanakan melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang ada pada UPK Kota Tua, Monas dan Anjungan dan Graha Wisata. Terdapat 9 unsur pelayanan yang disurvei, yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu, biaya, produk pelayanan, kompetensi pegawai, perilaku, sarana pengaduan, dan sarana prasarana. Pada tahun 2023 dan 2024, hasil survei menunjukkan kepuasan pengunjung melebihi target 100%, membuktikan kualitas pelayanan yang optimal.

Pada tahun 2023, realisasi indikator mencapai 100% dengan jumlah 9 (sembilan) lokasi yang terkelola dengan baik. Lokasi tersebut meliputi: Monumen Nasional sebagai ikon wisata nasional, Kawasan Kota Tua yang menjadi pusat warisan sejarah Jakarta, serta Anjungan dan Graha Wisata yang mendukung kegiatan wisata berbasis komunitas. Selain itu, layanan *Tourist Information Center* (TIC) juga menjadi bagian penting dari realisasi, mencakup juga menjadi bagian penting dari realisasi, mencakup TIC Bandara Soekarno Hatta, TIC Bandara Halim Perdama Kusuma, TIC MPU Bali, TIC Mobile, TIC Jakarta *Experience Board* (JXB), dan TIC Kota Tua. Kehadiran sembilan lokasi ini menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kualitas layanan wisata melalui kombinasi antara destinasi utama dan pusat informasi wisata.

Kemudian, pada tahun 2024, capaian indikator kembali menunjukkan 100% dengan realisasi 8 (delapan) lokasi yang dikelola dengan baik. Lokasi yang tercakup adalah: Monumen Nasional, Kawasan Kota Tua, Anjungan dan Graha Wisata, TIC Kota Tua, serta TIC Bandara Soekarno Hatta. Selain itu, terdapat perluasan titik layanan informasi wisata ke beberapa lokasi strategis baru, yaitu TIC Monumen Nasional, TIC Stasiun Gambir, dan TIC Jakarta Theater. Pergeseran dari sembilan lokasi pada tahun 2023 menjadi delapan lokasi pada tahun 2024 tidak mengurangi capaian indikator, karena seluruh lokasi yang ditetapkan telah memenuhi standar pengelolaan pariwisata.

Perubahan ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan wisatawan dengan menghadirkan TIC di simpul transportasi utama dan pusat keramaian kota. Dengan demikian, capaian indikator selama dua tahun berturut-turut menggambarkan konsistensi pengelolaan pariwisata di DKI Jakarta. Selain menjaga kualitas destinasi utama, Disparekraf DKI Jakarta juga terus memperluas jangkauan layanan informasi wisata sehingga dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memperkuat daya saing pariwisata Jakarta.

Tabel 7 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke-20 Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta
Tahun 2020-2024

No	Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DI Jakarta				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Taman Impian Jaya Ancol	2.830.157	3.248.408	6.904.509	11.293.063	9.797.419*
2	Kawasan Kota Tua	1.189.798	203.328	1.857.316	3.082.556	5.708.264
3	Taman Mini Indonesia Indah	1.123.542	889.393	681.846	2.770.013	3.465.436*
4	Taman Margasatwa Ragunan	651.952	784.192	3.917.853	5.589.853	4.787.828
5	Kawasan Monumen Nasional	438.695	-	3.984.462	7.265.172	8.095.232
6	Kepulauan Seribu	250.612	122.103	309.332	388.962	393.032
7	Museum Sejarah Jakarta	153.324	51.917	321.507	613.982	378.046
8	PBB Setu Babakan	147.809	44.132	225.488	297.628	333.767
9	Museum Nasional	63.134	2.229	299.445	269.222	235.303
10	Museum Wayang	46.608	19.139	131.119	268.725	90.924
11	Museum Seni Rupa Keramik	29.826	8.958	91.963	256.544	140.761
12	Planetarium	22.278	-	-	-	-
13	Taman Arkeologi Onrust	26.862	29.783	31.929	28.682	15.237
14	Pelabuhan Sunda Kelapa	18.464	32.950	4.251	26.723	14.685
15	Rumah Si Pitung/Situs Marunda	15.552	15.243	13.921	9.815	11.281
16	Museum Bahari	9.125	10.660	25.705	44.601	37.917
17	Museum Tekstil	7.937	3.604	22.724	55.259	32.398
18	Museum Satria Mandala	3.183	2.465	-	24.884	24.280*
19	Museum Prasasti	3.958	2.229	5.418	7.426	4.060

No	Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DI Jakarta				
		2020	2021	2022	2023	2024
20	Museum Joang '45 dan Thamrin	3.596	2.410	7.746	10.387	9.625
	Jumlah	7.036.412	5.473.143	18.836.534	32.303.497	33.575.495

Sumber: Data Saku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Jumlah kunjungan wisatawan ke-20 obyek wisata unggulan di DKI Jakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika pemulihan yang signifikan setelah pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, total kunjungan tercatat sebanyak 7.036 juta, kemudian menurun menjadi sekitar 5.47 juta pada 2021. Rendahnya jumlah kunjungan pada dua tahun tersebut terutama dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan mobilitas dan penutupan sebagian besar destinasi wisata. Memasuki tahun 2022, sektor pariwisata mulai bangkit dengan lonjakan kunjungan ke wisata unggulan mencapai 18.83 juta wisatawan. Peningkatan ini terutama didorong oleh Taman Impian Jaya Ancol (6.90 juta), Kawasan Monumen Nasional (3.98 juta), dan Taman Margasatwa Ragunan (3.91 juta), yang kembali menjadi pilihan utama wisata keluarga.

Pada tahun 2023, tren positif berlanjut dengan jumlah kunjungan mencapai sekitar 32.3 juta wisatawan, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi sekitar 33.57 juta wisatawan. Kontributor utama pertumbuhan pada dua tahun tersebut adalah destinasi berskala besar dengan kapasitas ruang terbuka. Taman Impian Jaya Ancol dan Kawasan Monumen Nasional masih menjadi destinasi dengan jumlah pengunjung terbesar di Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah juga menunjukkan tren pemulihan signifikan pasca-revitalisasi.

Selain itu, kawasan berbasis sejarah juga menunjukkan perkembangan positif. Kawasan Kota Tua meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa museum, seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa Keramik turut menyumbang peningkatan jumlah wisatawan,

menandakan bertumbuhnya kembali minat masyarakat pada wisata edukatif dan budaya perkotaan.

Namun demikian, distribusi kunjungan masih terkonsentrasi pada destinasi tertentu, mengindikasikan bahwa diversifikasi kawasan wisata belum optimal. Beberapa destinasi masih memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, analisis terhadap data kunjungan ini menjadi dasar penting untuk perumusan strategi pengembangan destinasi yang lebih inklusif dan regeneratif, termasuk melalui pendekatan klaster, penguatan konektivitas transportasi, pengembangan narasi tematik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan pariwisata regeneratif.

Pariwisata regeneratif yang dimaksud adalah pendekatan pariwisata yang tidak hanya berfokus pada meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal (seperti konsep pariwisata berkelanjutan), tetapi juga berupaya memulihkan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi alam, sosial, budaya, dan ekonomi di destinasi wisata. Tabel 7 mencerminkan bahwa keberhasilan pariwisata Jakarta ke depan tidak cukup diukur dari volume kunjungan semata, tetapi juga dari kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan dampaknya bagi wilayah dan masyarakat kota.

2.1.3.2 Pemasaran Wisata

Capaian sub urusan pemasaran wisata mencerminkan keberhasilan Disparekraf Provinsi Jakarta dalam merespons tantangan pemulihan sektor pariwisata, khususnya melalui pendekatan berbasis digital, aktivasi event, dan penguatan identitas destinasi Jakarta. Berikut ini adalah capaian yang telah dicatat dalam sub urusan pemasaran wisata.

Tabel 8 Capaian Sub Urusan Pemasaran Wisata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah E-Tourism	User	714.104	2.945.970	12.208.876	8.810.929	111.588.840

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	7.036.412	5.499.040	18.556.888	28.851.838	35.845.232
3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	435.888	119.419	696.669	1.963.059	2.499.463
4	Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Nusantara di Hotel Berbintang	Hari	2,20**	1,9	1,84	2,31	1,52
5	Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara	Hari	4,08**	2,9	3,17	3,08	1,99
(**) Data diambil dari Data Saku Disparekraf Provinsi DKI Jakarta							

Sumber: LKIP dan Data Saku Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024. Diolah kembali oleh Penulis

Capaian pemasaran pariwisata Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan pola pemulihan yang bertahap pasca pandemi COVID-19 serta pergeseran strategi menuju digitalisasi dan penguatan *city branding*. Berdasarkan data capaian di atas, tren kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara menunjukkan pemulihan yang signifikan pada tahun 2020 hingga 2024 setelah mengalami penurunan tajam akibat pandemi. Jumlah wisatawan nusantara meningkat drastis dari 5.49 juta pada 2021 menjadi 18.56 juta pada 2022, dan melonjak menjadi 35.84 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa Jakarta masih menjadi magnet utama untuk wisata domestik, terutama di segmen MICE, belanja, dan kuliner.

Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara yang sempat terpuruk hingga hanya 119 ribu orang pada 2021 menunjukkan pemulihan tajam pada 2022 (619 ribu) dan terus naik menjadi 2.49 juta pada 2024. Tingkat pertumbuhan pada 2022 bahkan mencapai 483,38%, menunjukkan efek *rebound* yang kuat pasca pandemi. Kinerja ini selaras dengan strategi Disparekraf yang mengintensifkan promosi pariwisata ke luar negeri, termasuk melalui kanal digital dan keikutsertaan dalam bursa pariwisata internasional, sehingga turut memperkuat visibilitas Jakarta sebagai destinasi pariwisata global.

Transformasi digital dalam strategi pemasaran juga terefleksi pada indikator jumlah pengguna *platform e-tourism*, yang meningkat tajam dari sekitar 714 ribu pada 2020 menjadi lebih dari 111 juta pengguna pada 2024. Kenaikan eksponensial ini mengindikasikan pergeseran perilaku wisatawan menuju pencarian informasi, reservasi, dan interaksi digital. Penguatan layanan digital termasuk aktivasi *website*, media sosial, dan kemitraan dengan aggregator wisata menjadi faktor pendorong utama. Meski demikian, tantangan masih dihadapi terkait keterpaduan antar-*platform* dan pemanfaatan *big data*. Ke depan, pendekatan pemasaran yang lebih tersegmentasi, berbasis pengalaman, serta penguatan digital *branding* Jakarta sebagai kota global yang kaya akan atraksi urban menjadi arah yang krusial untuk meningkatkan daya saing sektor ini.

Namun demikian, meskipun jumlah kunjungan meningkat, indikator rata-rata lama menginap (*length of stay*) dan tingkat hunian kamar hotel berbintang belum sepenuhnya pulih. Lama menginap wisatawan nusantara menurun dari 2.31 hari pada 2023 menjadi hanya 1.52 hari pada 2024, sementara wisatawan mancanegara juga mengalami penurunan dari 3.08 menjadi 1.99 hari dalam periode yang sama. Ketergantungan pada event atau momentum tertentu membuat fluktuasi kunjungan tidak merata. Oleh karena itu, ke depan, strategi pemasaran wisata Jakarta perlu ditujukan untuk strategi berbasis ekosistem destinasi dan pengalaman kota (*city experience*). Hal ini mencakup pemanfaatan data wisatawan untuk segmentasi pasar,

penguatan *branding* tematik, kolaborasi dengan sektor transportasi dan gaya hidup, serta konsistensi kampanye Jakarta sebagai kota global dengan karakter budaya urban yang khas.

2.1.3.3 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja dalam sub urusan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya merefleksikan kuantitas pertumbuhan pelaku usaha, namun juga kualitas dan legalitas produk ekonomi kreatif dalam menghadapi dinamika ekonomi berbasis inovasi. Berikut ini adalah capaian kinerja yang telah dicatat dalam sub urusan pengembangan ekonomi kreatif, dimana indikator tersebut baru dimulai pada tahun 2023 sesuai dengan Renstra Disparekraf 2023-2026.

Tabel 9 Capaian Kinerja Sub Urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dalam Persentase (%)	
		2023	2024
1	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	101,27	101,55
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif	155,58	123,25
3	Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaptarkan Kekayaan Intelektualnya	106,8	111,78
4	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Fasilitasi HKI	118,4	105,11

Sumber: LKIP Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Kinerja pengembangan ekonomi kreatif DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2023-2024.

Pada tahun 2023, jumlah usaha ekonomi kreatif mencapai 101,27%, dan meningkat sedikit menjadi 101,55% pada 2024. Stabilitas ini mencerminkan keberlanjutan usaha

kreatif yang didukung oleh intervensi pemerintah, seperti penyediaan sarana ruang kreatif, fasilitasi promosi, serta peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Capaian ini juga menjadi indikator bahwa Jakarta memiliki ekosistem ekonomi kreatif yang relatif tangguh, terutama di subsektor berbasis digital dan komunitas urban.

Lebih signifikan, pada tahun 2023 tercatat persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif sebesar 155,58%, sementara pada 2024 tetap berada pada angka yang tinggi yaitu 123,25%. Besarnya angka ini menunjukkan antusiasme pelaku usaha dan potensi pasar yang terus berkembang. Di sisi lain, jumlah produk atau jasa ekonomi kreatif yang telah didaftarkan dalam sistem kekayaan intelektual juga mengalami peningkatan, dari 106,8% pada 2023 menjadi 111,78% pada 2024. Selain itu, indikator Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Fasilitasi HKI pada tahun 2023 mencapai 118,4%, sementara pada 2024 tetap melebihi target yaitu 105,11%. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta, serta efektivitas fasilitasi pendaftaran HKI.

Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya perlindungan atas kekayaan intelektual, dan kurangnya kurasi produk unggulan masih menjadi hambatan struktural. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih progresif, termasuk penguatan lembaga kurator, insentif berbasis HKI, dan perluasan kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan ekosistem yang inklusif, Jakarta memiliki peluang besar untuk memantapkan posisinya sebagai pusat ekonomi kreatif terdepan di Asia Tenggara.

2.1.3.4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global. Berikut ini adalah capaian kinerja yang telah dicatat dalam sub urusan pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tabel 10 Capaian Kinerja Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dalam persentase (%)	
		2023	2024
1	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	110,68	101,49
2	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi Rencana Kerja TW IV 2023 dan LKIP Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2024

Berdasarkan data capaian di atas, diketahui bahwa bahwa indikator Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi merupakan indikator baru pada Renstra 2023-2026.

Jika dibandingkan dengan tren nasional, data BPS dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap total tenaga kerja nasional mencapai lebih dari 23 juta orang pada 2022, atau sekitar 17% dari total angkatan kerja Indonesia. Di DKI Jakarta sendiri, menurut Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta 2024 (BPS, 2025b), jumlah penduduk bekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai 221.413 orang, dan sektor informasi dan komunikasi (salah satu subsektor ekonomi kreatif digital) mencapai 262.832 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan penyerap tenaga kerja yang sangat signifikan. Oleh karenanya, ke depan Disparekraf diharapkan memiliki indikator yang mendorong pengembangan SDM Parekraf serta penguatan dalam sistem pelaporan yang lebih

konsisten, terukur, dan berorientasi hasil, guna mendukung formulasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2.1.3.5 Kinerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 terkait Dampak Ekonomi dan Pendapatan Daerah

Dalam data periode kinerja 2020-2024, terdapat dinamika persentase capaian (perbandingan target dan realisasi) indikator kinerja utama untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 11 PDRB Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Atas Dasar Harga Berlaku)

Indikator Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sektor Pariwisata (Rp. Miliar)					
• Jenis Lapangan Usaha: Penyediaan akomodasi, makan, dan minum	115.090,75	127.092,98	143.663,36	161.237,93	178.510,88
• Kontribusi PDRB (%)	4,16	4,36	4,51	4,68	4,85
PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (Rp. Miliar)					
• Arsitektur, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film Animasi dan Video, Fotografi, Kriya, Kuliner, Musik, Fashion, Aplikasi dan Pengembang Permainan, Penerbitan, Periklanan, Televisi dan Radio, Seni Pertunjukan, dan Seni Rupa	279.425,63	300.310,98	331.061,60	361.707,82	192.576,33**
• Kontribusi PDRB (%)	10,10	10,31	10,38	10,51	10,63**
(**) Data yang dikumpulkan sampai dengan Semester 1 tahun 2024					

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2024)

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan kontribusi yang signifikan dan terus meningkat terhadap perekonomian DKI Jakarta selama periode 2020 hingga 2023, dengan tren berlanjut hingga pertengahan tahun 2024.

Pada sektor pariwisata, yang direpresentasikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman, terjadi pemulihan bertahap pasca pandemi COVID-19. Setelah mencatat nilai PDRB sebesar Rp115.090,75 miliar pada 2020, sektor ini tumbuh menjadi Rp161.237,93 miliar pada 2023 dan mencapai Rp178.510,88 miliar pada triwulan III tahun 2024. Kontribusi terhadap total PDRB DKI Jakarta juga meningkat dari 4,16% pada 2020 menjadi 4,85% di 2024 (Q1-Q3). Hal ini mencerminkan pulihnya mobilitas kegiatan wisata, yang sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, termasuk aktivitas MICE yang kembali bergeliat di DKI Jakarta.

Sementara itu, pada sektor ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan yang lebih konsisten dan stabil. Nilai PDRB sektor ini tumbuh dari Rp279.425,63 miliar pada 2020 menjadi Rp361.707,82 miliar pada 2023. Kontribusinya terhadap PDRB DKI Jakarta menunjukkan tren kenaikan dari 10,10% pada 2020 menjadi 10,63% di semester I tahun 2024. Sub-sektor yang termasuk di dalamnya, seluruhnya mendorong pertumbuhan melalui transformasi digital dan ekspansi pasar konten kreatif.

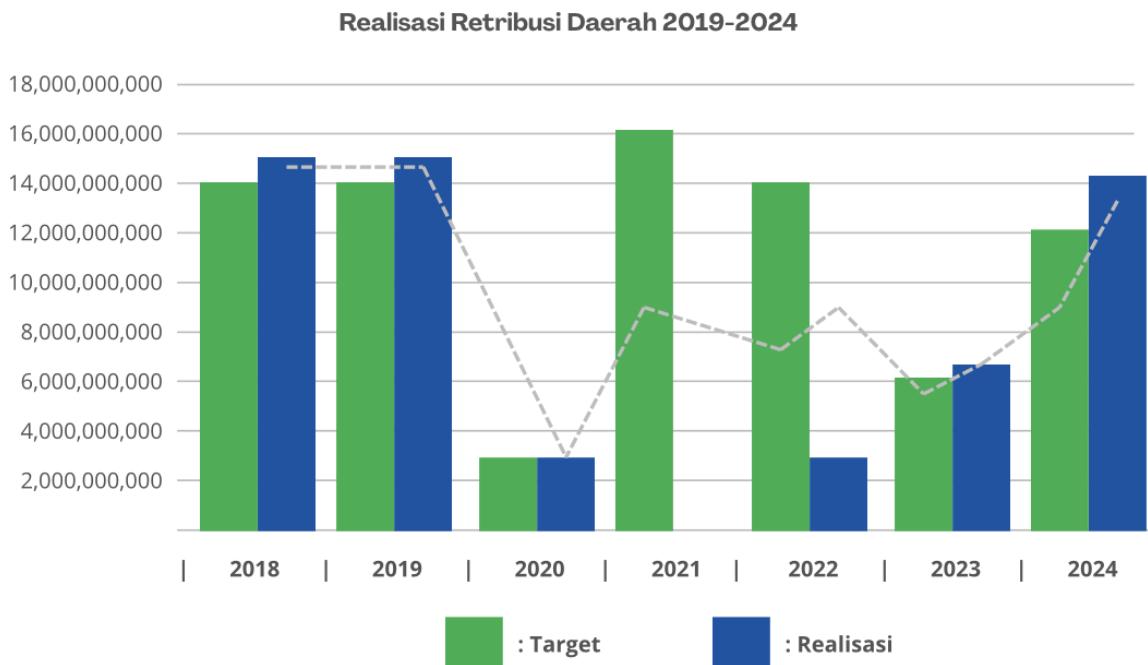
Tabel 12 PAD dan Retribusi Pariwisata Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
P. Restoran	1.935.159.453.085	2.159.347.525.201	3.397.718.782.184	3.952.206.845.742	4.274.090.662.159
P. Hotel	753.139.389.954	866.412.673.859	1.493.548.815.069	1.900.720.722.944	2.120.240.512.862
P. Hiburan	220.239.227.782	86.884.580.630	400.381.479.302	687.827.744.966	623.784.628.384
Retribusi	3.010.532.000	0	2.966.438.250	6.659.052.250	14.425.990.409
Total PAD	2.908.538.070.821	3.112.644.779.690	5.291.649.076.555	6.540.755.313.652	7.018.115.803.405
Total PAD & Ret.	2.911.548.602.821	3.112.664.779.690	5.294.615.514.805	6.547.414.365.902	7.032.541.793.814
Catatan: Data diolah berdasarkan Data Saku Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024					

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, yang direpresentasikan melalui pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran, menunjukkan tren pemulihan yang signifikan setelah terdampak pandemi. Pada tahun 2020, total PAD dari ketiga komponen tersebut hanya mencapai sekitar Rp 2,9 triliun. Namun, pada 2023 dan 2024, nilai ini meningkat menjadi Rp 5,8 triliun dan diproyeksikan Rp 7,0 triliun, seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata dan konsumsi gaya hidup di Jakarta. Peningkatan PAD tidak hanya mencerminkan pulihnya daya beli dan mobilitas masyarakat, tetapi juga keberhasilan program pemulihan ekonomi dan promosi destinasi serta event strategis yang digerakkan oleh Disparekraf.

Selain melalui PAD, sumber Pendapatan Daerah lainnya berasal dari retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari jenis Retribusi Jasa Usaha. Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi pada Disparekraf adalah UPK Monumen Nasional dan UP Anjungan dan Graha Wisata.

Pada UPK Monas, dipungut retribusi atas objek retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Retribusi pemanfaatan aset berupa pemakaian plaza taman, Jl. Silang Monas, areal taman medan merdeka, dan taman monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan RI. Sementara itu, pada UP Anjungan dan Graha Wisata, objek retribusi yang dipungut adalah Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila berupa pemakaian penginapan graha wisata TMII dan ragunan dan Retribusi pemanfaatan aset berupa pemakaian tempat ruang pertemuan graha wisata TMII dan ragunan.



Gambar 2 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2024

Pada masa pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahun 2020-2023 realisasi pendapatan retribusi daerah menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2020, realisasi retribusi sebesar 103,99% dari target Rp2.895.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2021 dikarenakan Covid-19. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2022 retribusi terealisasi hanya 20,99%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan Kawasan Monas baru dapat dibuka untuk umum pada 16 Juni 2022 sesuai dengan pemberlakuan PPKM 75-100%. Selain itu, Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 675 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 Tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Graha Wisata TMII dan Ragunan digunakan untuk Isolasi Mandiri Pasien OTG (Orang Tanpa Gejala).

Pada tahun 2023 realisasi retribusi mulai meningkat menjadi 108,49% seiring diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

pada 14 November 2023. Adapun pada tahun 2024 realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar 119,57% dimana nilai ini meningkat 216,64% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh penggunaan Graha Wisata Ragunan oleh atlet Kemenpora dan Pemberlakuan jam kunjungan malam di cawan dan tugu Monas Selasa-Jumat pukul 08.00-18.00 WIB, Sabtu-Minggu pukul 08.00-22.00 WIB.

Tabel 13 Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Anggaran (Rp)	459.271.857.799	384.370.822.077	469.199.716.318	437.411.304.900	397.855.835.737
Anggaran Perubahan (Rp)	336.170.976.719	205.091.022.539	439.137.935.609	410.607.693.406	412.251.605.638
Realisasi (Rp)	201.993.286.627	186.780.880.176	394.588.284.912	375.055.403.592	383.444.641.730

Selama periode 2020–2024, realisasi anggaran Disparekraf DKI Jakarta mengalami fluktuasi yang mencerminkan dampak pandemi, proses pemulihan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan fiskal daerah. Pada tahun 2020-2021, alokasi dan realisasi anggaran mengalami penurunan akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19. Hal ini terlihat dari *refocusing* anggaran pada sektor pariwisata dan pembatasan kegiatan promosi serta event yang menjadi salah satu instrumen utama Disparekraf.

Memasuki tahun 2022, anggaran mulai menunjukkan tren pemulihan seiring dilonggarkannya pembatasan sosial dan kembalinya aktivitas sektor pariwisata secara bertahap, termasuk pelaksanaan event hybrid dan pembukaan destinasi wisata secara terbatas. Namun, efektivitas realisasi anggaran belum optimal karena masih terdapat hambatan teknis dan ketidakpastian global, seperti varian baru COVID-19 yang kembali menekan mobilitas wisatawan. Kinerja fiskal Disparekraf kembali meningkat pada 2023 dan 2024, sejalan dengan meningkatnya aktivitas MICE, pelaksanaan program *city branding*, dan penyelenggaraan event strategis.

Namun demikian, dibandingkan dengan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB DKI Jakarta (sekitar 16% secara agregat untuk subsektor terkait), alokasi anggaran Disparekraf masih relatif kecil dan belum proporsional. Hal ini menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam hal peningkatan efisiensi belanja program prioritas, penguatan sinergi lintas dinas, serta perluasan skema pembiayaan alternatif melalui kemitraan swasta, *sponsorship*, dan dana CSR.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta meliputi pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dan mitra dalam penyelenggaraan program kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Sasaran utama mencakup wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, pelaku industri pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat dan komunitas lokal.

Tabel 14 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Kelompok Sasaran Layanan	Deskripsi	Jenis Layanan
1	Wisatawan Nusantara	Wisatawan domestik yang berkunjung ke DKI Jakarta untuk keperluan rekreasi, budaya, kuliner, belanja, maupun bisnis/MICE antardaerah	Promosi destinasi lokal, penyediaan informasi wisata, penyelenggaraan paket atau promosi wisata, peningkatan akses dan fasilitas transportasi umum ke objek wisata, serta kemudahan layanan informasi publik
2	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan asing yang datang ke DKI Jakarta (untuk wisata, bisnis/MICE, konferensi maupun transit), memanfaatkan Jakarta sebagai pusat bisnis dan gerbang internasional	Promosi pariwisata internasional, penyediaan informasi multi-bahasa, fasilitas <i>one-stop service</i> MICE dan konferensi dukungan event internasional, serta kerja sama dengan mitra untuk paket wisata terpadu

No	Kelompok Sasaran Layanan	Deskripsi	Jenis Layanan
3	Pelaku Usaha Pariwisata	Pelaku usaha sektor pariwisata (hotel, restoran, biro perjalanan, penyelenggara acara/MICE, dsb.) yang mengelola destinasi dan layanan wisata	Pembinaan dan sertifikasi kompetensi pelaku pariwisata, fasilitas perizinan usaha, pendampingan produk wisata, dukungan teknologi informasi dan pemasaran digital, peningkatan infrastruktur (konektivitas destinasi), serta kolaborasi pengembangan paket wisata bersama mitra strategis, fasilitasi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri
4	Pelaku Industri Ekonomi Kreatif	Pelaku usaha ekonomi kreatif DKI Jakarta (subsektor seni, budaya, kuliner, mode, kriya, teknologi kreatif, dsb.) sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi baru	Pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas akses pembiayaan atau investasi kreatif, pendampingan inkubasi pelaku ekonomi kreatif, dukungan perlindungan kekayaan intelektual, serta promosi karya kreatif melalui pameran dan festival, baik lokal maupun internasional
5	Masyarakat dan Komunitas Lokal	Masyarakat DKI Jakarta (termasuk komunitas budaya dan komunitas pariwisata berbasis masyarakat) yang memelihara dan mengembangkan potensi budaya lokal dan Pokdarwis	Pemberdayaan komunitas (pelatihan desa/ekowisata, homestay, pendampingan UMKM lokal), pelestarian dan promosi budaya lokal, penyuluhan pariwisata berkelanjutan, serta kerja sama pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mewujudkan visi Jakarta sebagai destinasi pariwisata dunia dan pusat ekonomi kreatif, Disparekraf Provinsi DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendiri. Berdasarkan Tupoksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, Disparekraf memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sub-urusan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Layanan yang efektif erat dipengaruhi oleh pencapaian lima fungsi utama Disparekraf—mulai dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan pengembangan dan promosi, pembinaan pelaku usaha, pelayanan administrasi, hingga pengawasan dan evaluasi—memerlukan sinergi yang kuat dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Kolaborasi ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan representasi dari implementasi pendekatan holistik dalam mengelola ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai subsistem yang saling terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi kota melalui penguatan kualitas pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Oleh karena itu, terdapat enam mitra strategis OPD di DKI Jakarta yang selama beberapa tahun belakangan bersama Disparekraf mendorong pelayanan yang lebih efektif dan efisien, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta

Disparekraf DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan DLH dalam fungsi riset dan pengembangan destinasi berkelanjutan. Kemitraan ini terwujud pada berbagai aspek dalam program ataupun kegiatan:

- a) Program Wisata Ramah Lingkungan: DLH mendukung pelaksanaan fungsi pengembangan destinasi melalui pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata yang dikelola UPT Disparekraf seperti Kawasan Kota Tua dan Monas.

Implementasi teknologi *Street Sweeper Electric* yang ramah lingkungan menunjukkan komitmen DLH dalam mendukung kebersihan area wisata.

- b) *Sustainable Tourism Development*: Kolaborasi dalam fungsi perumusan kebijakan teknis sektor pariwisata, di mana DLH menyediakan data kualitas lingkungan yang menjadi basis penetapan *carrying capacity* destinasi wisata dan kebijakan pembatasan kunjungan pada area sensitif lingkungan.
- c) Implementasi Konkrit: Dalam penyelenggaraan Jakarta *Fair Kemayoran* 2022-2025, DLH berkoordinasi dengan Disparekraf dalam pengelolaan waste management di area pameran yang mencakup 6 lokasi vaksinasi pada saat pandemi Covid-19 dan berbagai *booth* OPD. Kolaborasi ini memastikan *event* berlangsung dengan standar kebersihan yang tinggi sesuai protokol kesehatan.

2. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik)

Disparekraf DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan Kominfotik dalam digitalisasi sektor pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a) *Digital Tourism Platform*: Kerjasama dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi pariwisata terpadu yang mencakup basis data destinasi wisata, aplikasi pelayanan wisatawan. *Platform Jakcation.id* merupakan manifestasi konkret dari kerjasama yang dikembangkan.
- b) Kolaborasi Konkrit dalam Jakarta *Smart City*: Dalam Jakarta *Smart City Forum* 2023 yang diselenggarakan Kominfotik dengan tema "Transformasi Jakarta Menjadi Kota Cerdas Berskala Global", Disparekraf turut berpartisipasi aktif dalam program literasi digital dan mendukung kemudahan akses informasi pariwisata. Kolaborasi ini menghasilkan *platform virtual tour* Pulau Bidadari melalui program *Digital Nomad Island* yang dipresentasikan dalam *booth* Jakarta *Smart City* di Jakarta *Fair Kemayoran*.
- c) Program Gerakan *Smart City*: Disparekraf terlibat dalam program Smart City 2022 yang dipromosikan Kominfotik, khususnya dalam kategori "Kawasan

"Pariwisata Prioritas Nasional" yang menunjukkan integrasi teknologi dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan Jakarta, mendukung pada Program Nasional: Greater Jakarta.

3. Dinas Perhubungan

Kolaborasi dengan Dinas Perhubungan sangat vital dalam mendukung aspek aksesibilitas pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a) **Integrasi Transportasi Publik:** Koordinasi dalam mengoptimalkan pengembangan rute dan akses transportasi publik menuju destinasi wisata, termasuk integrasi dengan TransJakarta dan MRT (Jakarta *Transit-hub*) yang memudahkan mobilitas wisatawan.
- b) **Manajemen Lalu Lintas Event:** Mendukung dalam penyelenggaraan festival dan *event* pariwisata melalui pengelolaan arus lalu lintas, pengaturan parkir, dan koordinasi keamanan transportasi. Selain itu, terdapat kerjasama dalam merumuskan strategi mobilitas wisata yang terintegrasi dengan *master plan* transportasi DKI Jakarta, termasuk pengembangan *tourism corridor* dan *heritage route*.
- c) **Track Record Jakarta Fair:** Dalam penyelenggaraan Jakarta *Fair* Kemayoran 2022-2025, Dinas Perhubungan berkoordinasi intensif dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola pengelolaan lalu lintas, sistem parkir, dan aksesibilitas transportasi publik. Koordinasi ini berhasil memfasilitasi kunjungan pengunjung selama 39 hari penyelenggaraan *event* dengan sistem operasional yang berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan.

4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Sinergi dengan Dinas Cipta Karya mengoperasionalkan fungsi pengembangan destinasi yang difokuskan pada perencanaan kawasan wisata. Kolaborasi dilakukan pada master plan pengembangan kawasan wisata yang mempertimbangkan aspek tata ruang, estetika kota, dan daya dukung infrastruktur. Hal ini sejalan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis sektor

pariwisata. Pelaksanaan dilakukan pada kegiatan revitalisasi area bersejarah. Kerjasama strategis dalam program revitalisasi kawasan heritage seperti yang dikelola UPK Kota Tua, mencakup aspek konservasi, infrastruktur pendukung, dan penataan ruang yang ramah wisatawan. Selain itu, bentuk kerjasama dalam pengembangan infrastruktur pendukung di kawasan Monas dan Kota Tua yang dikelola UPT Disparekraf, termasuk penataan ruang publik, peningkatan aksesibilitas, dan heritage conservation. Kolaborasi ini juga terwujud dalam perencanaan spasial untuk menampung berbagai event besar, seperti konser musik dan festival budaya di area Monas yang memerlukan koordinasi tata ruang yang kompleks.

5. Dinas Kebudayaan

Kemitraan dengan Dinas Kebudayaan dilakukan dalam mengoptimalkan fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dilakukan kerjasama dengan ragam kegiatan, misalnya Festival dan Event Budaya dalam penyelenggaraan festival budaya yang menjadi daya tarik wisata pariwisata sekaligus melestarikan budaya Betawi dan Nusantara. Selain itu kerja sama juga dibangun dalam pengembangan industri kreatif berbasis budaya untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal Jakarta, termasuk fasilitasi akses pasar untuk karya seni dan budaya. Pada kegiatan Jakarta Fair Kemayoran 2022-2025, Dinas Kebudayaan berkolaborasi dengan Disparekraf dalam menyajikan pertunjukan seni tradisional Betawi seperti barongsai, carnival parades, tarian kicir-kicir, dan pameran kerajinan tradisional. Kolaborasi ini juga menghadirkan cultural exhibitions yang memamerkan kostum tradisional dan pertunjukan daerah dari seluruh Indonesia, memperkuat peran Jakarta sebagai gateway budaya Nusantara.

Selain itu, Disparekraf bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dalam mempromosikan kebudayaan Jakarta—seperti tari, musik, dan kuliner—melalui pameran pariwisata di dalam dan luar negeri.

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUM) terlihat dalam peranan mendukung pendampingan dan pelatihan pada UMKM Jakpreneur Binaan Disparekraf. Bentuk peran pendamping kewirausahaan dilaksanakan pada 18 Maret 2022 oleh Pusdiklat PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Pendampingan tersebut mempelajari Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun bagi UKM, Pemahaman Bahan Makanan dalam Kemasan Tertutup, Regulasi SP-PIRT, Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Halal, Produk-produk Wajib Halal, Strategi Audit Pemeriksaan Halal bagi UKM, dan Regulasi Halal dan Mekanismenya dan sebagainya. Sebagai informasi berdasarkan hasil tarikan data Pendaftaran (P1) di Sistem Jakpreneur, jumlah binaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 (pertanggal 10 April 2025) jumlah Jakpreneur binaan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 8876, dengan 32 orang berdomisili diluar Jakarta, maka Jakpreneur total adalah sebesar 8844 orang.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Perkembangan dan dinamika governansi pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan entitas bisnis milik pemerintah merupakan faktor kunci yang tidak dapat diabaikan dalam mencapai keberhasilan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, dengan portofolio yang mencakup 23 perusahaan dan perusahaan patungan, telah memposisikan diri sebagai mitra strategis yang tidak tergantikan bagi Disparekraf DKI Jakarta dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai destinasi global yang berkelanjutan.

Kehadiran BUMD dalam ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta bukan sekadar pendamping, melainkan enabler yang memungkinkan terciptanya sinergi antara kapasitas pemerintah dan daya saing komersial. Dengan kepemilikan saham yang variatif—mulai dari 72% hingga 100% oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta—

para BUMD ini memiliki fleksibilitas operasional yang memadai, sekaligus akuntabilitas publik yang kuat untuk mendukung pencapaian target-target strategis Disparekraf.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, terdapat lima kelompok bidang usaha BUMD yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif: properti, hotel dan pariwisata, perdagangan dan industri, perbankan/keuangan, serta jasa dan utilitas. Dalam konteks dukungan terhadap Disparekraf, beberapa BUMD menempati posisi sentral sebagai katalisator pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dukungan sebagai mitra dari Disparekraf, kerjasama dengan BUMD terfokus pada beberapa sektor. Adapun dalam data beberapa BUMD yang telah bekerjasama dengan Disparekraf, sebagai berikut:

1. Bank DKI, sebagai BUMD dengan kepemilikan 99,98% oleh Pemprov DKI Jakarta, telah menciptakan terobosan revolusioner dalam industri pariwisata melalui Jakarta Tourist Pass—JakOne Pay. Inovasi ini merepresentasikan kolaborasi strategis antara sektor keuangan dan pariwisata yang menghasilkan solusi digital holistik bagi wisatawan. Jakarta Tourist Pass bukan hanya aplikasi pembayaran, melainkan ekosistem digital komprehensif yang mengintegrasikan fitur Maps untuk navigasi destinasi wisata, fitur Event untuk informasi real-time aktivitas pariwisata, dan sistem pembayaran terintegrasi yang mencakup transportasi publik, wisata perdagangan, dan layanan pariwisata lainnya. Dampak strategis dari inovasi ini terlihat pada akselerasi adopsi cashless payment di sektor pariwisata.
2. PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, dan LRT Jakarta telah menciptakan infrastruktur mobilitas yang menjadi backbone pariwisata urban Jakarta. JakCard Bank DKI yang dapat digunakan secara universal di seluruh moda transportasi publik ini telah mengubah paradigma aksesibilitas wisata dari car-dependent menjadi public transport-friendly. Kolaborasi ini termanifestasi melalui penempatan strategis halte dan stasiun yang berada dalam kedekatan geografis dengan destinasi wisata utama, guna meningkatkan aksesibilitas dan koneksi.

wilayah pariwisata. Misalnya, Halte Transjakarta Senayan Bank DKI yang menjadi model kemitraan naming rights antara BUMD finansial dan transportasi. Integrasi ini tidak hanya memudahkan wisatawan, tetapi juga mendukung sustainable tourism development melalui pengurangan carbon footprint.

3. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dengan kepemilikan Pemprov DKI Jakarta sebesar 72%, menjadi flagship tourism enterprise yang tidak hanya menyediakan destinasi rekreasi kelas dunia, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium inovasi pariwisata urban. Ancol tidak hanya beroperasi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai innovation hub untuk pengembangan produk dan layanan pariwisata yang dapat diadopsi di destinasi lain. Terlebih saat ini Ancol memiliki wahana Ecopark sebagai bagian dari ecotourism yang menggabungkan rekreasi, edukasi dan konservasi untuk pengunjung, dimana di dalamnya terdapat zona eco nature, eco art, eco energy, eco care, Fishing Zone dan Outbond & Adventure.
4. PT Jakarta Tourisindo (Jaktour), yang beroperasi 100% sebagai BUMD murni, memiliki spesialisasi dalam pengembangan produk wisata dan layanan operator tur yang menjadi tulang punggung promosi pariwisata Jakarta di pasar domestik dan internasional. Dalam program pemasaran internasional, Jakarta Tourisindo berkolaborasi dengan Disparekraf dalam trade show dan exhibition, termasuk partisipasi aktif dalam NATAS Travel Fair 2024 di Singapura. Selain itu, Jakarta Tourisindo juga bekerjasama dalam penyelenggaraan event-event Disparekraf dan pemanfaatan aset Jaktour untuk lokasi kegiatan.
5. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berperan dalam pengembangan infrastruktur dan pengembangan properti yang berkaitan dengan pariwisata dalam mendukung hospitality industry. Jakpro (100% kepemilikan Pemprov DKI) fokus pada pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. PT Jakpro memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata di DKI Jakarta, terutama melalui pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata, infrastruktur

pendukung, dan fasilitas publik yang berstandar internasional, seperti Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta International Velodrome & Equestrian Park untuk mendukung sport tourism, serta Revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

6. PT JIEXPO (Jakarta International Expo) menyediakan venue dan fasilitas untuk MICE tourism yang menjadi segmen premium dalam industri pariwisata di Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini menjadi enabler bagi Jakarta untuk bersaing dalam konferensi internasional dan pameran pasar.

2.1.7 Kerja Sama Daerah

Pencapaian kinerja optimal sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak lagi dapat dicapai melalui pendekatan silo organisasional. Disparekraf DKI Jakarta telah menunjukkan kematangan organisational dalam membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan *multiple stakeholders*—mulai dari Kementerian/Lembaga (K/L), sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga pemerintah daerah lainnya. Filosofi "kolaboratif" yang tercantum dalam nilai budaya kerja Pemprov DKI Jakarta, yakni bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan membentuk tim dan membangun kemitraan yang efektif, bukan hanya slogan administratif, melainkan manifestasi nyata dari pemahaman mendalam tentang *interconnectedness* sektor pariwisata dalam lanskap ekonomi modern. Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa tahun belakangan Disparekraf telah menjajaki dan melaksanakan kerja sama daerah dengan antar Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah; sektor swasta; asosiasi; dan organisasi masyarakat.

1. Kerja Sama dengan Kementerian Perdagangan

Salah satu bukti paling konkret dari kolaborasi K/L adalah Forum Bisnis Ekonomi Kreatif 2024 yang diselenggarakan Disparekraf bersama Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Komik Seluruh Indonesia (AKSI). Event yang berlangsung di Artotel Thamrin dan The Dharmawangsa Hotel ini bukan hanya ceremonial gathering, melainkan platform strategis yang memfasilitasi business matching antara enam perusahaan potensial asal Jepang dengan 15

perusahaan Intellectual Property (IP) dari Jakarta, termasuk Bumilangit Entertainment, Cocoon Studio, dan Getter Studio.

Rangkaian acara yang mencakup networking night, business tour, business matching, dan Jakarta Creative Conference menunjukkan depth dan sophistication dari kolaborasi ini. Panel diskusi yang menghadirkan Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kemenparekraf RI, akademisi terkemuka seperti Prof. Rhenald Kasali, dan praktisi internasional seperti Kim Young Soo dari KOCCA Indonesia, mencerminkan pendekatan multi-dimensional dalam transfer pengetahuan dan formulasi kebijakan.

2. Kerja Sama dengan Kementerian Pariwisata

Kerjasama dengan Kementerian Pariwisata merupakan salah satu hal strategis yang dilakukan oleh Disparekraf DKI Jakarta untuk mengembangkan dan mengoptimalkan capaian kinerja pada bidang pariwisata. Tercatat dalam data sejak lima tahun silam beberapa bentuk kerjasama telah dilakukan dan kedepannya inisiasi kerjasama telah disepakati.

Salah satu kerjasama strategis yang telah dilakukan yaitu berbentuk kolaboratif marketing (sharing paviliun) pada beragam pameran di dalam dan luar negeri seperti ITB Berlin, ATM Dubai, dan WTM London. Beragam pameran tersebut memiliki fokus kampanye pariwisata yang berbeda-beda. Pada kegiatan ITB Berlin fokus kerjasama yaitu optimalisasi promosi dan penjualan beragam destinasi dan atraksi pariwisata Indonesia dengan tema "*Keep the Wonders: Journey Across Destinations*". Strategi pada fokus kerjasama yang melibatkan 93 *co-exhibitor* pariwisata tersebut memiliki potensi transaksi sebanyak 330.000 pax dengan nilai 5.5 Triliun rupiah. Keberhasilan serupa juga diperoleh pada kegiatan kolaboratif marketing lainnya, misalnya ATM Dubai dengan 8 *co-exhibitor* menghasilkan potensi transaksi sebesar kurang lebih 7,3 miliar rupiah; dan WTM London dengan 5 *co-exhibitor* potensi transaksi pariwisata mencapai 15,4 miliar rupiah. Selain kegiatan-kegiatan kolaboratif tersebut

terdapat pula beragam kegiatan kerjasama yang memperoleh keberhasilan serupa yaitu pada NATAS, IMEX Frankfrut, dan IT&CM ASIA Bangkok.

Sementara itu Disparekraf DKI Jakarta secara aktif menginisiasi rancangan kerjasama untuk lima tahun kedepan dengan Kementerian Pariwisata. Hal ini menghasilkan MoU kerjasama dengan Kemenparekraf untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global tahun 2025-2029 (tercatat pada MoU Nomor 16 Tahun 2025; KB/10/HK.07.MP/2025 pada Tanggal 3 Juli 2025). Terdapat delapan ruang lingkup kerjasama yang berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata, yaitu: 1) pengembangan destinasi pariwisata; 2) penyelenggaraan kegiatan event dan MICE; 3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; 4) pencapaian predikat yang diakui pariwisata internasional untuk kota Jakarta; 5) pengembangan pemasaran pariwisata; 6) peningkatan kerja sama industri dan investasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan 7) pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan kerjasama tersebut didorong oleh keberhasilan kegiatan diawal tahun 2025 yaitu Gerakan Wisata Bersih di Kota Tua, yang merupakan aksi kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Artha Graha Peduli. Fokus pada aksi tersebut adalah mendorong upaya jangka panjang untuk menjaga destinasi pariwisata yang bersih dan sehat, sehingga pariwisata di daerah DKI Jakarta secara berkelanjutan dapat berpengaruh pada lingkungan, sosial, dan ekonomi.

3. Kerja Sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif

Momentum paling signifikan dalam kolaborasi K/L adalah penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Ekonomi Kreatif pada Maret 2025 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Upaya Mendukung Jakarta Sebagai Kota Global. Gubernur Pramono Anung mengkategorikan kerja sama ini sebagai bagian integral dari executive action

program 100 hari, dengan fokus pada penguatan peran Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sesuai amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Signifikansi kerjasama ini terletak pada recognition mutual tentang kontribusi ekonomi kreatif yang mencapai hampir 11% terhadap total PDRB DKI Jakarta pada 2024.

4. Kerja Sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dukungan Kemendikbudristek dalam Jakarta Film Week 2024 menunjukkan dimensi lain dari kerjasama K/L yang fokus pada diplomasi budaya dan pengembangan industri kreatif. Disparekraf tidak hanya menyediakan dukungan pendanaan, tetapi juga memfasilitasi ekosistem perfilman yang komprehensif, mulai dari kemudahan perizinan produksi film hingga pembentukan komunitas kreatif yang berkelanjutan.

5. Kerja Sama dengan Kementerian Sekretariat Negara

Kerja sama yang dilakukan dalam rangka pengembangan destinasi wisata. Dilaksanakan melalui pinjam pakai tanah milik Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung Monumen Nasional (Monas) dan Anjungan DKI Jakarta di TMII. Hingga saat ini, pemanfaatan tanah tersebut dikelola Daerah DKI Jakarta. Kebermanfaatan dalam pengelolaan ini untuk memenuhi kegiatan yang mendukung promosi iconic landmark dari DKI Jakarta dan menjadi salah satu sentra kegiatan produk unggulan ekonomi kreatif dan pariwisata DKI Jakarta.

6. Kerja Sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kesepakatan kerja sama yang dilakukan dalam rangka memenuhi perlindungan dan peningkatan kreativitas produk kreatif UKM Binaan; pelaku usaha dan komunitas bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; potensi sumber daya alam dan manusia; dan perlindungan atas hukum dan kekayaan intelektual. Lingkup kerja sama yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi,

pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), pencegahan, pelanggaran dan pemantauan KI. Pada Tahun 2024, Disparekraf mendapatkan penghargaan apresiasi dari Kemenkumham sebagai Fasilitas Permohonan Kekayaan Intelektual Terbanyak, dan Pada Tahun 2025 mendapatkan apresiasi untuk Pendampingan dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Provinsi DKI Jakarta.

7. Kerja Sama dengan Kamar Dagang dan Industri

Lingkup kerja sama yang dilaksanakan berupa pembinaan dan pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif; mendukung penciptaan destinasi wisata baru; pengembangan dan pemasaran pariwisata; sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; kegiatan promosi dan pengembangan infrastruktur untuk *tourist center*.

8. Kerja Sama Organisasi Internasional

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta telah bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional di bidang Pariwisata seperti ICCA (*International Congress and Confention Association*), IAGTO (*International Association of Golf Tour Operators*), WTCF (*World Tourism Cities Federation*), dan TPO (*Tourism Promotion Organization*). Kerja sama tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi perkembangan pariwisata DKI Jakarta, antara lain peningkatan jaringan dan kolaborasi dengan sesama pelaku industri, kesempatan promosi dan pemasaran pariwisata yang lebih luas di tingkat global, akses ke informasi dan tren industri terbaru, serta peluang untuk meningkatkan standar profesionalisme juga keahlian melalui berbagai kegiatan dan pelatihan.

9. Kerja Sama dengan Sektor Swasta

a) *Hospitality Industry Partnership*: Sektor swasta, khususnya industri *hospitality*, menjadi mitra natural Disparekraf dalam pengembangan destinasi. Forum Bisnis Pariwisata Dalam Negeri yang diselenggarakan di

Semarang, Pekanbaru, Manado, Balikpapan dengan melibatkan partisipasi aktif dari asosiasi pariwisata seperti ASITA, PHRI, IINTOA, JHA serta exhibitor maskapai penerbangan, hotel, pengelola destinasi wisata, pusat belanja, biro perjalanan, dan UKM. Pendekatan inovatif dalam forum ini adalah sesi corporate gathering dan destination presentation yang dirancang khusus untuk memberikan kesempatan bagi peserta pameran Jakarta menginformasikan kemajuan dan keunikan kota Jakarta kepada pembeli korporasi potensial, sekolah, dinas, BUMD, serta masyarakat di luar Jakarta. Model ini mencerminkan evolusi dari promosi pariwisata tradisional menuju *targeted business-to-business marketing*.

- b) *Technology and Innovation Partners*: Penerapan dari Jakarta *Tourist Pass* dan *digital tourism initiatives* menunjukkan kerja sama yang luas dengan perusahaan teknologi dan *fintech*. Partnership dengan hospitality chains, seperti Artotel dan The Dharmawangsa Hotel, dalam *high-profile events* mendemonstrasikan penyelarasan strategis antara tujuan kebijakan publik dan kemampuan sektor swasta. Selain itu, bentuk kerja sama lain berupa pengembangan aplikasi Goers pada lokasi wisata Monas dan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pemanfaatan Aplikasi Goers dalam rangka solusi digital manajemen kunjungan dan promosi destinasi pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, dilakukan dengan PT Sanraya Adi Nattaya. Selain itu, terdapat juga kerja sama dalam pemanfaatan Layanan Aplikasi Gojek dalam rangka pengembangan kewirausahaan terpadu bagi pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan PT. Aplikasi Anak Bangsa.
- c) *Promotion Video*: Kerja sama melingkup pada kegiatan pembuatan video promosi destinasi wisata dalam konsep wisata urban, wisata pulau dan MICE DKI Jakarta. Video promosi ini memberdayakan binaan Disparekraf seperti Abang None, produk Jakpreneur dan lain-lain yang bekerja sama dengan PT. Harmoni Intermedia.

d) Penyelenggaraan Kegiatan: Bekerjasama dengan PT MNC Televisi Network, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Karnaval Jakarta Langit Biru. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut kampanye penggunaan kendaraan berbasis energi ramah lingkungan untuk upaya mengurangi polusi udara DKI Jakarta. Selain itu, terdapat juga penyelenggaraan kegiatan Jakarta Festival Muharram yang bertujuan menyambut tahun baru Islam, penyelenggaraan Malam Final Abang None Jakarta Tahun 2023 bekerjasama dengan PT Trans Digital Media, serta dengan PT. Global Informasi Bermutu pada penyelenggaraan Malam Final Abang None Jakarta Tahun 2023.

10. Kerja Sama dengan Lembaga Akademik

- a) *Academic Institutions Partnership*: Kolaborasi dengan Institut Pariwisata Trisakti menunjukkan komitmen Disparekraf terhadap *knowledge-based tourism development*. Kerja sama dalam strategi pengembangan wisata halal dan layanan syariah dengan *Jakarta Islamic Centre* mencerminkan pendekatan inklusif dalam diversifikasi produk wisata. *Engagement* dengan universitas tidak terbatas pada kolaborasi riset, tetapi juga memperluas pada peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia. Rangkaian seminar proposal penelitian internal dan program kuliah tamu menunjukkan pendekatan sistematik dalam bridging *academia-practitioner gap*.
- b) *Entrepreneurship Development*: Kerja sama yang melingkup pada pengembangan potensi terampilan dan kemandirian kolaboratif; dilengkapi dengan kegiatan pelatihan dengan tema pemasaran, kemasan, *branding*, *digital marketing*, dan pelaporan keuangan. Kerja sama ini dilaksanakan dengan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia), STIKOM (Sekolah Tinggi Ilmu Komputer), dan UNJ (Universitas Negeri Jakarta).

11. Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat

- a) *Creative Community Networks*: Forum Bisnis Ekonomi Kreatif 2024 berhasil mempertemukan 15 perusahaan IP lokal dengan mitra internasional, menunjukkan *robust ecosystem creative community* yang telah terbentuk. Perusahaan seperti Bengkel Animasi, Pionicon, Tampar *Production*, dan *Game Changer Studio*, mewakili berbagai sektor kreatif yang menunjukkan luasnya ekosistem ekonomi kreatif DKI Jakarta.
- b) Kerjasama dengan organisasi masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam data sejak tahun 2021 hingga 2025, setidaknya terdapat lima kegiatan yang terjadwal setiap tahun dilakukan yaitu 1) tahun 2021 – 2022 Jakarta Film Week dengan Yayasan Super 8MM dan 2023 – 2025 Jakarta Film Week dengan Yayasan Ruang Sinema Jakarta; 2) JIPFest dengan Yayasan Panna diselenggarakan dari tahun 2021 – 2024; 3) Kegiatan ICAD dengan Yayasan Design and Art Indonesia di tahun 2021 – 2024; 4) Forum Bisnis Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 – 2025 dan 5) Bimbingan Teknis Pengembangan Pariwisata Halal dilaksanakan oleh PPPI (Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia pada tahun 2023 dan 2024, sedangkan pada tahun 2025 oleh *Alliance of the Indonesia Tour Travel Agency* (AITTA). Selain kelima kegiatan tersebut, dalam data terdapat kegiatan Jakarta *International Coffee Conference* dengan Indonesia *Gastronomy Network* pada tahun 2023, Indonesia *Dance Festival* tahun 2024 dengan Yayasan Loka Tari Nusantara. Pada tahun 2025 terdapat Jakarta *Watersport Festival* dengan Persatuan Olahraga Dayung Indonesia (PODSI) DKI Jakarta sebagai pelaksana, Jakarta *Tourism Award* dilaksanakan oleh Indonesia *Travel & Tourism Award Foundation* (ITTA Foundation), Forum Bisnis Tenaga Kerja Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh Universitas Trisakti.

12. Kerja Sama dengan antar Pemerintah Daerah

- a) *Regional Tourism Cooperation*: DKI Jakarta berkolaborasi dengan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur dalam *air quality management*, menunjukkan *framework* yang dapat diadaptasi untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.
- b) *MICE Tourism Development Strategy*: Disparekraf telah mengidentifikasi kolaborasi dengan pemerintah daerah lain sebagai imperatif strategis dalam pembangunan pariwisata MICE. Dengan memanfaatkan posisi geografis Jakarta yang strategis di kawasan Asia Tenggara serta infrastruktur bisnis yang luas, kolaborasi dengan pemerintah daerah di tingkat regional berpotensi memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi utama MICE. Sinergi dengan asosiasi MICE di tingkat nasional dan regional, yang dipadukan dengan kerja sama bersama institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan kapasitas.
- c) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Kegiatan kerja sama dengan Disparekraf mencakup pada penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif; perjalanan wisata pengenalan; promosi pariwisata secara langsung; pengembangan penjenamaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bentuk kerja sama ini dilakukan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sumatra Barat dan Ambon.
- d) Kerjasama Daerah dilakukan melalui forum komunikasi antar daerah yang beragontakan 10 provinsi (salah satunya adalah DKI Jakarta). Pada tahun 2023 telah dilakuakn rapat gabungan dengan tujuan mengoptimalkan fungsi komunikasi forum Mitra Praja Utama (MPU) dalam kerjasama pada bidang pariwisata, perdagangan dan investasi. Target forum MPU ini menjadi stimulus antar daerah untuk mewujudkan program-program daerah yang mendukung pembagunan perekonomian nasional berkelanjutan. Salah satu output dalam kegiatan forum tersebut terkait

dengan bidang parekraf adalah Perjanjian Kerjasama Travel Fair Koridor (Ditandatangani oleh Kepala Dinas Parekraf dari 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, dan Lampung.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan RPJMN 2025–2029, Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada Jumlah Wisatawan (terutama wisatawan mancanegara). Jumlah pengunjung internasional yang masih rendah dan lama kunjungan wisata yang singkat; lama kunjungan wisatawan internasional mengalami tren penurunan sejak tahun 2020. DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan wisata, menambah ragam atraksi, serta memperkuat *branding* Jakarta sebagai destinasi wisata. Walaupun, masalah tersebut mengarah pada sektor pariwisata, tetapi hal ini erat kaitannya berdampak pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang tentunya belum optimal.

Akan tetapi, dalam telaah literatur dan data yang diperoleh, setidaknya terdapat empat permasalahan pokok dan mengakar pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas dan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum Sepenuhnya Memadai

Isu kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta sangat relevan dengan data empiris. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam laporan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022), sekitar 58% pekerja sektor pariwisata nasional, termasuk Jakarta, berpendidikan SMA ke bawah, sementara tuntutan pasar global kini mengarah ke skill profesional, hospitality, hingga digital literacy. Selain itu, Pelaku

pariwisata dan ekonomi kreatif secara nasional, bahkan termasuk DKI Jakarta, banyak yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, khususnya di subsektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) dan pemandu wisata. Oleh karenanya, jumlah tenaga kerja yang kompetensinya bersertifikasi masih terbatas. Padahal sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap PDRB DKI Jakarta.

Jakarta sebagai hub industri kreatif juga diwarnai oleh banyak pekerja kreatif yang berstatus informal dan minim perlindungan sosial, menimbulkan kerentanan ekonomi. Selain itu, literasi keuangan yang masih rendah menghambat akses pelaku terhadap pembiayaan usaha. Padahal kontribusi sektor ini besar: [BPS DKI Jakarta \(2019\)](#) mencatat konsentrasi pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif berkontribusi signifikan terhadap distribusi PDRB Ekonomi Kreatif sebesar 42,54%. Industri kuliner—sebagai usaha padat karya—masih menghadapi tantangan upah rata-rata yang rendah dan kesenjangan pembiayaan ([Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024](#)).

Indonesia termasuk Jakarta, perlu shifting paradigma dari quantity ke quality workforce. Kompetensi SDM yang rendah tidak hanya berdampak pada pelayanan wisatawan, tetapi juga pada inovasi produk, digital marketing, dan pengelolaan destinasi. Hal ini mengindikasikan perlunya memperhatikan kompetensi dan struktur pendidikan SDM pariwisata yang seharusnya menjadi investasi yang akan mengatasi perubahan tren kebutuhan wisatawan. Dengan demikian, peningkatan SDM Jakarta tidak cukup hanya dengan pelatihan teknis, namun diperlukan kurikulum link-and-match dengan industri, sertifikasi internasional, serta pengembangan soft skill (bahasa asing, digital skills). Hal tersebut dilakukan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta dapat bersaing di pasar global.

2. Pengembangan Destinasi Belum Terintegrasi

Pengembangan destinasi di DKI Jakarta hingga kini masih berjalan sektoral.

ITDP (2022) dalam laporan revitalisasi Kota Tua menyebutkan bahwa belum terdapat aksesibilitas terpadu yang optimal untuk mengintegrasikan destinasi sejarah dan budaya dengan beragam destinasi urban lainnya yang ada di DKI Jakarta. Hal ini diperkuat fragmentasi perencanaan antardinas dan tumpang tindih peraturan menyebabkan inkonsistensi konsep pengembangan kawasan wisata.

Laporan UN-Habitat (2024) menyoroti pentingnya pendekatan sustainability dalam pengembangan “Urban Tourism Experience” dengan peta pembangunan daerah dan infrastruktur. Hal ini tentu akan memperkuat kualitas dari hubungan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A). Namun di DKI Jakarta, jalur konektivitas antardestinasi belum optimal. Misalnya, Kepulauan Seribu, masih kesulitan dalam integrasi transportasi dan promosi bersama dengan destinasi kota seperti Monas, Kota Tua, atau kawasan kuliner modern.

Berbagai penilaian lapangan dan diskusi pemangku kepentingan menunjukkan kolaborasi antara Pemprov, komunitas kreatif, dan pelaku industri belum kuat, sehingga potensi urban tourism berbasis budaya Betawi, street art, hingga creative hubs belum terorchestrasi dengan baik. Di saat yang sama, wisatawan urban menginginkan pengalaman lintas tema yang mudah diakses melalui pemetaan area wisata—misalnya city tour yang menggabungkan heritage, kuliner, hingga shopping. Tanpa integrasi narasi destinasi, wisatawan cenderung datang ke titik-titik tertentu tanpa menangkap Jakarta sebagai satu kesatuan cerita wisata.

Hal ini selaras dengan yang direkomendasikan oleh UNWTO (2022) bahwa destinasi urban modern menuntut thematic route, digital signage terpadu, hingga penataan zona wisata. Data BPS (2022) menunjukkan lebih dari 80% kunjungan wisatawan nusantara ke Jakarta masih terpusat di destinasi klasik

(Monas, Ancol, Ragunan), di mana hal ini menunjukkan ketimpangan persebaran. Jika DKI Jakarta ingin bersaing sebagai urban tourism hub, perlu adanya grand design destinasi lintas wilayah yang terintegrasi digital dan budaya.

3. Kesenjangan Transformasi Digital dan Kesiapan Smart Tourism

Transformasi digital sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta masih menghadapi hambatan signifikan. Bappeda Jakarta (2024) dalam buku Jakarta Menuju Kota Global ke-20 mencatat kapasitas kecepatan internet DKI Jakarta masih tertinggal dibanding sejumlah kota Asia, padahal percepatan transformasi digital menuntut infrastruktur konektivitas yang memadai. Di lapangan, banyak pelaku usaha kreatif masih mengandalkan word-of-mouth atau pemasaran tradisional—padahal potensi electronic word-of-mouth, social commerce, dan kanal digital lainnya dapat memperluas jangkauan pasar. Kesiapan menuju smart tourism juga memerlukan penguatan pada aspek digitalisasi dan keberlanjutan, termasuk pengembangan platform terpadu untuk reservasi, e-ticketing, serta integrasi big data destinasi yang menghubungkan pelaku industri, pemerintah, dan wisatawan.

Penguatan digital tidak berhenti pada adopsi teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan kapabilitas pelaku untuk memanfaatkan ekosistem digital (mis. e-wallet, Augmented Reality/ Virtual Reality - AR/VR - tourism, data analytics, Customer Relationship Managemen/Customer Data Platform) agar proses promosi, penjualan, dan pengelolaan pengalaman wisata menjadi lebih presisi. Akselerasi transformasi digital pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi prasyarat agar Jakarta mampu bersaing di kancah global, terutama dalam segmen urban tourism yang sangat bergantung pada teknologi dan layanan berbasis data dari hulu ke hilir.

4. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal

Koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Rekaman pemberitaan, diskusi pemangku kepentingan, dan evaluasi internal menunjukkan ego sektoral kerap menghambat pengembangan ekosistem ekraf maupun destinasi pariwisata, yang berujung pada tumpang tindih kebijakan dan fragmentasi tugas-fungsi birokrasi. Tantangan lain muncul pada kolaborasi pemerintah-industri-komunitas-lembaga non-pemerintah untuk menangani isu keberlanjutan lingkungan di sekitar destinasi.

Pada sektor ekonomi kreatif, penguatan inovasi kolaboratif diperlukan agar rantai nilai dari hulu (talenta, inkubasi, pembiayaan) hingga hilir (produksi, distribusi, komersialisasi) berjalan terpadu. Untuk itu, tata kelola kolaboratif harus dipertegas melalui mekanisme lintas-OPD dan lintas-wilayah (komite bersama, target kinerja bersama, perencanaan-penganggaran terintegrasi, data-sharing agreement, promosi terpadu), serta layanan perizinan satu-pintu yang responsif. Dengan demikian, upaya DKI Jakarta menjadi destinasi global dan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang tangguh dapat berjalan konsisten dan berdaya saing.

Selain berbagai permasalahan yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian dalam setiap aspek yang ada. Pada aspek politik: 1) Koordinasi lintas sektor yang belum optimal; dan 2) Transisi kepemimpinan berisiko memperlambat pelaksanaan program. Pada aspek ekonomi: 1) Ketergantungan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif pada sektor informal; dan 2) Ketimpangan investasi antara pusat kota dan wilayah pinggiran/kepulauan. Pada aspek sosial: 1) Tuntutan wisatawan akan layanan dan pengalaman yang semakin berkualitas; dan 2) Risiko konflik antara pengembangan destinasi dan komunitas lokal. Pada aspek Teknologi: 1) Kesenjangan adopsi teknologi antara pelaku besar dan UMKM; dan 2) Minimnya literasi digital dan literasi keuangan pelaku tradisional.

Pada aspek legal: 1) Regulasi belum adaptif terhadap dinamika industri ekonomi kreatif digital; dan 2) Tumpang tindih perizinan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan event dan usaha wisata. Pada aspek lingkungan: 1) Polusi udara dan kemacetan lalu lintas dapat mengurangi kenyamanan dan daya tarik wisatawan; dan 2) Kawasan heritage dan pesisir rentang terhadap tekanan pembangunan.

2.2.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Renstra Disparekraf DKI Jakarta 2025–2029 memiliki keterkaitan dengan perencanaan strategis dari dua Kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf). Hal ini dikarenakan pada tingkat pusat, urusan sektor parekraf dipisahkan pada dua Kementerian tersebut. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dibahas keterkaitan perencanaan strategis untuk pencapaian target kinerja, yang diklasifikasikan menjadi dua sektor, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian, baik di Kemenpar ataupun Kemenkraf sama-sama memiliki kesamaan yaitu sebagai sektor yang strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8% (RPJMN 2025–2029).

Kesesuaian pada sektor pariwisata, Kemenpar memiliki amanat kebijakan transformatif yang diarahkan pada 'Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Berkualitas'. Terkait dengan kebijakan tersebut, secara tidak langsung Disparekraf DKI Jakarta akan berkontribusi pada capaian kinerja Kemenpar pada target: 1) Nilai investasi pariwisata 49,1 Triliun; dan 2) Kontribusi PDB 361,8 Triliun. Hal ini dilatarbelakangi oleh kolaborasi Disparekraf DKI Jakarta dengan Kemenpar dalam mengelola salah satu Destinasi Program Prioritas (DPP), yaitu Penguatan Destinasi Regeneratif "Greater Jakarta".

Jika menelisik pada amanat nasional yang diberikan melalui Kemenpar, Asta Cita yang terkait dengan program kerja Pariwisata adalah Asta Cita ke 3, 4, dan 8. Hal ini telah harmonis dengan yang diamanahkan dalam RPJMD DKI Jakarta periode 2025–2029 untuk sektor Parekraf yang memiliki peran utama untuk Misi ke-2.

Implikasi yang diperoleh pada target capaian kebijakan transformatif dan asta cita tersebut, memberikan peran Disparekraf DKI Jakarta untuk berkontribusi mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota Global berkelanjutan. Oleh karenanya, dalam capaian kinerja Disparekraf DKI Jakarta, perlu menyusun berbagai program yang mendorong dua aspek kriteria pada Kota Global, yaitu: 1) Average Spending Per Arrival (ASPA)= USD 1600 (seperti Bangkok & Tokyo); dan 2) Memiliki world class attraction dan tourism amenities. Selain itu, pengembangan kepariwisataan di Greater Jakarta perlu didorong untuk mendukung fungsi kota global dan mengedepankan konsep MICE tourism, urban tourism, high-end tourism, serta wisata budaya dan wisata bahari yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara definitif, pengembangan pariwisata "Greater Jakarta", diarahkan untuk:

1. Melaksanakan kegiatan berkelas dunia (budaya, olahraga, MICE) didukung oleh keberadaan venue pameran dan event serta olahraga bertaraf Internasional, seperti Jakarta International Stadium (JIS) dan Gelora Bung Karno (GBK);
2. Pengembangan wisata mangrove sebagai ekosistem pesisir sekaligus sebagai upaya konservasi lingkungan;
3. Mengembangkan dan mempromosikan pariwisata warisan budaya dengan menampilkan situs bersejarah, festival, dan tradisi kota;
4. Potensi menjadikan Cagar Budaya, seperti Kawasan Kota Tua, Kawasan Blok M, dan Medan Merdeka; dan
5. Potensi medical tourism, kota pendidikan, serta pusat perbelanjaan.

Selain itu, bentuk kolaborasi antara Kemenpar dengan Disparekraf DKI Jakarta dalam target "Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta" dapat dilakukan melalui kegiatan dan aspek, sebagai berikut:

1. Kegiatan Transformasi Jakarta Sebagai Kota Global, dengan aspek:
 - a) Meningkatkan ekosistem Jakarta sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan internasional; dan
 - b) Pusat inovasi dalam teknologi, seni dan budaya.

2. Kegiatan Pengurangan Emisi dan Pengelolaan Lingkungan (low-carbon city), dengan aspek: penggunaan energi terbarukan di destinasi wisata.
3. Penguatan Destinasi Wisata Urban dan MICE, dengan aspek:
 - a) Pembentukan kelembagaan Biro Pameran dan Eksibisi;
 - b) Pengembangan skema pendanaan event internasional (IQTF);
 - c) Menyusun kalender event dan festival tahunan internasional; dan
 - d) Kolaborasi antara sektor kreatif dengan pariwisata untuk menciptakan daya tarik pariwisata berbasis seni dan budaya.
4. Pengarusutamaan Pariwisata Berkelanjutan, dengan aspek:
 - a) Mendorong Pariwisata berkelanjutan;
 - b) BGCE di sektor pariwisata; dan
 - c) Mengembangkan konsep wisata ramah lingkungan (eco-tourism) dan pariwisata regeneratif.
5. Pengembangan SDM Pariwisata berstandar internasional, dengan aspek:
 - a) Standar dan Sertifikasi;
 - b) Memperbanyak jurusan/program studi pariwisata;
 - c) Link and match pendidikan tinggi vokasi pariwisata; dan
 - d) Penerapan dual system seluruh SMK dengan dunia usaha.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam Renstra Disparekraf DKI Jakarta 2025–2029 adalah amanat turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dalam sektor pariwisata. Adapun IKU yang menjadi perhatian penting untuk diturunkan pada ukuran kinerja Disparekraf DKI Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 15 IKU dan Target Disparekraf DKI Jakarta (Sektor Pariwisata) Berdasarkan Turunan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Nasional Tahun 2025-2029	RPJM Daerah Provinsi Tahun 2025-2029	Target IUP DKI Jakarta	
		2025	2029
Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama		
a) Rasio PDB Pariwisata (%)	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,89	5,29

RPJMN Nasional Tahun 2025-2029	RPJM Daerah Provinsi Tahun 2025-2029	Target IUP DKI Jakarta	
Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama	2025	2029
b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	1.800,00	2.105,75
c) Tenaga Kerja Pariwisata (Juta orang)	c) Tenaga Kerja Pariwisata (Ribu Orang)	1.538	1.619
d) Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta Perjalanan)	d) Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta Perjalanan)	90,72	106,13

Sumber: KementerianPPN/Bappenas (2025)

Kesesuaian pada sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf), difokuskan pada Disparekraf dapat mewujudkan Jakarta sebagai "new engine economy growth" dan membangun ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini merupakan kesesuaian yang diturunkan kepada Kemenkraf melalui Asta Cita ke-3 yaitu "Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi".

Turunan dari Asta Cita ini, membentuk Program Prioritas Nasional untuk sektor Ekonomi Kreatif, yaitu "Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual". Operasionalisasi ekosistem ekonomi kreatif diartikulasikan melalui bukti kesiapan Jakarta pada:

1. Adanya struktur kelembagaan ekonomi kreatif di daerah (kolaborasi pentaheliks);
2. Tersusunnya Rencana Aksi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
3. Adanya infrastruktur pendukung aktivitas kreatif (misalnya: creative hub). Titik tumpu konsep pengembangan ekosistem Ekraf berbasis kekayaan intelektual, yaitu pada keterlibatan aktif stakeholders, penguatan data, dan ruang aktivitas kreatif.

Selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan dalam Renstra Disparekraf DKI Jakarta 2025–2029 adalah amanat turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dalam sektor Ekraf. Adapun IKU yang menjadi perhatian penting untuk diturunkan pada ukuran kinerja Disparekraf, sebagai berikut:

Tabel 16 IKU dan Target Disparekraf DKI Jakarta (Sektor Ekonomi Kreatif) Berdasarkan Turunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran Outcome	Nasional (RPJMN)				Provinsi DKI Jakarta (RPJMD)*		
	Level	Indikator	Target 2026	Target 2029	Indikator Outcome	Target 2026	Target 2029
Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PN	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,4 - 8,0	8,0 - 8,4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	17,75	17,58
	PP	Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,7	6,1	Tidak diturunkan	-	-
	PP	Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif (%)	5,3	6,0	Tidak diturunkan	-	-
	PP	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (juta orang)	26,06	27,66	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (ribu orang)	1.191	1.202
	PP	Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif (%)	5,8 - 7,5	7,0 - 8,0	Tidak diturunkan	-	-

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025)

2.2.3 Telaahan RTRW dan KLH Provinsi DKI Jakarta

RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044 menetapkan arah kebijakan yang kuat untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari salah satu visi pembangunan DKI Jakarta. Kebijakan ini menitikberatkan pada pengembangan pariwisata maritim yang berkelanjutan berskala global di kawasan pesisir, perairan, dan Kepulauan Seribu. Hal ini berarti DKI Jakarta berupaya menjadikan Kepulauan Seribu dan wilayah pesisir utara sebagai destinasi wisata bahari bertaraf internasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut.

Dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044, pelestarian budaya dan pengembangan pusat-pusat kebudayaan juga diposisikan sebagai bagian integral dari perencanaan tata ruang kota. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga identitas historis dan kekayaan nilai-nilai lokal, tetapi juga sebagai strategi pengembangan kota yang berorientasi pada keberlanjutan sosial ekonomi. Secara eksplisit, RTRW 2024-2044 mengamanatkan pelestarian cagar budaya serta peningkatan fungsi kawasan budaya dan seni perkotaan untuk memperkuat peran DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan. Dengan kata lain, kebijakan tata ruang mencakup perlindungan situs sejarah dan pengembangan ruang-ruang kreatif (seperti pusat kesenian dan pameran) yang akan menjadi daya tarik wisata sekaligus wadah ekonomi kreatif.

Secara kuantitatif, RTRW 2024-2044 mengalokasikan ±21.245 hektare untuk kawasan pariwisata. Alokasi ruang ini terbagi ke dalam 2 (dua) wilayah utama sesuai karakter geografinya, yaitu: 1) Kawasan wisata pada wilayah daratan, yang mencakup area di daratan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta satu kawasan di daratan Jakarta Utara (Kecamatan Pademangan); 2) Kawasan wisata pada wilayah perairan, yang meliputi perairan laut di sekitar pulau-pulau wisata di Kepulauan Seribu dan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, sebagai kawasan pariwisata berbasis bahari.

Dalam pengaturan pola ruang RTRW 2024-2044, kawasan pariwisata termasuk ke dalam kategori kawasan budidaya. Artinya, ruang yang dapat dimanfaatkan untuk

kegiatan ekonomi produktif (non-lindung) dengan syarat tertentu. Namun, pemanfaatannya tetap harus memperhatikan ketentuan lingkungan dan teknis zonasi. RTRW 2024-2044 memberikan ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata yang mencakup perizinan fungsi wisata, intensitas bangunan, prasarana pendukung, dan integrasi dengan zona lain. Misalnya, di kawasan wisata tetap perlu disediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, fasilitas utilitas, dan akses transportasi yang memadai.

Lebih lanjut, RTRW 2024-2044 mengidentifikasi sejumlah kawasan wisata utama beserta arahan pengembangannya. Kawasan-kawasan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan karakter dan tema pengembangan, sebagaimana berikut:

Tabel 17 Arah Lokasi Kawasan Wisata Berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044

No	Nawa Kawasan	Kategori Pengembangan	Fungsi Strategis	Arah Pengembangan Tata Ruang
1	Kawasan Wisata Bahari Kepulauan Seribu	Bahari & Konservasi Alam	Kawasan strategis nasional & konservasi bahari	Ekowisata laut, konservasi terumbu karang, pembatasan daya dukung pengunjung, revitalisasi transportasi laut
2	Kawasan Wisata Pesisir dan Kota Tua	Sejarah, Bahari, Urban Heritage	Kawasan strategis sosial budaya & pesisir	Revitalisasi Kota Tua, penguatan kawasan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai

No	Nawa Kawasan	Kategori Pengembangan	Fungsi Strategis	Arahan Pengembangan Tata Ruang
				destinasi budaya bahari
3	Kawasan Pusat Budaya Cikini dan Menteng	Budaya, Edukasi, Sejarah Urban	Zona budaya & hunian bersejarah	Pusat kesenian, galeri, event budaya, pengembangan kawasan edukatif berbasis sejarah kolonial dan seni modern
4	Kawasan Wisata Kreatif dan Urban: Tebet	Kreatif Urban & Komunitas	Zona permukiman campuran & ruang publik kreatif	Pemanfaatan ruang terbuka (Tebet Eco Park), penguatan UMKM kreatif, ruang kolaborasi seni dan budaya lokal
5	Kawasan Pecinan Glodok	Budaya & Wisata Kuliner	Kawasan strategis budaya & perdagangan tradisional	Revitalisasi kawasan Pecinan, pelestarian arsitektur tradisional, festival budaya, integrasi kuliner & religi

No	Nawa Kawasan	Kategori Pengembangan	Fungsi Strategis	Arahan Pengembangan Tata Ruang
6	Kawasan Baru Pasar dan Sekitarnya	Budaya & Sejarah Kolonial	Kawasan strategis sosial budaya & niaga	Penataan pedestrian, pelestarian bangunan lama, penguatan kegiatan ekonomi kreatif berbasis komunitas
7	Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)	Edukasi Budaya Nasional & Rekreasi	Kawasan pelestarian budaya nasional & edukasi pariwisata	Reorientasi sebagai taman budaya dinamis, pusat promosi kebhinekaan, penguatan infrastruktur ekowisata
8	Kawasan Bandar Kemayoran (JIExpo)	MICE	Kawasan strategis ekonomi & kawasan perdagangan dan jasa khusus	Penguatan peran JIExpo sebagai pusat konvensi, pembangunan infrastruktur transportasi massal dan hotel kawasan

No	Nawa Kawasan	Kategori Pengembangan	Fungsi Strategis	Arahan Pengembangan Tata Ruang
9	Kawasan Jakarta International Stadium (JIS) dan Sekitarnya	Wisata Olahraga & Ruang Terbuka Publik	Kawasan Pengembangan Strategis Baru & Olahraga Perkotaan	Aktivasi ruang publik skala besar, wisata olahraga, pengembangan zona komersial, kuliner, dan kegiatan komunitas

Sumber: [RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044](#). Diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2044, 9 (sembilan) kawasan wisata strategis ditetapkan sebagai bagian dari strategi pengembangan ruang kota berbasis budaya, lingkungan, dan ekonomi kreatif. Setiap kawasan dikembangkan sesuai dengan karakter fungsionalnya, baik sebagai pusat konservasi, kebudayaan, rekreasi edukatif, hingga simpul kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Kebijakan pengembangan diarahkan untuk memperkuat fungsi kawasan melalui penataan infrastruktur, pelestarian nilai historis, serta penyediaan ruang-ruang publik yang mendukung interaksi sosial dan ekspresi budaya. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga mendorong integrasi pariwisata dengan mobilitas perkotaan, sistem ruang terbuka, dan kegiatan ekonomi kreatif. Selain itu, kawasan-kawasan tersebut juga diposisikan sebagai ekosistem yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian, pengelolaan, dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa arahan pengembangan kawasan wisata dalam RTRW 2024-2044 mencerminkan upaya menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga inklusif secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis.

Perspektif lingkungan hidup dalam KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045 memberikan kerangka yang penting untuk mengarahkan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar berjalan secara berkelanjutan. KLHS menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan DKI Jakarta banyak yang telah melampaui ambang batas pada berbagai indikator. Misalnya, ketersediaan air bersih yang mengalami defisit signifikan serta kapasitas ekosistem yang telah terpakai lebih dari 96%. Kondisi ini menuntut agar setiap rencana pengembangan kawasan wisata mempertimbangkan limitasi daya dukung lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membatasi pengunjung di pulau kecil sesuai kapasitas, penerapan teknologi hemat air dan energi di fasilitas wisata, serta pengaturan jam operasional yang efisien. Konsep "carrying capacity" menjadi sangat penting agar pembangunan wisata tidak menambah tekanan pada infrastruktur di lingkungan kota.

Selain itu, risiko bencana menjadi aspek yang sangat krusial. DKI Jakarta merupakan wilayah dengan potensi multi-bencana, seperti banjir, rob, gempa bumi, kebakaran kota, hingga dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, KLHS menekankan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas bencana harus diantisipasi dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan pariwisata. RTRW 2024-2044 juga mengamanatkan bahwa pengembangan destinasi wisata perlu didasarkan pada kajian risiko gempa dan tsunami, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan di kawasan wisata harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa, memiliki jalur evakuasi yang memadai, dan memperhitungkan penurunan muka tanah yang berdampak pada kawasan tua dan pesisir kota.

Dari sisi dampak lingkungan, KLHS menekankan bahwa peningkatan aktivitas wisata membawa potensi gangguan, seperti peningkatan sampah, polusi udara dan air. Oleh karenanya, pembangunan pariwisata diarahkan untuk menjadi lebih ramah lingkungan, dengan mendorong sertifikasi green building bagi hotel, pengembangan destinasi wisata rendah karbon, serta pengelolaan sampah berbasis prinsip reduce-reuse-recycle di setiap destinasi. KLHS juga mengidentifikasi bahwa tingkat

implementasi prinsip-prinsip wisata berkelanjutan di DKI Jakarta masih rendah, sehingga perlu percepatan dalam adopsi standar pengelolaan dan sistem pengelolaan destinasi berbasis komunitas.

Secara jangka panjang, KLHS mendorong agar pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif turut mendukung transformasi hijau DKI Jakarta menuju kota rendah emisi. Dalam proyeksi hingga tahun 2045, sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ekonomi signifikan tanpa memperbesar beban ekologis kota. Dukungan terhadap industri kreatif yang berbasis digital, penggunaan teknologi hemat sumber daya, dan penerapan konsep green event untuk kegiatan MICE menjadi bagian dari transformasi yang diusulkan. Seluruh arah kebijakan ini diselaraskan dengan agenda nasional, yaitu Visi Indonesia Emas 2045 dan SDGs, untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota kreatif yang berkelanjutan lingkungan.

2.2.4 Isu Strategis

Renstra Disparekraf Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis yang akan memengaruhi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan. Analisis mendalam menghasilkan sejumlah isu kunci sebagai landasan penyusun rencana guna mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Transformasi Status Baru DKI Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Nasional dan Kota Global

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan perubahan status Provinsi DKI Jakarta dari ibu kota negara menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan kedudukan baru sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Sebagai pusat perekonomian nasional, DKI Jakarta diharapkan menjadi simpul utama aktivitas ekonomi dan bisnis skala global yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Sementara peran sebagai kota global menempatkan DKI Jakarta

sebagai kota berkelas dunia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan, serta menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan organisasi, baik regional maupun internasional.

Reposisi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global tidak terlepas dari dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi makro. Sebagai episentrum utama ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar di tingkat nasional sekitar 16.71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 ([BPS, 2025](#)), DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai penghubung antara Indonesia dengan jejaring bisnis global, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Di tengah ketidakpastian global saat ini, posisi DKI Jakarta sebagai hub internasional menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional, sekaligus mendorong integrasi Indonesia ke dalam jaringan perdagangan, investasi, dan informasi internasional. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara juga semakin mempertegas peran baru DKI Jakarta, yang menandai adanya pergeseran historis dari pusat administrasi pemerintahan menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif, bisnis, dan pariwisata bertaraf global.

Identitas baru ini membuka peluang besar bagi DKI Jakarta, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, DKI Jakarta memiliki potensi untuk memposisikan secara lebih strategis dalam rantai nilai pariwisata internasional maupun jejaring industri kreatif global. Kendati demikian, transformasi ini juga menghadirkan implikasi tantangan yang kompleks, terutama terkait kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dan kapasitas adaptasi pelaku industri pariwisata serta ekonomi kreatif. Tantangan ini mencakup aspek-aspek fundamental, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas profesional dan daya saing global, kemampuan perangkat daerah dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi investasi dan kolaborasi global, serta kesiapan infrastruktur penunjang yang memenuhi standar internasional. Oleh karenanya, diperlukan

pendekatan strategis dan sistematis untuk memastikan adaptasi berlangsung efektif dalam mendukung terwujudnya visi DKI Jakarta sebagai kota global.

Krisis Identitas Perkotaan Jakarta

DKI Jakarta saat ini tengah menghadapi fenomena krisis identitas, yakni suatu kondisi ketika jati diri kota mengalami pemudaran yang disebabkan oleh dinamika historis dan tantangan kontemporer. Perubahan sosial budaya yang berlangsung secara cepat, disertai dengan arah pembangunan yang kurang memperhatikan pelestarian nilai-nilai lokal dan warisan budaya, telah mengaburkan karakter khas Jakarta. Identitas Jakarta sebagai pusat kekuasaan, budaya, dan simbol nasional kini juga mengalami pergeseran makna, khususnya pasca dicabutnya status resmi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Di sisi lain, visi pembangunan Jakarta ke depan tetap menggarisbawahi pentingnya berbudaya, walaupun bertransformasi menjadi kota bisnis bertaraf global. Artinya, identitas kultural Jakarta diharapkan menjadi elemen kunci dalam profil kota, meskipun Jakarta berambisi merepresentasikan dirinya sebagai metropolitan global yang modern. Kondisi ini memunculkan ketegangan mendasar, yakni bagaimana mempertahankan warisan budaya lokal di tengah dinamika yang ada.

Ketegangan antara budaya lokal dan arus globalisasi menjadi tantangan utama dalam mempertahankan eksistensi kultural Jakarta, khususnya terhadap identitas budaya Betawi yang kian tergerus. Proses globalisasi yang intensif, disertai dengan laju urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi, telah mendorong masuknya berbagai unsur budaya global ke dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat kota. Kondisi ini berpotensi melemahkan keberlanjutan budaya lokal dan mengancam keberadaan nilai-nilai kultural yang menjadi identitas Jakarta.

Dalam aspek *city branding*, Jakarta juga mengalami persoalan yang kompleks terkait penentuan identitas yang autentik sekaligus kompetitif secara global. Kurangnya kejelasan identitas ini menyebabkan sulitnya Jakarta dalam membangun citra sebagai identitas wisata global yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain, kurangnya membranding identitas yang kuat berdampak pada kurang teroptimisasinya potensi

wisata Jakarta, mengingat wisatawan umumnya mencari keunikan lokal yang autentik. Di sisi ekonomi kreatif, produk-produk lokal Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk memiliki keunikan karakteristik karena tren globalisasi yang menyebabkan homogenisasi produk. Akibatnya, daya saing subsektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fashion, seni pertunjukan, dan film perlu dilakukan akselerasi.

Pengalaman kota lain yang telah kehilangan status sebagai ibu kota dapat menjadi refleksi penting bagi Jakarta. Misalnya Istanbul, meskipun peran politik berpindah ke Ankara sejak 1923, mampu meneguhkan posisinya sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata internasional melalui pelestarian warisan sejarah serta penguatan *city branding* yang menonjolkan identitas kultural unik. Rio de Janeiro juga tetap bertahan sebagai ikon budaya Brasil setelah status ibu kota dialihkan ke Brasilia melalui penyelenggaraan agenda kultural berskala global, seperti Karnaval Rio, sehingga identitas kota tetap terjaga sebagai destinasi wisata dunia.

Dari praktik-praktik tersebut, terlihat bahwa hilangnya status ibu kota dapat menjadi momentum strategis bagi pemerintah DKI Jakarta untuk menegaskan kembali identitas kultural secara lebih integratif dan partisipatif, memperkuat *city branding* berbasis keunikan lokal, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing di global.

Persaingan Kawasan Global

Dalam konteks persaingan kawasan global, khususnya di antara kota-kota metropolitan ASEAN, DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing sebagai destinasi pariwisata dan pusat ekonomi kreatif. Berbagai indeks global menunjukkan bahwa posisi DKI Jakarta relatif tertinggal dibandingkan beberapa kota pesaing, baik dari segi kapabilitas ekonomi, daya tarik budaya, maupun kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

Menurut laporan Global Cities Index (2023), DKI Jakarta menempati peringkat ke-74 dari 156 kota yang diukur secara global (Kearney, 2023). Peringkat tersebut

menunjukkan bahwa meskipun DKI Jakarta menjadi pusat penting bagi ekonomi nasional, tingkat keterhubungan dan pengaruh globalnya masih belum setara dengan kota-kota besar lain di kawasan ASEAN, seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini, yaitu masih rendahnya skor DKI Jakarta pada dimensi-dimensi strategis seperti cultural experience, information exchange, dan business activity, yang merupakan pilar utama untuk mencerminkan daya tarik wisata, kapasitas ekonomi kreatif, serta kemampuan kota dalam bertukar informasi dan ide lintas negara untuk mengembangkan industri kreatif berbasis teknologi dan pengetahuan.

Dari perspektif pengalaman budaya, DKI Jakarta memiliki potensi besar sebagai simpul kebudayaan nasional. DKI Jakarta telah merepresentasikan keragaman budaya Indonesia dalam satu lanskap urban melalui keberadaan situs-situs bersejarah, seperti kawasan Kota Tua, museum-museum yang memperlihatkan artefak dan sejarah nusantara, serta ragam kuliner yang mencerminkan warisan Betawi dan berbagai etnis lain yang bermukim di wilayah metropolitan ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kota-kota utama di kawasan ASEAN, potensi tersebut belum sepenuhnya dikemas secara optimal untuk mampu bersaing di kancah internasional.

Misalnya, Singapura, yang meskipun tidak memiliki warisan sejarah yang panjang seperti Indonesia, namun daya saing budaya tetap dapat dibangun melalui pendekatan yang strategis dan terintegrasi antara kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan promosi budaya berskala global. Dalam hal ini, pemerintah setempat telah secara aktif membentuk institusi budaya, membangun infrastruktur seni berskala internasional, serta menetapkan kawasan budaya sebagai bagian dari perencanaan kota ([Centre for Liveable Cities Singapore, 2017](#)). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ekosistem kreatif domestik, tetapi juga meningkatkan posisi Singapura dalam lanskap global. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kekuatan budaya bukan semata ditentukan oleh kedalaman sejarah, melainkan juga oleh kapasitas

institutional dan kreativitas dalam mengelola serta menyajikan budaya secara kontemporer dan kompetitif.

Dalam hal pertukaran informasi dan ekosistem digital, DKI Jakarta menghadapi tantangan terkait dengan aksesibilitas dan keterhubungan global. Indikator seperti ketersediaan saluran televisi berita internasional dan jumlah pelanggan broadband menunjukkan tren penurunan yang signifikan ([Kompas.id, 2024](#)). Penurunan ini mencerminkan belum meratanya infrastruktur digital yang andal dan tingginya ketimpangan dalam akses terhadap informasi internasional. Selain berdampak pada daya saing DKI Jakarta sebagai kota global, kondisi ini juga mengindikasikan terbatasnya peran DKI Jakarta sebagai pusat distribusi informasi dan pertukaran pengetahuan lintas negara. Selain itu, pemindahan ibu kota juga berpotensi mengurangi kehadiran kantor berita asing atau pusat komunikasi internasional di DKI Jakarta. Oleh karenanya, investasi pada konektivitas digital menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan.

Pada dimensi bisnis, DKI Jakarta mencatat performa yang kurang kompetitif terutama akibat penurunan signifikan pada indikator konferensi International Congress and Convention Association (ICCA). Berdasarkan laporan ICCA tahun 2022, menunjukkan adanya kesenjangan aktivitas MICE DKI Jakarta dibandingkan dengan kota-kota besar ASEAN. Singapura memimpin dengan 101 pertemuan, Bangkok sebanyak 50 pertemuan, dan Kuala Lumpur 35 pertemuan; adapun DKI Jakarta mencatat 6 konferensi internasional yang menempatkannya pada peringkat ke-54 di kawasan Asia Pasifik ([ICCA, 2022](#)).

Kesenjangan tersebut mencerminkan terbatasnya integrasi DKI Jakarta dalam jejaring bisnis global, yang ditandai oleh rendahnya frekuensi penyelenggaraan konferensi internasional dan minimnya partisipasi delegasi asing. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya visibilitas kota dan terbatasnya peluang kolaborasi lintas negara. Selain itu, minimnya konferensi internasional juga berdampak pada terbatasnya akses pelaku ekonomi kreatif terhadap platform strategis untuk

menampilkan karya, menjalin kemitraan global, serta memperoleh pembaruan pengetahuan dan tren industri. Kondisi ini berpotensi menghambat perluasan pasar produk kreatif, memperlambat laju inovasi, dan melemahkan dinamika pertumbuhan ekosistem kreatif di DKI Jakarta.

Selain ditinjau dari tiga dimensi di atas, rata-rata lama tinggal wisatawan internasional di DKI Jakarta juga masih tergolong singkat—sekitar 1,7 hingga 2,6 hari—dibandingkan dengan Bangkok (4,8 hari) atau Singapura (4,2 hari). Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan daya tarik rekreasional yang kuat dan beragam bagi wisatawan. Brand kota "Enjoy Jakarta" juga belum mampu memberikan daya resonansi yang kuat, sebagian karena persepsi publik yang masih didominasi oleh isu kemacetan, polusi, dan minimnya ruang publik yang layak.

Krisis Lingkungan

Telaah terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi DKI Jakarta 2024-2044 dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) DKI Jakarta 2025-2045 menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta dihadapkan pada kebutuhan untuk bertransformasi secara berkelanjutan. DKI Jakarta diarahkan menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional, sekaligus memikul tanggung jawab sebagai pusat budaya, destinasi wisata kelas dunia, dan simpul industri kreatif. Namun, ambisi tersebut berlangsung di tengah tekanan krisis lingkungan, keterbatasan daya dukung ekologis, serta tingginya risiko bencana alam.

Permasalahan polusi udara mencuat sebagai salah satu isu paling signifikan. Pada Agustus 2023, DKI Jakarta tercatat sebagai kota paling berpolusi secara global selama hampir satu pekan berturut-turut ([Asia News Network, 2023](#)). Sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri, yang menghasilkan partikel halus serta polutan berbahaya lainnya. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, namun juga berpengaruh terhadap citra kota sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi kreatif.

Udara yang tercemar ini akan menjadi faktor disinsentif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama dalam konteks wisata berbasis pengalaman dan penyelenggaraan event skala internasional, seperti konferensi, pameran, maupun kompetisi olahraga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sejumlah langkah mitigatif untuk menurunkan tingkat pencemaran, antara lain melalui program uji emisi kendaraan bermotor, elektrifikasi transportasi umum, serta pengawasan ketat terhadap emisi industri. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan struktural, seperti rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Hingga tahun 2023, luas RTH di DKI Jakarta hanya mencapai sekitar 5,2% dari total wilayah 33,34 juta m², di mana angka tersebut belum memenuhi ketentuan standar sebesar 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang ([Databooks.katadata.co.id, 2023](https://databooks.katadata.co.id/)). Ketersediaan RTH yang memadai akan berperan penting dalam menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara, sekaligus memperbaiki kualitas visual dan kenyamanan kota, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing DKI Jakarta sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

Selain polusi udara, perubahan iklim juga menjadi isu strategis lingkungan bagi pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Sebagai kota pesisir tropis dengan kepadatan penduduk tinggi, DKI Jakarta termasuk salah satu wilayah metropolitan dunia yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Laporan Verisk Maplecroft (2021), mengklasifikasikan DKI Jakarta sebagai kota dengan tingkat tinggi risiko iklim tertinggi, seiring dengan kondisi bahwa sekitar 40% wilayahnya berada di bawah permukaan laut ([WALHI Jakarta, 2022](https://wali.jakarta.go.id/)). Kerentanan ini diperparah oleh penurunan muka tanah (land subsidence) yang mencapai rata-rata 28 cm per tahun di beberapa bagian Jakarta Utara.

Akibat dari perubahan iklim akan mengakibatkan cuaca ekstrem yang berimplikasi pada terjadinya bencana, seperti banjir. Tidak hanya merusak infrastruktur pendukung, seperti jalan, transportasi, dan kawasan wisata, tetapi potensi bencana ini juga

mengganggu kelangsungan event budaya, olahraga, dan kegiatan MICE yang sangat bergantung pada stabilitas lingkungan. Selain itu, cuaca ekstrem dan kualitas lingkungan yang memburuk akibat bencana juga akan menurunkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, serta menjadi faktor penghambat masuknya segmen pasar industri kreatif.

Inklusivitas Sosial Budaya

Salah satu prinsip pariwisata berkualitas dan berkelanjutan adalah inklusivitas sosial budaya, yaitu menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan wisata, serta penghormatan terhadap kearifan budaya yang hidup dalam komunitas-komunitas setempat. Prinsip ini tidak hanya bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya tradisional, tetapi juga memastikan bahwa manfaat sosial dan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di sekitar destinasi wisata. Sebagaimana didefinisikan oleh UNWTO (2021), pariwisata berkelanjutan mengharuskan penghormatan terhadap keaslian budaya komunitas tuan rumah, pelestarian warisan budaya, dan penguatan saling pengertian antar budaya sebagai bagian integral dari pengembangan destinasi.

Dalam konteks DKI Jakarta, penerapan prinsip ini menjadi semakin krusial mengingat karakter kota sebagai megapolitan yang multikultural, dengan sejarah panjang dan identitas budaya yang kompleks. Sebagai kota yang merupakan pertemuan dari berbagai etnis, DKI Jakarta memiliki kekayaan budaya yang besar, namun sekaligus menghadapi risiko identitas akibat urbanisasi, komersialisasi, dan modernisasi yang berkembang pesat. Oleh karenanya, pembangunan pariwisata yang inklusif di DKI Jakarta perlu dimaknai sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Keberlanjutan budaya lokal juga harus dibarengi dengan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelestarian budaya akan lebih efektif jika selaras dengan peningkatan kesejahteraan komunitas pemilik budaya tersebut. Artinya, pengembangan sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif perlu dirancang agar memberikan peluang kerja, sumber penghidupan, serta akses terhadap rantai nilai industri bagi warga sekitar destinasi. Hal ini mengharuskan DKI Jakarta untuk melibatkan aktif komunitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, baik melalui forum konsultasi publik, kemitraan antara pemerintah dan komunitas lokal, hingga integrasi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke dalam ekosistem pariwisata. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya akan memperkuat rasa memiliki, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan program pariwisata dan ekonomi kreatif secara jangka panjang.

Pariwisata Halal dan Domestik

Pengembangan pariwisata domestik dan halal di DKI Jakarta menjadi isu strategis yang semakin penting, terutama dalam konteks tren global yang menunjukkan pertumbuhan signifikan pada sektor ini. Menurut laporan Global Muslim Travel Index (2023), Indonesia bersama Malaysia menempati posisi tertinggi sebagai destinasi pariwisata halal terbaik dunia, yang mencerminkan semakin kuatnya daya tarik Indonesia bagi wisatawan Muslim ([SEADS, 2023](#)). Selaras dengan laporan tersebut, State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) juga mencatat tren peningkatan belanja wisatawan Muslim yang diproyeksikan mencapai angka signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memperkuat potensi ekonomi dari pariwisata berbasis nilai-nilai Islam ([Dinar Standard, 2022](#)). Di tingkat domestik, laporan dari World Travel & Tourism Council (WTTC) menegaskan bahwa pariwisata domestik menjadi pendorong utama pemulihan ekonomi sektor pariwisata setelah pandemi COVID-19, dengan perjalanan domestik di Indonesia mencapai rekor baru yang melampaui angka sebelum pandemi ([WTTC, 2025](#)).

Kombinasi dua tren di atas menempati DKI Jakarta dalam posisi yang strategis untuk mengembangkan destinasi wisata halal yang menarik guna meningkatkan daya saing Jakarta secara global, sekaligus memperkuat citra kota sebagai pusat wisata berbasis nilai-nilai Islam modern dengan karakter kosmopolitan. Keberagaman budaya, kekayaan kuliner halal, serta tersedianya berbagai fasilitas ibadah yang memadai

merupakan modal sosial-budaya bagi Jakarta dalam mengembangkan segmen wisata halal, yang semakin didukung oleh populasi Muslim yang besar. Selain itu, peningkatan signifikan tren pariwisata domestik pascapandemi menjadikan wisatawan nusantara sebagai pangsa pasar utama Jakarta yang potensial untuk dikembangkan, melalui produk wisata yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata halal, tetapi juga mengangkat keunikan budaya lokal.

Kolaborasi Multipihak

Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan menuntut kerja sama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, kolaborasi bukan hanya sebagai instrumen koordinasi, melainkan fondasi dari tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan inklusif. Pendekatan multipihak menggarisbawahi pentingnya kemitraan yang melibatkan beragam aktor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, media, lembaga internasional, hingga masyarakat. Hal tersebut selaras dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) ke-17, yang merupakan landasan utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan kemitraan (multi-stakeholder partnerships) yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, berbagi tanggung jawab, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (United Nations, 2017).

Dalam konteks DKI Jakarta, prinsip ini menjadi krusial mengingat kompleksitas struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan di wilayah perkotaan. Sebagai kota global dengan dinamika pembangunan yang tinggi, DKI Jakarta membutuhkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi dan responsif. Dalam hal ini, kolaborasi multipihak tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan simbolis, melainkan sebagai suatu mekanisme kerja yang menekankan pengakuan, fasilitasi, dan penyelarasan peran serta kontribusi setiap pemangku kepentingan dalam kerangka strategi bersama.

Lebih lanjut, kolaborasi multipihak juga dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai bersama (shared-value), membangun akuntabilitas kolektif, dan memperkuat resiliensi sektor pariwisata dalam merespons dinamika dan ketidakpastian global ([UNWTO, 2017](#)). Dalam tataran implementatif, hal ini mengimplikasikan bahwa setiap pemangku kepentingan di DKI Jakarta tidak hanya memiliki kepentingan sektoral, tetapi juga mengembangkan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan sistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelaku usaha dituntut untuk mengadopsi prinsip pariwisata yang bertanggung jawab dan beretika; komunitas lokal berperan dalam menjaga integritas sosial dan kelestarian lingkungan; sedangkan pemerintah DKI Jakarta memiliki mandat untuk menyediakan regulasi yang inklusif, menetapkan insentif yang tepat sasaran, serta berperan sebagai fasilitator dan kurator utama dalam mendorong sinergi lintas sektor secara berkelanjutan.

BAB III



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029

Renstra Disparekraf DKI Jakarta 2025-2029 disusun selaras dengan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029, terkhusus dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025–2029 adalah "Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya". Pemaknaan dari visi tersebut mengisyaratkan lima konsepsi penting yang perlu diartikulasikan dalam setiap program dan kegiatan strategis Dinas Parekraf. Konsepsi pertama yaitu "Jakarta Kota Global", yang pemahamannya sektor parekraf dalam jangka panjang perlu menyelaraskan kinerjanya dengan kota-kota besar lain di dunia, utamanya di regional Asia Tenggara. Secara lebih strategis, dapat mendukung DKI Jakarta menjadi *primary node* melalui aspek parekraf dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif. Kedua, konsepsi "pusat perekonomian" mengamanatkan bahwasanya Disparekraf DKI Jakarta secara kontributif mendorong DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan motor penggerak perekonomian nasional. Salah satu asumsinya, yaitu GDP per-kapita dapat tumbuh melalui sektor parekraf seiring dengan bertambahnya persentase penduduk kawasan perkotaan dan berimplikasi pada *high-income countries* dari DKI Jakarta.

Konsepsi yang ketiga, yaitu "berdaya saing", di mana Disparekraf DKI Jakarta perlu mengembangkan agenda konstelasi DKI Jakarta yang lebih baik dari dirinya di masa lampau, terutama pada sektor parekraf. Dengan demikian, DKI Jakarta mampu berkompetisi dengan kota-kota lain yang terus memperbaiki kualitas sektor parekraf dan mampu menarik serta mempertahankan investasi, tenaga kerja, dan bisnis. Keempat, yaitu konsepsi "berkelanjutan", dimaknai bahwasanya Disparekraf DKI Jakarta berperan merancang dan mengelola kebutuhan penduduk DKI Jakarta saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan

mereka sendiri, tentunya ini dapat sektor parekraf. Konsep ini mencakup keseimbangan antara sektor parekraf dengan aspek lainnya (ekonomi, sosial, dan lingkungan), sehingga DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitasnya sebagai kota tetap layak huni dalam jangka panjang. Konsepsi kelima, yaitu "menyejahterakan seluruh warga", yaitu mengamanahkan Disparekraf DKI Jakarta untuk melakukan proses pembangunan parekraf yang orientasi utamanya untuk mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat DKI Jakarta. Kesejahteraan di sini dapat diartikan luas dan tidak hanya terkait dimensi ekonomi, namun merupakan konsep well-being yang holistik. Misalnya, Disparekraf DKI Jakarta memberikan nilai "sejahtera", seperti mengelola destinasi pariwisata dan ekosistem ekraf yang berbasis pada ramah lingkungan dan kemudahan mengakses pelayanan. Dalam hal ini, Disparekraf DKI Jakarta dapat berkontribusi untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai *cities for all*.

Operasionalisasi untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui pencapaian lima misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Turunan dari misi ini erat kaitannya dengan agenda kinerja Disparekraf DKI Jakarta, mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator capaian. Oleh karena itu, dalam Renstra Disparekraf DKI Jakarta ini, perlu mendeskripsikan agenda kinerja tersebut, sehingga konsistensi kinerja parekraf dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dapat harmonis. Dalam kaitannya dengan Disparekraf DKI Jakarta, terdapat satu misi yang berimplikasi langsung sebagai pemain utama, yaitu Misi ke-2 (Tabel 18 - diberi tanda kuning). Berikut dilampirkan pemetaan penyelarasan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045.

Tabel 18 Pemetaan Penyelarasan Misi Kepala Daerah RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD DKI Jakarta Tahun 2025-2045

RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045		RPJMD 2025-2029	
Visi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Visi:		Visi:	
Asta Cita	Misi	Arah Kebijakan (Game Changer)	Isu Strategis	Misi
<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 4 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jakarta yang Unggul, Produktif, dan Sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Jakarta Menjadi Pusat Keunggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas modal manusia dan kehidupan bermasyarakat 	Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 5 Prioritas Nasional 6 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Pembangunan Wilayah Jakarta yang Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Ekonomi Jakarta yang Inklusif, Berdaya Saing, Global, dan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Ekskalasi Jakarta sebagai Kontributor Utama Perekonomian Indonesia yang Terintegrasi secara Global Pengarusutamaan R&D dan Inovasi dalam Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan 	Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 7 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jakarta yang Berkualitas, Harmonis, Adaptif, dan Berintegritas Mewujudkan Stabilitas Jakarta yang Tangguh dan Berpengaruh di Kancah Global 	<ul style="list-style-type: none"> Reformasi Tata Kelola menuju Kota Global yang Berdaya Saing 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintahan dinamis dengan performa layanan prima 	Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
Prioritas Nasional 8	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Infrastruktur Jakarta yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Infrastruktur Kota menuju Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Ekosistem yang seimbang dan berketeraan iklim Infrastruktur kota yang layak 	Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan

RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045		RPJMD 2025-2029	
Visi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Visi: Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan		Visi: Jakarta Kota Global dan Pusat Perekenomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya	
Asta Cita	Misi	Arah Kebijakan (Game Changer)	Isu Strategis	Misi
	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Pembangunan Jakarta yang Sinergis dan Berkesinambungan 		dan berkelanjutan	
	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan Jakarta yang Layak Huni melalui Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Konektivitas Informasi, Barang, dan Penumpang Jakarta sebagai Pusat Transit Regional dan Global 	<ul style="list-style-type: none"> Pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal 	Menjadi Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sumber: RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan Disparekraf DKI Jakarta memiliki peran pada Misi ke-2, di mana keterkaitan peran pada misi tersebut kuat hubungannya untuk mewujudkan Prioritas Nasional ke 2, 5, dan 6.

Secara spesifik, keterkaitan Disparekraf DKI Jakarta dengan Misi ke-2, yaitu pada tujuan "Terbangunnya Pusat Ekonomi dan Bisnis yang Inovatif dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan" dengan sasaran "Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik". Ukuran pencapaian dari sasaran tersebut adalah persentase PDRB Ekraf dan Jumlah Tamu Mancanegara. Selain itu, dalam RPJMD DKI Jakarta 2025-2029, secara eksplisit dijelaskan bahwa strategi Disparekraf DKI Jakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan memperhatikan kondisi akhir yang diharapkan, yaitu Jakarta menjadi salah satu tujuan wisata dan bisnis utama khususnya di kawasan Asia Tenggara; dan tiga faktor kritis yaitu: 1) Peningkatan daya tarik dan kualitas pengalaman wisata melalui revitalisasi

objek wisata potensial; 2) Penyelenggaraan event-event kelas dunia; dan 3) *Adaptive reuse* bangunan-bangunan bersejarah untuk menciptakan identitas dan ruang publik yang unik.

Visi dan Misi Kepala Daerah tentunya diarahkan bergerak secara operasional hingga ke strategi pembangunan daerah. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menekankan pada arah kebijakan yang diprioritaskan yaitu "*game changers*" dari perangkat daerah, tidak terkecuali Disparekraf DKI Jakarta. Pada dokumen RPJPD DKI Jakarta 2025-2045, dicantumkan tujuh Game Changers yang merupakan himpunan dari arah kebijakan prioritas yang telah dikelompokkan menurut tahapan pelaksanaannya. Proses perumusan game changers dilakukan dengan menentukan beberapa sektor yang memiliki daya ungkit atau keterkaitan tinggi terhadap sektor-sektor lainnya. Keterkaitan dengan Renstra Disparekraf 2025-2029 ini, *game changers* diamanatkan pada tahap 1 fase Perbaikan Fundamental, yaitu *Game Changer* ke-4 "Akselerasi Jakarta sebagai Hub Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya", dengan beberapa poin arah kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu; 1) Pengembangan destinasi wisata unggulan baru seperti wisata urban, wisata heritage, dan wisata pesisir serta kepulauan; 2) Pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) yang dilengkapi dengan ragam infrastruktur kontemporer bertaraf internasional yang kompetitif dan adaptif; dan 3) Penciptaan *creative hub* sebagai ruang ekosistem mengembangkan ekonomi kreatif Jakarta.

Tujuan dan sasaran dari setiap misi yang diemban secara strategis diartikulasikan dalam berbagai program prioritas pembangunan daerah. Mempertimbangkan peran dari Disparekraf DKI Jakarta secara utama berada pada Misi ke-2, maka penjelasan mengenai keterkaitan dengan program prioritas pembangunan difokuskan pada misi tersebut. Adapun program prioritas yang direkomendasikan berdasarkan RPJMD 2025-2029 bersifat *cross-cutting* yang pencapaiannya ditunjang oleh kinerja lintas bidang urusan; serta nomenklatur program-program prioritas yang tercantum telah

disesuaikan dengan daftar program menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Disparekraf DKI Jakarta dalam jangka menengah, perlu menggerakan sektor pariwisata Jakarta yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata urban, penguatan wisata berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE), serta pemasaran pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan sektor ekonomi kreatif guna memperkuat daya tarik DKI Jakarta sebagai destinasi wisata, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berwisata, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Pengembangan destinasi wisata juga perlu didukung dengan sistem transportasi umum yang terintegrasi dan aksesibilitas penghubung daratan utama dengan pulau-pulau wisata; melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); ketersediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, untuk ekosistem ekonomi kreatif, perlu disusun Grand Design Ekonomi Kreatif, mengembangkan zona ekonomi kreatif, membangun direktori ekonomi kreatif, serta menyelenggarakan berbagai program seperti inkubator industri, dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, terdapat dua hal strategis yang perlu diperhatikan dalam program prioritas yang direkomendasikan, yaitu: 1) Aspek pemasaran pariwisata; dan 2) Aspek ekraf yang melihat Jakarta sebagai *melting pot* keberagaman budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dideskripsikan, maka terdapat empat program prioritas pembangunan daerah yang direkomendasikan dalam RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 yang mendukung tujuan dan sasaran Misi ke-2, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan bagian integral dari upaya transformasi Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya. Kedua sektor ini tidak hanya dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat identitas kota, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung inklusi sosial. Oleh karena itu tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 diarahkan pada **"Mengembangkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkebudayaan yang Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi"**

Indikator tujuan tersebut mencakup:

1. Persentase Proporsi PDRB Sektor Pariwisata
2. Persentase Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang unggul dalam pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, diperlukan penetapan sasaran strategis yang konkret, terukur, dan relevan terhadap isu global maupun kebutuhan lokal. Sasaran pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta 2025–2029 dirumuskan sebagai wujud operasionalisasi dari tujuan jangka menengah, dengan mempertimbangkan permasalahan aktual sektor, tren industri global, dan kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah (RPJPD dan RPJMD). Dua sasaran utama ditetapkan untuk mengarahkan fokus kebijakan selama lima tahun ke depan.

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pengalaman Pariwisata dan Daya Saing Ekonomi Kreatif Kota yang Berbasis Kebudayaan

Indikator Sasaran:

1. Jumlah Festival dan Event Internasional di Jakarta
2. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global, fokus pembangunan pariwisata bergeser dari sekadar kunjungan destinasi menuju penciptaan pengalaman kota yang bermakna dan tak terlupakan. *Landscape urban* dan keragaman wisata Jakarta—mulai dari pesona sejarah di kawasan *heritage*, denyut MICE di pusat kota, hingga keindahan bahari di Kepulauan Seribu — diorkestrasikan menjadi sebuah panggung urban yang hidup. Setiap ruang publik menghadirkan cerita yang terhubung, terkurasai, serta menghadirkan layanan yang ramah dan inklusif. Pengalaman tidak berhenti pada monumen atau lokasi ikonik, melainkan merangkum *end-to-end journey* pengunjung—dari cita rasa kuliner otentik di pusat jajanan, getaran festival musik internasional, hingga kekaguman pada instalasi seni di ruang kota. Intinya adalah narasi yang kuat, aksesibilitas yang baik, dan integrasi digital sehingga setiap interaksi terasa autentik dan berkesan.

Mesin penggerak utama di balik transformasi ini adalah ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan berakar pada budaya. Para kreator, seniman, desainer, musisi, dan wirausahawan kuliner adalah arsitek dari pengalaman kota ini. Melalui kolaborasi yang terintegrasi, produk dan jasa kreatif akan menjadi jiwa dari setiap atraksi pariwisata. Dengan menyatukan pariwisata dan ekonomi kreatif, Jakarta tidak hanya menawarkan tempat untuk dikunjungi, tetapi sebuah dunia untuk dijelajahi, dirasakan, dan dikenang, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing dan citranya sebagai destinasi urban yang dinamis dan berkelas dunia.

Ketercapaian dari setiap tujuan/sasaran ini diukur melalui target kinerja, sebagaimana tercantum pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19 Tujuan dan Sasaran Renstra Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir
Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan Aktivitas yang Menarik	Mengembangkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkebudayaan yang Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi	1. Persentase Proporsi PDRB Sektor Pariwisata	%	4.81	5.02	5.11	5.19	5.27	5.35	5.35
		2. Persentase Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta	%	10.63	10.87	11	11.12	11.24	11.36	11.36
	Meningkatkan Kualitas Pengalaman Pariwisata dan Daya Saing Ekonomi Kreatif Kota yang Berbasis Kebudayaan	1. Jumlah Festival dan Event Internasional di Jakarta	Festival/Event	38 (2024)	40	43	44	45	46	218
		2. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	1.167.869 (2022)	1.191.402	1.203.316	1.208.129	1.214.170	1.221.455	1.221.455

3.3 Strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Strategi Tahap I (2026): Penguatan Fondasi dan Eksplorasi Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tingkat Global

Tahun 2026 menjadi fondasi awal dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global dengan memulai penguatan infrastruktur dasar, regulasi pendukung, dan identitas naratif sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Fokus utama diarahkan pada program-program yang bertujuan untuk eksplorasi potensi destinasi melalui pemetaan klaster destinasi budaya dan hiburan, seperti revitalisasi kawasan Kota Tua, Ancol, Glodok, dan Pantai Marunda. Sejalan dengan RPJMD DKI Jakarta 2025-2029, terdapat Pantai Marunda yang menawarkan wisata rakyat gratis sebagai alternatif wisata pinggir pantai di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan konsep "Jakarta North to South" sebagai fondasi penguatan identitas kota, yang menggambarkan Jakarta sebagai kota dengan sejarah maritim di utara, pusat pemerintahan dan budaya di tengah, serta pusat kreatif modern di selatan.

Narasi tersebut menempatkan Jakarta sebagai kota global yang tumbuh dari jejak maritim Nusantara, dibentuk oleh pertemuan berbagai budaya yang hidup berdampingan, dan bergerak maju melalui kreativitas warganya yang lahir dari dinamika kota. Kekuatan inilah yang menempatkan Jakarta sebagai kota bersejarah dengan ekosistem kreatif yang bertumbuh dari keragaman warganya—menciptakan karakter yang tidak ditemukan pada kota global lainnya.

Narasi ini akan diintegrasikan ke dalam pengembangan destinasi, promosi, dan penyelenggaraan event, sehingga seluruh komunikasi pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mencerminkan karakter unik tiap kawasan secara konsisten serta memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota yang kaya warisan, dinamis, dan berorientasi masa depan.

Di sektor ekonomi kreatif, tahun ini menjadi masa pembangunan ekosistem awal, terutama dengan pembentukan dana abadi ekonomi kreatif yang menyediakan hibah pinjaman berbunga rendah, dan pendanaan awal untuk *start-up* kreatif dengan sumber pendanaan dari kontribusi CSR dan sumbangan filantropi. Selain itu juga, pengembangan skema *matching fund* untuk mendukung acara kreatif. *Platform* "satu pintu" untuk penyelenggaraan *event* juga mulai dibangun untuk menyederhanakan perizinan dan logistik acara, serta platform ini disajikan dalam multibahasa. Pada tahun yang sama dibentuk Jakarta *Film Commission* (JFC) sebagai *one-stop service* industri audiovisual untuk percepatan perizinan syuting *on-location*, kurasi dan promosi lokasi (basis data lokasi), fasilitasi insentif produksi, penguatan jejaring *co-production* internasional, serta dukungan kepatuhan sosial–lingkungan dan pengembangan SDM kreatif. Program inkubasi kuliner diperkenalkan untuk mendorong munculnya pelaku baru di sektor gastronomi, sekaligus mengangkat warisan kuliner Betawi dan Indonesia ke panggung global. Upaya ini ditunjang dengan pengembangan ikon kota berbasis produk khas Jakarta melalui sertifikasi produk otentik dan integrasi maskot "Je, Ka, dan Te" dalam strategi *branding*. Selain itu juga memperkuat Kota Jakarta sebagai tuan Rumah Festival Film dengan meningkatkan jangkauan global, memperluas keterlibatan industri, dan menyediakan akses proses bagi sektor swasta.

Tahapan ini menjadi penentu penting dalam menyiapkan struktur dasar kebijakan, sistem layanan, serta narasi kota yang relevan bagi wisatawan dan pelaku ekonomi kreatif global, sekaligus membuka jalan bagi konsolidasi ekosistem pada tahun-tahun berikutnya.

Strategi Tahap II (2027): Konsolidasi Ekosistem dan Keunggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tingkat Global

Tahun 2027 bertepatan dengan perayaan 500 tahun Jakarta, menjadi momentum strategis untuk mengonsolidasikan seluruh inisiatif dan ekosistem yang telah dirintis sebelumnya. Fokus utama diarahkan pada penyelenggaraan *event* berskala internasional secara simultan di berbagai klaster tematik seperti Kota Tua, Ancol, dan

Glodok, dengan dukungan festival musik, seni, dan kuliner yang dikemas dalam kalender *event* tahunan Jakarta. Pengembangan distrik seni pertunjukan terinspirasi *Broadway* juga mulai digerakkan sebagai simbol baru dari wajah global kota. Pusat informasi wisata ditingkatkan dengan layanan multibahasa dan integrasi ke dalam *platform* digital resmi yang dilengkapi fitur AI *itinerary planner*, memperkuat *positioning* Jakarta sebagai destinasi yang ramah, pintar, dan interaktif. Di sektor bisnis, pembentukan Jakarta *Convention & Exhibition Bureau* menjadi salah satu kunci promosi Jakarta sebagai destinasi unggulan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*), bersinergi dengan hotel *budget* untuk menerapkan program sertifikasi agar memenuhi kualitas layanan manusia atau *hospitality service* yang dapat menjadi representasi wajah pariwisata Jakarta yang berdaya saing tinggi dan mampu menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga bermitra dengan hotel-hotel di pusat bisnis seperti SCBD, Thamrin, dan Sudirman dalam membuat paket eksklusif bagi pelancong bisnis, serta menggabungkan penawaran tersebut dengan tur kota dan pengalaman dalam berwisata kuliner.

Di sisi ekonomi kreatif, tahun ini menjadi masa penguatan keunggulan lokal dan perluasan kapasitas produksi. Program sertifikasi "Cita Rasa Otentik Jakarta" diluncurkan, bersamaan dengan promosi global melalui Abang None sebagai Duta Kota Jakarta dan kolaborasi dengan media internasional. Ekspansi distrik kuliner strategis dan pembangunan *food hall modern* menjadi ruang interaksi budaya gastronomi Jakarta. Pemerintah Provinsi juga menjajaki kolaborasi dengan Michelin Guide untuk memetakan keunggulan kuliner kota secara global. Di bidang produksi konten kreatif, insentif fiskal untuk produksi film dan konten internasional mulai diimplementasikan, seiring dengan dimulainya pembangunan pusat inovasi media dan studio produksi. Upaya ini ditopang dengan peluncuran kampanye *branding* kota berbasis produk dan visual lokal yang khas, serta pengembangan identitas kawasan di lima wilayah Jakarta, yang merepresentasikan karakter industri, seni, dan kuliner kota secara distingatif. Serta bermitra dengan pemimpin industri, institusi pendidikan, dan platform pembelajaran daring untuk menciptakan program sertifikasi keterampilan

kreatif yang banyak dibutuhkan. Tahun 2027 dengan demikian menjadi tahapan konsolidatif yang mengintegrasikan identitas, narasi, dan kapasitas Jakarta dalam satu ekosistem yang berdaya saing tinggi.

Strategi Tahap III (2028): Akselerasi Daya Saing dan Kolaborasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tingkat Global

Memasuki tahun 2028, strategi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta difokuskan pada percepatan daya saing melalui integrasi antar klaster, penguatan *branding* kota secara kolektif, *tour online* interaktif untuk mempromosikan *landmark* utama serta perluasan kerja sama lintas negara. Di sektor pariwisata, program perluasan kawasan tematik dilakukan secara simultan dengan perbaikan infrastruktur aksesibilitas, termasuk konektivitas pejalan kaki, transportasi publik antar-klaster, serta sistem navigasi digital multilingual. Event pariwisata dengan skala internasional yang telah terbentuk pada tahun sebelumnya diperluas dalam format *co-creation* dengan komunitas lokal dan mitra global, memperkuat konsep *participatory tourism*. Upaya memperbesar pasar wisata bisnis (MICE) dilakukan dengan kampanye internasional melalui keikutsertaan pada *tradeshow* dan *sales mission* yang didukung oleh lembaga konvensi yang telah terbentuk.

Di sektor ekonomi kreatif, tahun 2028 menjadi masa percepatan ekspor produk kreatif ke dalam global *value chain* melalui kerja sama dengan platform digital internasional serta penguatan jejaring distribusi. Program dana abadi dan *matching fund* diperluas untuk menjangkau pelaku ekonomi kreatif berbasis komunitas. Program pelabelan produk asli Jakarta dan pemanfaatan karakter kota seperti Je-Ka-Te difokuskan untuk mendukung ekspansi merchandise dan souvenir Jakarta di pasar global. Sistem perizinan satu pintu untuk kegiatan kreatif disempurnakan agar lebih efisien, mendukung pertumbuhan acara lintas genre dan kolaborasi sektor swasta. Secara keseluruhan, tahun ini menjadi tahapan penguatan posisi Jakarta sebagai pemain aktif dalam ekosistem kreatif global melalui kemitraan strategis, digitalisasi promosi, dan penyaluran produk ke pasar dunia.

Strategi Tahap IV (2029): Integrasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Global

Value Chain

Tahun 2029 merupakan fase integratif, di mana seluruh aset, program, dan pelaku parekraf Jakarta dikaitkan dalam rantai nilai global yang berkelanjutan dan berbasis dampak. Strategi pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan keberlanjutan dan daya dukung destinasi melalui penerapan standar *Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)*, pemantauan dampak pariwisata, serta manajemen destinasi berbasis teknologi. Seluruh kawasan unggulan, termasuk Kepulauan Seribu, zona budaya dan destinasi wisata urban, ditargetkan memenuhi standar CHSE dan ramah lingkungan, didukung dengan sistem transportasi terpadu, fasilitas inklusif, dan *digital tourist pass* berbasis JakCard. Jakarta juga mengonsolidasikan posisinya sebagai kota penyelenggara *world-class events* melalui integrasi Jakarta Convention Bureau dalam agenda promosi global yang terkoordinasi.

Di sektor ekonomi kreatif, integrasi dilakukan melalui pembentukan ekosistem industri kreatif yang mendukung rantai nilai global, termasuk produksi konten, seni pertunjukan, dan kuliner. Kolaborasi internasional dalam bentuk *co-production* film, pameran seni internasional, dan ekspor produk digital (seperti desain dan *game*) difasilitasi oleh *Creative Economy Hub* Jakarta yang mulai beroperasi penuh. Pemerintah juga memfokuskan pada penyediaan regulasi perlindungan HKI yang kuat dan dukungan fasilitasi ekspor produk kreatif. Kemitraan dengan sektor pendidikan dan pelatihan vokasional global diperluas untuk menciptakan SDM kreatif yang mampu bersaing secara internasional. Dengan demikian, 2029 menjadi titik kritis penggabungan antara kualitas lokal dan konektivitas global dalam satu sistem parekraf Jakarta yang utuh dan kompetitif.

Strategi Tahap V (2030): Transformasi Ekosistem Global

Sebagai tahun terakhir dalam pentahapan Renstra, 2030 difokuskan pada transformasi menyeluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta menjadi sistem yang mandiri, adaptif, dan berdaya tahan tinggi terhadap dinamika global. Transformasi ini

ditandai dengan digitalisasi penuh layanan publik parekraf, penggunaan big data untuk *decision-making*, serta sistem integrasi pelaporan berbasis *outcome*. Peta digital destinasi, perizinan, event, dan pasar ekraf terhubung dalam satu platform. Kota Jakarta juga ditargetkan masuk dalam 50 besar kota global berdasarkan indeks internasional, menandai keberhasilan *repositioning* Jakarta dalam peta kota dunia.

Transformasi di sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui konvergensi antara pelaku lokal dengan ekosistem kreatif internasional. Ekspansi pasar produk kreatif berbasis budaya urban Jakarta seperti *fashion*, kuliner, film, dan animasi difasilitasi melalui aggregator digital dan insentif ekspor. Kota ini juga membentuk *Jakarta Creative Global Network* sebagai *platform* kolaborasi global yang mempertemukan kreator, investor, dan mitra dagang. Pada saat yang sama, sistem evaluasi dampak sosial-ekonomi budaya dari kegiatan parekraf diterapkan secara penuh, memastikan keberlanjutan dan keberpihakan pada pelaku kecil dan komunitas. Dengan transformasi ini, Jakarta menempatkan diri bukan sekadar sebagai kota tujuan, tetapi sebagai pusat inspirasi, inovasi, dan kolaborasi parekraf global yang berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai langkah konkret dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penyusunan arah kebijakan ini mengacu pada analisis kondisi eksisting, tantangan pembangunan, serta potensi Jakarta dalam konteks lokal, nasional, dan global. Setiap arah kebijakan dirancang untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi serta memandu perencanaan program dan kegiatan yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pariwisata dan keterhubungan pelaku ekonomi kreatif dengan pasar dan rantai nilai global.

Lebih lanjut, arah kebijakan ini dirumuskan secara selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2025–2029, khususnya terkait transformasi Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penyusunan arah kebijakan juga merujuk pada peta jalan “*Jakarta RISE: Pathway to Jakarta Global City*” yang menjadi panduan strategis dalam membangun posisi Jakarta sebagai destinasi unggulan dunia dan pusat ekosistem ekonomi kreatif. Arah kebijakan juga menerapkan prinsip lintas-isu berupa Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (P3D) serta Pengarusutamaan Gender (PUG), melalui desain destinasi, *venue*, layanan, *Tourist Information Center* yang ramah disabilitas; serta perencanaan dan penganggaran responsif gender (*Gender-Responsive Planning and Budgeting/GRPB*) dengan pencatatan partisipasi terpisah menurut jenis kelamin (laki-laki/perempuan) pada seluruh kegiatan dan *event* guna memastikan keterjangkauan, partisipasi, dan manfaat yang setara.

Dengan pendekatan bertahap selama lima tahun, arah kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam transformasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menuju tatanan baru yang inklusif, adaptif, dan berorientasi global.

Arah Kebijakan: Kebijakan Konvergensi dan Digitalisasi Berbasis Identitas Kota

Strategi kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang adaptif, integratif, dan berbasis bukti, dengan menempatkan identitas kota sebagai landasan pembangunan jangka menengah. Untuk menghadapi tantangan transformasi global, strategi ini menekankan pentingnya policy convergence antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang selama ini berjalan terpisah. Melalui pendekatan berbasis *creative tourism*, regulasi didorong untuk membentuk kerangka integratif, seperti *creative zoning* (distrik kreatif), insentif untuk kegiatan kreatif, serta pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, narasi kota global—Jakarta sebagai kota kreatif, terkoneksi, dan multikultural—ditransformasikan menjadi kerangka normatif yang menjiwai kebijakan sektoral, termasuk dalam bentuk *storytelling* kawasan dan penyelarasan dengan standar global.

Arah Kebijakan: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta diarahkan untuk membentuk talenta yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan industri global dan era digital. Fokus utama strategi ini adalah memperkuat kapasitas individu melalui pendekatan *lifelong learning, skills anticipation*, dan pelatihan berbasis kebutuhan industri (*industry-led training*). Program peningkatan kompetensi akan disusun secara terstruktur dan berjenjang, dengan kurikulum yang meliputi keterampilan seperti *hospitality excellence, digital customer journey, service design thinking, hingga creative entrepreneurship*.

Sertifikasi menjadi instrumen kunci dalam strategi ini, dengan mendorong adopsi skema sertifikasi nasional dan internasional, seperti CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*), ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA), dan sertifikasi profesi di bidang ekraf seperti desain, musik, film, serta kewirausahaan kreatif. Kolaborasi dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), lembaga pelatihan, dan mitra industri akan difasilitasi untuk menjamin akuntabilitas dan keterukuran kompetensi.

Selain pelatihan teknis, arah kebijakan ini menekankan pentingnya penguasaan *soft skills, digital literacy*, bahasa asing, serta pemahaman tentang *intellectual property* sebagai bekal utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ingin menembus pasar global. Untuk itu, ekosistem pendukung seperti *internship, residensi kreatif, mentoring, dan magang industri* akan diperkuat, termasuk melalui skema pertukaran dan jejaring internasional (*global talent mobility*).

Arah Kebijakan: Optimalisasi Pembiayaan Inovatif dan Berbasis Kinerja untuk Penguatan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan pada aspek anggaran dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta diarahkan untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan, inovatif, dan berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendekatan utama dalam kebijakan ini adalah penguatan *budget tagging* tematik untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perencanaan dan penganggaran daerah, guna memastikan keterpaduan antara alokasi anggaran dan prioritas strategis. Pengembangan pendekatan *value for money* dan *outcome-based budgeting* menjadi krusial agar setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak terhadap peningkatan kualitas destinasi, pertumbuhan ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas sumber pembiayaan melalui skema *blended financing*, *public-private partnership* (PPP), dan penguatan peran dana CSR serta filantropi untuk mendukung ekosistem kreatif dan destinasi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini juga mencakup pengembangan instrumen pendanaan kreatif seperti *creative economy fund*, dan *matching fund* bagi pelaku ekraf dan pengelola destinasi wisata yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Di sisi lain, peran belanja publik akan diarahkan untuk menciptakan *crowding-in effect* yang mendorong partisipasi pelaku usaha dan investasi swasta, khususnya pada infrastruktur kreatif, penyelenggaraan event strategis, dan promosi digital global. Dengan demikian, pendekatan anggaran dalam kebijakan ini tidak semata berfungsi administratif, tetapi menjadi instrumen pembangunan sektoral yang strategis, kolaboratif, dan berorientasi hasil dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang unggul dalam pariwisata dan ekonomi kreatif.

Arah Kebijakan: Tata Kelola dan Kelembagaan: Kolaborasi Multi-Level dan Penguatan Kelembagaan

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran strategis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan tata kelola dan kelembagaan menjadi elemen fundamental dalam menghadapi kompleksitas isu, dinamika aktor, serta kebutuhan akan pendekatan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun sistem kelembagaan yang adaptif dan inklusif melalui reformulasi peran kelembagaan, transformasi tata kelola berbasis data dan digitalisasi, serta penguatan fungsi koordinatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan utama dalam strategi ini adalah penguatan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai embrio dari *Destination Management Organization* (DMO) yang berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana teknis tetapi juga sebagai *destination steward* yang mengelola atraksi, mengorkestrasi pemangku kepentingan lokal, serta menjamin keberlanjutan dan kualitas destinasi. Dalam konteks ekonomi kreatif, pengembangan *Creative Economy Hub* juga menjadi prioritas, yaitu pusat fasilitasi, inkubasi, dan kolaborasi pelaku kreatif lintas subsektor, baik dari sisi bisnis, desain, maupun inovasi teknologi.

Untuk memastikan efektivitas pengelolaan lintas aktor dan lintas program, strategi ini mengintegrasikan pendekatan kolaborasi multipihak berbasis prinsip *Collaborative Governance* dan model *Pentahelix*, yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Peta kolaborasi Disparekraf dapat dikembangkan melalui inisiatif Jaringan Pembangunan Parekraf DKI Jakarta yang dibagi dalam enam kelompok aktor: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Akademisi, dan Media. Melalui pendekatan ini, berbagai model sinergi dapat difasilitasi seperti *joint task force* untuk event besar, *resource sharing partnership* dalam hal data dan infrastruktur, serta *cross-sector working group* untuk isu strategis seperti *smart tourism*, *creative ecosystem*, dan *sustainable destination development*. Selain itu, kebijakan ini mendorong *joint planning, implementation, and budgeting* antara OPD

dan mitra terkait, serta pemanfaatan teknologi kolaboratif digital guna meningkatkan efektivitas koordinasi. Kemampuan Disparekraf dalam mengelola relasi antar aktor—baik vertikal maupun horizontal—serta membangun kualitas *engagement* yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk tata kelola kolaboratif yang berdampak dan resilient menuju Jakarta sebagai kota global di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Arah Kebijakan: Pariwisata Inklusif & Berkelanjutan

Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak semata-mata mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, melainkan juga memastikan pemerataan manfaat bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pariwisata Jakarta diarahkan menjadi motor pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Pengembangan destinasi wisata diarahkan untuk memenuhi *standar quality tourism* dengan menekankan kelestarian budaya, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Melalui pemberdayaan komunitas, UMKM pariwisata, dan subsektor ekonomi kreatif, manfaat ekonomi diharapkan tersebar lebih merata. Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya aksesibilitas destinasi yang ramah bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Selaras dengan misi RPJMD 2025–2029, kebijakan ini juga menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif berskala lokal maupun internasional. Pengelolaan sampah, efisiensi energi, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi bagian dari standar operasional yang akan didorong secara konsisten. Regulasi, insentif, dan sertifikasi pariwisata hijau akan diperkuat agar dunia usaha lebih terarah dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Dengan arah kebijakan ini, Jakarta diharapkan mampu meneguhkan posisinya sebagai kota global yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga dihargai karena

komitmen terhadap inklusivitas sosial dan kelestarian lingkungan. Harmonisasi antara RPJPD, RPJMD, dan Jakarta *Rise #20* menjadi fondasi kuat agar pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas hidup warga sekaligus memperkuat daya saing kota di tingkat internasional.

Arah Kebijakan: Ekonomi Kreatif sebagai Pendorong Nilai Tambah dan Inovasi

Ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam transformasi Jakarta menuju kota global berkelas dunia. Dalam RPJPD 2025–2045, sektor ekonomi kreatif diproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu, RPJMD 2025–2029 menekankan pembangunan fondasi daya saing kota melalui penguatan sektor ekonomi inovatif, termasuk subsektor kreatif yang berorientasi pada nilai tambah dan inovasi. Sejalan dengan Peta Jalan Jakarta *Rise #20*, ekonomi kreatif menjadi instrumen strategis untuk memperkuat citra global Jakarta melalui produk dan karya yang unik, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ekonomi kreatif difokuskan pada pengembangan ekosistem yang mendorong inovasi, kreativitas, dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah perlu memfasilitasi inkubasi bisnis kreatif, memperluas akses pembiayaan, menyediakan ruang kreatif, serta meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan dukungan tersebut, pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar domestik dan internasional, serta menghasilkan karya yang mampu bersaing di tingkat global.

Selain itu, penyelenggaraan event kreatif, festival, dan pameran berskala internasional menjadi sarana penting untuk mempromosikan produk kreatif Jakarta sekaligus memperkuat *branding* kota. Event tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan transaksi ekonomi kreatif, tetapi juga memperluas jejaring global dan membuka peluang kolaborasi internasional. Arah kebijakan ini juga menekankan pentingnya integrasi digital, baik melalui *platform e-commerce*, promosi digital, maupun

pemanfaatan teknologi baru seperti AR/VR dan kecerdasan buatan untuk memperkaya pengalaman konsumen.

Dengan kebijakan yang terarah, ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Jakarta, tetapi juga menjadi sarana ekspresi budaya, inovasi, dan identitas kota di panggung global. Harmonisasi dengan RPJPD, RPJMD, dan Jakarta *Rise #20* akan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat kreativitas dunia, di mana karya anak bangsa dapat menjadi daya tarik internasional sekaligus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, ekonomi kreatif benar-benar berfungsi sebagai pendorong nilai tambah dan inovasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan arah kebijakan renstra Disparekraf yang mengacu pada RPJMD seperti pada tabel 20 berikut.

Tabel 20 Arah Kebijakan Renstra Disparekraf

Isu Strategis	Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra Disparekraf 2025–2029
Transformasi Jakarta menuju kota global	Transformasi Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan	Konvergensi & digitalisasi berbasis identitas kota; pengembangan <i>creative tourism</i> , <i>creative zoning</i> , perlindungan HKI, <i>storytelling</i> kota global
Daya saing SDM	Penguatan fondasi daya saing kota berbasis SDM unggul	Peningkatan kapasitas & kompetensi pelaku pariwisata & ekraf melalui lifelong learning, <i>industry-led training</i> , sertifikasi nasional/internasional, <i>global talent mobility</i>
Efisiensi dan efektivitas pembangunan	Pembangunan berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan kinerja pembangunan	Optimalisasi pembiayaan inovatif & berbasis kinerja (<i>budget tagging</i> tematik, <i>outcome-based budgeting</i> , <i>blended financing</i> , PPP, <i>creative economy fund</i>)

Isu Strategis	Arah Kebijakan RPJMD 2025–2029	Arah Kebijakan Renstra Disparekraf 2025–2029
Tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan adaptif	Kolaborasi multi-level & penguatan kelembagaan: UPT → DMO, <i>Creative Economy Hub</i> , <i>Collaborative Governance</i> , <i>Pentahelix</i> , <i>joint planning & budgeting</i>
Keberlanjutan dan inklusivitas	Pembangunan berkelanjutan dan inklusif	Pariwisata inklusif & berkelanjutan (aksesibilitas, pemberdayaan UMKM & komunitas, <i>green tourism</i> , pengelolaan sampah & energi, sertifikasi pariwisata hijau)
Pertumbuhan ekonomi inovatif	Penguatan sektor ekonomi inovatif sebagai motor pertumbuhan baru	Ekonomi kreatif sebagai pendorong nilai tambah & inovasi (inkubasi bisnis kreatif, pembiayaan, ruang kreatif, HKI, <i>event</i> kreatif internasional, integrasi digital AR/VR/AI)

3.5 Pohon Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menyusun pohon kinerja 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas kinerja daerah. Pohon kinerja ini memetakan hubungan sebab-akibat antara *output*, *outcome* menengah, hingga *outcome* akhir yang diharapkan, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi pembangunan daerah.



Figure 3 Pohon Kinerja Rencana Strategis Disparekraf DKI Jakarta Tahun 2025-2029

3.5.1. Pengelolaan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata

Upaya utama difokuskan pada pengelolaan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata di tingkat provinsi. Hal ini mencakup kegiatan pengelolaan objek wisata, pengembangan destinasi, serta penetapan dan pengawasan usaha pariwisata.

- *Immediate Outcome*: meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata serta kepatuhan pelaku usaha.
- Indikator Kinerja:
 1. Jumlah pengunjung event
 2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha
 3. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
 4. Nilai kepuasan objek wisata
 5. Jumlah usaha pariwisata yang memiliki perizinan

3.5.2. Pemasaran Pariwisata

Untuk memperluas pasar dan memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi unggulan, dilakukan strategi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri. Fokus diarahkan pada daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.

- *Intermediate Outcome*: meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata.
- Indikator Kinerja:
 1. Jumlah event MICE yang diadakan di Jakarta
 2. Jumlah pengunjung e-tourism
 3. Nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata DKI Jakarta
 4. Nilai potensi transaksi
 5. Jumlah konten promosi yang dipublikasikan

3.5.3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif ditempatkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem, penyediaan sarana kota kreatif, fasilitasi HKI, dan penyelenggaraan *event* kreatif.

- *Immediate Outcome*: meningkatnya pengalaman quality tourism dan daya saing ekonomi kreatif.
- *Final Outcome*: meningkatnya kontribusi serta nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
- Indikator Kinerja:
 1. Jumlah festival dan event internasional di Jakarta
 2. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif
 3. Jumlah pelaku ekraf yang mendapatkan fasilitasi HKI
 4. Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikaji dan dikembangkan
 5. Persentase proporsi PDRB sektor pariwisata
 6. Persentase proporsi PDRB sektor ekonomi kreatif
 7. Jumlah produk/jasa ekraf yang didaftarkan HKI
 8. Jumlah event kreatif
 9. Jumlah pelaku ekraf yang terlibat dalam event kreatif
 10. Jumlah wirausaha yang didampingi dan dipasarkan produknya
 11. Nilai potensi transaksi ekonomi kreatif

3.5.4. Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dinas juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

- *Immediate Outcome*: meningkatnya kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
- Indikator Kinerja:
 1. Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi
 2. Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya
 3. Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapatkan pengembangan kapasitas

3.5.5. Dukungan Manajemen dan Tata Kelola OPD

Sebagai fondasi pencapaian kinerja, dukungan administrasi dan tata kelola internal diperkuat melalui kepegawaian, perencanaan, penganggaran, administrasi umum, keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah.

- *Outcome*: meningkatnya daya penunjang urusan pemerintahan daerah.
- Indikator Kinerja:
 1. Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian
 2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan tepat waktu
 3. Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum
 4. Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan
 5. Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah
 6. Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah
 7. Indeks kepuasan terhadap layanan penunjang urusan pemerintahan daerah

3.5.6 Kesimpulan

Pohon kinerja ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta tidak hanya diukur dari kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga dari mutu pengalaman wisata, kepuasan masyarakat, kontribusi sektor kreatif terhadap PDRB, perlindungan kekayaan intelektual, serta kompetensi sumber daya manusia. Seluruh kinerja tersebut ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

BAB IV



PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan telah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disesuaikan dengan pemutakhiran tahun 2025.

Dokumen ini memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2025–2030, yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target kinerja sekaligus memastikan kesinambungan perencanaan dalam penyusunan Renja hingga tahun 2030.

Tabel 21 Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis Disparekraf Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
NSPK	T1 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Mengembangkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkebudayaan yang Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi				T1 1) Persentase Proporsi PDRB Sektor Pariwisata 2) Persentase Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta
		S1.1 Meningkatkan Kualitas Pengalaman Pariwisata dan Daya Saing Ekonomi Kreatif Kota yang Berbasis Kebudayaan	Prog.1 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			S1.1 1) Jumlah Festival dan Event Internasional di Jakarta 2) Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif
						Prog.1 1) Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 2) Nilai Kepuasan Objek Wisata 3) Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan
				Keg.1.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Keg.1.1 Jumlah Pengunjung Event
					Subkeg.1.1.1 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Subkeg.1.1.1 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Subkeg.1.1.2 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Subkeg.1.1.2 Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif						Wisata Provinsi yang Sah dan Legal Ditetapkan Kepala Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				Keg.1.2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Keg.1.2 1) Nilai Kepuasan Pengunjung Tourist Information Center (TIC) 2) Jumlah Lokasi Destinasi yang Dikaji dan Dikembangkan 3) Jumlah Lokasi Destinasi yang Terkelola dengan Baik
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029					Subkeg.1.2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Subkeg.1.2.1 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang					Subkeg.1.2.2 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Subkeg.1.2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara
				Keg.1.3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas		Subkeg.1.2.3 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Keg.1.3 Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha
					Subkeg.1.3.1	Subkeg.1.3.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 9. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (dua Puluh) Besar Kota Global Dunia 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta				Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Subkeg.1.3.2 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Subkeg.1.3.3 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Usaha yang Dibina dan Diawasi Subkeg.1.3.2 Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) Subkeg.1.3.3 Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Ditingkat Provinsi
			Prog.2 Pemasaran Pariwisata			Prog.2 1) Jumlah Event MICE yang Diadakan di Jakarta 2) Jumlah Pengunjung <i>E-tourism</i>
				Keg.2.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Keg.2.1 1) Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta 2) Nilai Potensi Transaksi 3) Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan
					Subkeg.2.1.1 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	Subkeg.2.1.1 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta					Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Subkeg.2.1.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Subkeg.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Subkeg.2.1.2 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Subkeg.2.1.3 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
14. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2025–2029			Prog.3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			Prog.3 1) Jumlah Event Kreatif 2) Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Sasaran 2.1.c Hadirnya Kota Destinasi Dunia dengan Ragam Amenitas dan				Keg.3.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Keg.3.1 1) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlibat Event Kreatif 2) Jumlah Wirausaha yang Didampingi dan Dipasarkan Produknya 3) Nilai Potensi Transaksi Ekonomi Kreatif
					Subkeg.3.1.1	Subkeg.3.1.1

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
Aktivitas yang Menarik					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
					Subkeg.3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Subkeg.3.1.2 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
					Subkeg.3.1.3 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Subkeg.3.1.3 Jumlah Dokumen Promosi yang Dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik
				Keg.3.2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Keg.3.2 1) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 2) Jumlah Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikaji dan Dikembangkan
					Subkeg.3.2.1 Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	Subkeg.3.2.1 Jumlah Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Subkeg.3.2.2 Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Subkeg.3.2.2 Jumlah Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual
					Subkeg.3.2.3 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Subkeg.3.2.3 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
			Prog.4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			Prog.4 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi
				Keg.4.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Keg.4.1 Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya
					Subkeg.4.1.1 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Subkeg.4.1.1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
					Subkeg.4.1.2 Pendampingan Penciptaan Produk Kreatif (inkubasi)	Subkeg.4.1.2 Jumlah Produk Kreatif
					Subkeg.4.1.3 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Subkeg.4.1.3 Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
						untuk Pengembangan Pariwisata
					Subkeg.4.1.4 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Subkeg.4.1.4 Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI
					Subkeg.4.1.5 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Subkeg.4.1.5 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
				Keg.4.2 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Keg.4.2 Jumlah Subsektor Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas
					Subkeg.4.2.1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Subkeg.4.2.1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
					Subkeg.4.2.2 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Subkeg.4.2.2 Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif
			Prog.5 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Prog.5 Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Keg.5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan		Keg.5.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Tepat Waktu
				Subkeg.5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkeg.5.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Keg.5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Keg.5.2 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan
				Subkeg.5.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkeg.5.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
				Subkeg.5.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkeg.5.2.2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Keg.5.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Keg.5.3 Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
				Subkeg.5.3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Subkeg.5.3.1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Subkeg.5.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Subkeg.5.3.2 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
				Subkeg.5.3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Subkeg.5.3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Keg.5.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Keg.5.4 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum
					Subkeg.5.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subkeg.5.4.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Subkeg.5.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkeg.5.4.2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Subkeg.5.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Subkeg.5.4.3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					Subkeg.5.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subkeg.5.4.4 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Subkeg.5.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subkeg.5.5.5 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Subkeg.5.5.6 Penyediaan Bahan/Material	Subkeg.5.5.6 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
					Subkeg.5.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subkeg.5.5.7 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Subkeg.5.5.8	Subkeg.5.5.8 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Subkeg.5.5.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkeg.5.5.9 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Keg.5.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg.5.5 Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien
					Subkeg.5.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkeg.5.5.1 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Subkeg.5.5.2 Pengadaan Mebel	Subkeg.5.5.2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Subkeg.5.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkeg.5.5.3 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
					Subkeg.5.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subkeg.5.5.4 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
					Subkeg.5.5.5	Subkeg.5.5.5 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Keg.5.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg.5.6 Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Subkeg.5.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkeg.5.6.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Subkeg.5.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkeg.5.6.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Subkeg.5.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subkeg.5.6.3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Kegiatan 5.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg.5.7 Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Subkeg.5.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkeg.5.7.1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
					Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
				Subkeg.5.7.2 Pemeliharaan Mebel	Subkeg.5.7.2 Jumlah Mebel yang Dipelihara	
				Subkeg.5.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkeg.5.7.3 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
				Subkeg.5.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subkeg.5.7.4 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
				Subkeg.5.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subkeg.5.7.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	
				Subkeg.5.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subkeg.5.7.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

4.1 Uraian Program

Program 1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Sasaran: Meningkatnya Minat Kunjungan Wisatawan ke Jakarta

Indikator Sasaran:

- 1) Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
- 2) Nilai Kepuasan Objek Wisata
- 3) Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan

Program ini secara langsung memperkuat “daya tarik kota” dengan memperbaiki kualitas pengalaman kunjungan pada objek-objek wisata berbasis kebudayaan Jakarta (warisan sejarah, seni pertunjukan, kuliner, dan tradisi lokal). Peningkatan mutu layanan, interpretasi budaya, aksesibilitas, serta pengelolaan destinasi mendorong wisata yang autentik dan berkelanjutan. Pertumbuhan kunjungan, kepuasan objek wisata, serta kepatuhan perizinan pelaku usaha menjadi bukti terukurnya daya tarik yang berlandaskan kebudayaan sekaligus menjaga standar layanan dan keberlanjutan.

Program 2. Pemasaran Pariwisata

Sasaran: Meningkatnya Jumlah Wisatawan melalui Penyelenggaraan Event MICE yang Berkualitas dan Penyebaran Informasi Pariwisata yang Tepat Sasaran

Indikator Sasaran:

- 1) Jumlah Event MICE yang Diadakan di Jakarta
- 2) Jumlah Pengunjung E-Tourism

Program ini menempatkan identitas budaya Jakarta sebagai proposisi nilai dalam kampanye dan kurasi event MICE. Promosi yang menonjolkan kekayaan budaya (tema, venue, kurasi konten) akan meningkatkan citra kota dan menarik segmen wisatawan berkualitas. Skala dan kualitas event MICE serta pertumbuhan kanal *e-tourism* menunjukkan jangkauan dan efektivitas pemasaran berbasis kebudayaan yang memperkuat daya tarik destinasi.

Program 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sasaran: Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif dan Subsektor Ekonomi Kreatif yang Mendapat Manfaat dan Dukungan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Indikator Sasaran:

- 1) Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
- 2) Jumlah Event Kreatif

Perlindungan HKI dan penguatan event kreatif memastikan ekspresi budaya Jakarta (desain, musik, kuliner, fesyen, film, dll.) diolah menjadi pengalaman wisata yang khas, bernilai ekonomi, serta terlindungi. Produk kreatif yang terlindungi dan event kreatif yang tumbuh memperkaya atraksi kota dan mempertegas positioning Jakarta sebagai kota kreatif.

Program 4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran: Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator Sasaran:

- 1) Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi SDM—pemandu wisata, pengelola destinasi, kurator budaya, pelaku MICE—menentukan kualitas pengalaman yang menghormati nilai budaya. Sertifikasi menjamin standar layanan, interpretasi budaya yang tepat, dan etika pengelolaan warisan, sehingga meningkatkan daya tarik sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal.

Program 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran: Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pengelolaan Kantor dalam rangka Pelayanan Prima

Indikator:

- 1) Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan tata kelola internal (perencanaan, keuangan, pengadaan, layanan umum) memastikan eksekusi program pariwisata dan ekonomi kreatif berjalan efektif-tepat waktu. Kinerja penunjang yang baik mempercepat implementasi kebijakan dan layanan publik yang konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik kota melalui penyelenggaraan layanan pariwisata yang andal.

Tabel 22 Program dan Target Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Metadata Indikator	Target Renstra	Satuan	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	
Meningkatkan Daya Tarik Kota sebagai Destinasi Wisata yang Berlandaskan Kebudayaan	Jumlah Festival dan Event Internasional di DKI Jakarta	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Minat Kunjungan Wisatawan ke Jakarta	1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	DO: Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara yang menginap selama 1 malam dalam 1 tahun Metode Pengukuran: Jumlah kunjungan wisman yang menginap selama 1 malam pada tahun berjalan dibagi jumlah kunjungan wisman yang menginap selama 1 malam pada tahun sebelumnya	10,76%	Persen	-	49,297,855,525	1,25%	50,944,843,262	23,65%	51,954,308,746	15,98%	53,778,246,542	13,9%	54,459,038,457	10,76%	- Kabid PA - Kasudin 6 wilayah - Ka. UP AGW - Ka. UPK Monas - Ka. UPK. Kota Tua - Kabid IP
									86,65	#REF!	87	#REF!	88	#REF!	89	#REF!	90	#REF!	
									10,000	Usaha Pariwisata	20,882	5,771,988,028	2,000	6,060,587,429	2,000	6,413,616,801	2,000	6,884,297,641	2,000

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Metadata Indikator	Target Renstra	Satuan	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
					1. Jumlah Event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang Diadakan di Jakarta	148	Event	15	29,122,410,583	24	30,680,446,235	28	32,166,575,182	30	32,927,221,239	32	34,176,131,325	34	-Kabid PA -Kasudin 6 Wilayah
					Metode Pengukuran: Facilitasi penyelenggaraan event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) di Jakarta oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
					2. Jumlah Pengunjung E-Tourism	250,252,365	Pengunjung Website dan Medsos	33.876.617	6,604,642,842	40,990,707	6,934,874,984	45,089,778	7,281,618,733	49,598,755	7,645,699,669	54,558,631	8,027,984,653	60,014,494	-Kabid Datin Bangdes -Ka. UP P4EK -Ka. UP AGW -Ka. UPK Monas dan Kotatua -Kasudin 6 Wilayah
Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif dan Subsektor Ekonomi Kreatif yang Mendapat Manfaat dan Dukungan Pengembangan Ekonomi kreatif	1. Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didapatkan Kekayaan Intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	DO: Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	1,500	Produk	300	662,204,280	300	695,314,494	300	730,080,219	300	766,584,230	300	804,913,441	300	-Kabid Ekraf -Kasudin 6 Wilayah	

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Metadata Indikator	Target Renstra	Satuan	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
				2. Jumlah Event Kreatif	DO: Jumlah event kreatif yang diselenggarakan di Jakarta dan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD	407	Event	-	27,336,274,768	75	28,703,088,507	80	30,438,242,933	82	31,510,155,079	84	32,841,553,843	86	-Kabid Ekraf -Kasudin 6 Wilayah
					Metode Pengukuran: Jumlah penyelenggaraan event ekonomi kreatif yang diselenggarakan maupun difasilitasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD dalam kurun waktu 1 tahun														
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	DO: Tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lulus sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui fasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Metode Pengukuran: Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lulus sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,500	Orang	4688	12,544,319,632	900	13,171,535,613	900	14,180,112,395	900	14,950,380,691	900	15,847,899,727	900	-Kabid Ekraf -Ka. UP P4EK -Kasudin 6 Wilayah

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Metadata Indikator	Target Renstra	Satuan	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Pengelolaan Kantor dalam rangka Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DO: Survey kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Metode Pengukuran: Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi: Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)	4	Indeks	4	208,982,227,812	4	210,463,055,836	4	215,388,086,185	4	220,511,817,135	4	226,359,138,801	4	-Sekdis -Ka. UP AGW -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kotatua -Ka. UP P4EK -Kasudin 6 Wilayah

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan 1.1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

Pengelolaan atraksi (aktivasi ruang budaya, kurasi program tematik, kalender festival) menjadikan pengalaman wisata lebih hidup dan khas Jakarta. Peningkatan pengunjung event mencerminkan keberhasilan mempertemukan unsur budaya dengan kebutuhan wisatawan, sehingga menguatkan daya tarik kota.

Indikator:

- 1) Jumlah Pengunjung *Event*

Kegiatan 1.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Penguatan layanan TIC, kajian/penataan lokasi, dan manajemen destinasi memastikan pengalaman yang informatif, nyaman, dan menghormati nilai budaya setempat. Kepuasan TIC dan peningkatan kualitas pengelolaan destinasi menunjukkan perbaikan nyata pada daya tarik berbasis kebudayaan.

Indikator:

- 1) Nilai Kepuasan Pengunjung *Tourist Information Center* (TIC)
- 2) Jumlah Lokasi Destinasi yang Dikaji dan Dikembangkan
- 3) Jumlah Lokasi Destinasi yang Terkelola dengan Baik

Kegiatan 1.3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Kepatuhan perizinan meningkatkan standar layanan, keamanan, dan akuntabilitas pelaku usaha. Lingkungan usaha yang tertib dan berizin menambah kepercayaan wisatawan serta menjaga praktik yang menghormati kebudayaan.

Indikator:

- 1) Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha

Kegiatan 2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Pemasaran pariwisata yang menonjolkan narasi budaya (*heritage*, seni, kuliner, *urban culture*) meningkatkan ketertarikan dan transaksi wisata. Promosi tepat sasaran memperkuat citra Jakarta sebagai destinasi yang unik dan berlandaskan kebudayaan. Promosi pemasaran, produksi dan distribusi konten promosi berkolaborasi dengan *stakeholder* dan *influencer* yang menekankan kekhasan budaya Jakarta, memperluas jangkauan pesan, memperkuat *brand* kota, menginformasikan *event* serta destinasi wisata di Jakarta dan mendorong minat kunjungan wisatawan. Volume konten mencerminkan intensitas eksposur budaya ke pasar.

Indikator:

- 1) Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta
- 2) Nilai Potensi Transaksi
- 3) Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan

Kegiatan 3.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

Fasilitas kota kreatif (ruang pamer, pasar kreatif, studio, dan dukungan event) memperluas ruang ekspresi budaya dan menambah atraksi wisata. Keterlibatan pelaku dan nilai transaksi menunjukkan budaya hidup yang menjadi magnet destinasi.

Indikator:

- 1) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlibat Event Kreatif
- 2) Jumlah Wirausaha yang Didampingi dan Dipasarkan Produknya
- 3) Nilai Potensi Transaksi Ekonomi Kreatif

Kegiatan 3.2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Fasilitasi HKI dan pengembangan subsektor memperkuat keaslian dan nilai tambah produk budaya lokal sehingga dapat dikomersialisasikan. Ekosistem yang terlindungi mendorong inovasi serta kontinuitas konten budaya yang menjadi pilar penting daya tarik kota.

Indikator:

- 1) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Fasilitasi HKI
- 2) Jumlah Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikaji dan Dikembangkan

Kegiatan 4.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

Peningkatan kapasitas tingkat lanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi bagi pengelola destinasi, *event*, serta pelaku usaha parekraf. Intervensi ini memastikan pemanfaatan sarana–prasarana kota kreatif lebih optimal, dengan standar layanan, keselamatan, dan kepatuhan yang terjaga. Dampaknya tercermin pada profesionalisme pelaksana, pengalaman pengunjung yang membaik, dan meningkatnya potensi transaksi.

Indikator:

- 1) Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Kegiatan 4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pengembangan kapasitas per subsektor melalui inkubasi/akselerasi, klinik HKI, serta pendampingan *product-market fit* dan *go-to-market*. Intervensi ini menghasilkan karya/produk ber-HKI yang lebih siap pasar, dengan peningkatan kualitas desain, kemasan, dan saluran distribusi. Dampaknya terlihat pada bertambahnya keterlibatan pelaku dalam event kreatif dan meningkatnya nilai potensi transaksi ekonomi kreatif.

Indikator:

- 1) Jumlah Subsektor Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas

Kegiatan 5.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan-tepat-waktu memungkinkan program pariwisata berbasis budaya dieksekusi selaras kalender *event* dan musim kunjungan, sehingga dampak pada daya tarik kota lebih maksimal.

Indikator:

- 1) Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu

Kegiatan 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan yang tertib memastikan pendanaan program pariwisata dan ekonomi kreatif berjalan efektif, sehingga mendukung kesinambungan *event* dan layanan destinasi.

Indikator:

- 1) Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan

Kegiatan 5.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Manajemen SDM yang baik menjaga ketersediaan dan kinerja petugas layanan pariwisata/ekraf, sehingga mutu pelayanan tetap konsisten.

Indikator:

- 1) Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian

Kegiatan 5.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dukungan administrasi umum (surat-menurut, logistik, sekretariat) memperlancar koordinasi lintas pihak pada penyelenggaraan *event* budaya dan pengelolaan destinasi.

Indikator:

- 1) Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum

Kegiatan 5.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Pengadaan yang tepat mutu/waktu menyediakan peralatan penunjang dalam mendukung promosi, infrastruktur TIC, perlengkapan event budaya, dan sarana pengunjung, sehingga semua menopang pengalaman wisata yang menarik.

Indikator:

- 1) Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien

Kegiatan 5.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator:

- 1) Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jasa penunjang (kebersihan, keamanan, TIK, transportasi internal, dokumentasi) memastikan penyelenggaraan layanan dan event budaya berjalan lancar dan berkelas, serta meningkatkan citra destinasi.

Kegiatan 5.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator:

- 1) Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan aset menjamin kelayakan sarpras destinasi, TIC, ruang kreatif, dan fasilitas event. Keandalan aset meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung yang merupakan inti dari daya tarik destinasi yang berkelanjutan dan berbasis kebudayaan.

Tabel 23 Kegiatan dan Target Kinerja

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Metadata Indikator	Satuan	Anggaran Indikatif	Kondisi Awal	Target Renstra	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengunjung Event	DO: Jumlah pengunjung event yang diselenggarakan, difasilitasi, maupun diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD Metode Pengukuran: Jumlah festival dan event sejenisnya yang diselenggarakan, diberi dukungan, maupun event dari luar yang diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	260,434,292,532	1,316,537	13,980,817	49,297,855,525	2,435,200	50,944,843,262	2,678,720	51,954,308,746	2,812,656	53,778,246,542	2,953,289	54,459,038,457	3,100,953	-Kabid PA -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW -Ka. UPK Monas - Ka UPK Kota Tua
Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Nilai Kepuasan Pengunjung Tourist Information Center (TIC)	Nilai Kepuasan Pengunjung Tourist Information Center (TIC)	DO: Nilai persepsi pengunjung terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh TIC yang beroperasi di Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdama Kusuma, Gambir, Kota Tua, Monas, Jakarta Theater, Bali, dan TIC Metode Pengukuran: Survey terhadap nilai persepsi atas kualitas layanan TIC	Nilai	13,150,381,834	-	84	2,379,887,698	80	2,498,882,082	81	2,623,826,187	82	2,755,017,496	83	2,892,768,371	84	-Kabid Datin Bangdes
		Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata yang Dikaji dan Dikembangkan	Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata yang Dikaji dan Dikembangkan	DO: Jumlah destinasi (objek wisata, kawasan, lokasi strategis, dan sarana prasarana pendukung) yang dikaji potensi sebagai dasar perencanaan pengembangan Metode Pengukuran: Destinasi pariwisata yang telah dikaji dan direkomendasikan dengan kegiatan pengembangan	Lokasi	20,509,167,740	5	10	1,051,441,483	2	4,576,572,897	2	4,655,401,542	2	4,988,171,619	2	5,237,580,199	2	- Kabid Datin Bangdes - Kasudin. P1000 - Ka. UP AGW - Ka. UPK Monas - Ka. UPK Kota Tua
		Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata yang Terkelola dengan Baik	DO: Lokasi pariwisata di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD yang sarana dan prasaranaanya terkelola dengan baik Metode Pengukuran: Pengelolaan sarana dan prasarana destinasi yang memenuhi 80% dari daftar rencana pengelolaan maka dinilai terkelola dengan baik	Lokasi	37,265,299,941	3	3	6,931,954,596	3	7,278,552,327	3	7,392,479,942	3	7,762,103,940	3	7,900,209,136	3	- Ka. UP AGW - Ka. UPK Monas - Ka. UPK Kota Tua
Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Penetapan Tanda Daftar Usaha	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha	DO: Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan	Persen	32,359,002,423	-	90%	5,771,988,028	86%	6,060,587,429	87%	6,413,616,801	88%	6,884,297,641	89%	7,228,512,524	90%	-Kabid IP -Kasudin 6 Wilayah	

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Metadata Indikator	Satuan	Anggaran Indikatif	Kondisi Awal	Target Renstra	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
		Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		operasional usaha pariwisata sesuai peraturan perundangan Metode Pengukuran: Realisasi Persentase jumlah pelaku usaha yang patuh terhadap jumlah pelaku usaha yang terdaftar di OSS berdasarkan Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian															
Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang Diselenggarakan Di Jakarta yang Difasilitasi Oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta	DO: Tingkat ketertarikan, minat, dan partisipasi masyarakat terhadap aktivitas pariwisata di DKI Jakarta tidak berbatas pada event, publikasi pada media digital, serta produk promosi pariwisata lainnya di DKI Jakarta Metode pengukuran: Survei kepada masyarakat terhadap event, interaksi media sosial, kunjungan website resmi pariwisata Jakarta, dan lain-lain	Nilai	112,174,669,541	87,78	90	20,639,050,432	88	21,771,002,955	88,5	22,809,553,102	89	23,100,030,758	89,5	23,855,032,294	90	-Kabid PA -Kabid Datin Bangdes -Kasudin 6 Wilayah
				Nilai Potensi Transaksi	Rupiah	46,898,115,023	150 M	600 M	8,483,360,151	100 M	8,909,443,280	110 M	9,357,022,080	120 M	9,827,190,481	130 M	10,321,099,031	140 M	-Kabid PA
Jumlah Pengunjung E-Tourism	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan	DO: Jumlah konten promosi baik pada media cetak, elektronik, dan media lainnya yang dipublikasikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD Metode Pengukuran: Jumlah konten promosi baik pada media cetak, elektronik, dan media lainnya yang	Konten	36,494,820,881	2,092	17,682	6,604,642,842	3,200	6,934,874,984	3,360	7,281,618,733	3,528	7,645,699,669	3,704	8,027,984,653	3,890	-Kebid Ekraf -Kabid Datin Bangdes -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW -Ka. P4Ekraf -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua	

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Metadata Indikator	Satuan	Anggaran Indikatif	Kondisi Awal	Target Renstra	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didafarkan Kekayaan Intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	DO: Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Metode Pengukuran: Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	3,659,096,664	473	2,500	662,204,280	500	695,314,494	500	730,080,219	500	766,584,230	500	804,913,441	500	-Kabid Ekraf
					Subsektor	13,571,450,524	3	10	2,380,488,297	2	2,499,512,712	2	2,724,488,347	2	2,910,712,765	2	3,056,248,403	2	- Kabid Datin Bangdes
	Jumlah Event Kreatif	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlibat Event Kreatif	DO: Individu atau unit usaha yang berpartisipasi aktif dalam event kreatif yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD Metode Pengukuran: Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tercatat mengikuti event kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif	63,745,814,025	992	5,000	11,673,312,984	1,000	12,256,978,633	1,000	12,869,827,565	1,000	13,263,318,943	1,000	13,682,375,900	1,000	-Kabid Ekraf -Kasudin 6 Wilayah
					Wirausaha	21,660,183,850	2,000	2,553	3,730,240,567	2,100	3,916,752,596	2,205	4,412,590,226	2,315	4,683,219,737	2,431	4,917,380,724	2,553	-Kabid Ekraf -Kasudin 6 Wilayah

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Metadata Indikator	Satuan	Anggaran Indikatif	Kondisi Awal	Target Renstra	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
			Nilai Potensi Transaksi Ekonomi Kreatif	DO: Besar nilai ekonomi yang berpotensi dihasilkan dari kegiatan pameran ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri yang tercermin dari komitmen transaksi antara pelaku ekonomi kreatif dengan konsumen atau mitra usaha Metode Pengukuran: Jumlah nilai komitmen (melalui formulir pencapaian transaksi) dari kegiatan event kreatif	Rupiah	65,423,317,255	-	850 M	11,932,721,217	150 M	12,529,357,278	160 M	13,155,825,142	170 M	13,563,616,399	180 M	14,241,797,219	190 M	
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaqa Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DO: Jumlah tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, maupun bentuk pembinaan lainnya yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Metode Pengukuran: Jumlah tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, maupun bentuk pembinaan lainnya yang diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan UKPD	Orang	63,500,913,190	2,720	9,000	10,948,425,683	2,250	11,975,890,842	2,250	12,799,685,385	2,250	13,500,932,331	2,250	14,275,978,949	2,250	-Kabid Ekraf -Kasudin 6 Wilayah -Ka. P4Ekraf
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Jumlah Subsektor Ekraf yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	DO: Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD Metode Pengukuran: Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD. Jenis subsektor tidak berulang pada tahun berikutnya	Subsektor	7,193,334,868	3	10	1,595,893,949	2	1,195,644,771	2	1,380,427,010	2	1,449,448,360	2	1,571,920,778	2	-Kasudin 6 Wilayah -Ka. P4Ekraf
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan	DO: Persentase penyelesaian dokumen perencanaan daerah (RKA/RKAP, DPA/DPPA)	Persen	669,148,539	100	100	87,842,147	100	92,234,255	100	96,845,968	100	101,688,266	100	290,537,903	100	Sekdis

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Metadata Indikator	Satuan	Anggaran Indikatif	Kondisi Awal	Target Renstra	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
	Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Tepat Waktu	sebagai bahan penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai waktu yang ditetapkan															
				Metode Pengukuran: Realisasi persentase penyelesaian dokumen perencanaan daerah (RKA/RKAP, DPA/DPPA) sebagai bahan penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai waktu yang ditetapkan															
				DO: Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)	Indeks	577,888,586,185	4	4	115,569,227,241	4	115,573,265,241	4	115,577,505,141	4	115,581,957,036	4	115,586,631,526	4	Sekdis -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW -Ka. P4Ekraf -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua
				Metode Pengukuran: Hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik).															
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		DO: Indeks kepuasan layanan administrasi keuangan berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)	Indeks	4,585,592,158	4	4	803,164,344	4	845,918,955	4	899,764,903	4	944,753,149	4	1,091,990,807	4	-Sekdis -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW -Ka. P4Ekraf -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua
				Metode Pengukuran: Hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)															
				DO: Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)															
				Metode Pengukuran: Hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)															
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian		DO: Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)	Indeks	4,585,592,158	4	4	803,164,344	4	845,918,955	4	899,764,903	4	944,753,149	4	1,091,990,807	4	-Sekdis -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW -Ka. P4Ekraf -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua
				Metode Pengukuran: Hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)															
				DO: Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai															
				Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	29,858,689,832	4	4	5,347,678,763	4	5,612,062,701	4	5,895,815,835	4	6,190,606,627	4	6,812,525,906	4	-Sekdis -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW -Ka. P4Ekraf

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Metadata Indikator	Satuan	Anggaran Indikatif	Kondisi Awal	Target Renstra	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab		
									Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output			
				persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)														-Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua			
				Metode Pengukuran: Hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)																	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	DO: Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)	Indeks	19,286,811,420	4	4	3,374,418,634	4	3,601,588,826	4	3,821,369,217	4	4,141,187,680	4	4,348,247,063	4	-Sekdis -Ka. UP AGW -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DO: Indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)	Indeks	420,568,862,043	4	4	78,656,111,629	4	79,390,011,550	4	83,274,461,178	4	87,438,184,237	4	91,810,093,449	4	-Sekdis -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	DO: Indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil survei kepuasan	Indeks	28,846,635,592	4	4	5,143,785,054	4	5,347,974,308	4	5,822,323,943	4	6,113,440,140	4	6,419,112,147	4	-Sekdis -Kasudin 6 Wilayah -Ka. UP AGW

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Metadata Indikator	Satuan	Anggaran Indikatif	Kondisi Awal	Target Renstra	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
		Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	pelayanan, dengan nilai perspektif: Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik) Metode Pengukuran: Hasil survei kepuasan pelayanan, dengan nilai perspektif: Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik)															-Ka. P4Ekraf -Ka. UPK Monas -Ka. UPK Kota Tua

4.3 Uraian Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Tabel 24 Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	DO: Jumlah lokasi daya tarik unggulan Provinsi DKI Jakarta yang dikembangkan melalui penyelenggaraan festival dan event sejenisnya. Lokasi yang dikembangkan pada satu tahun dapat dikembangkan lagi pada tahun selanjutnya dan dapat dihitung sebagai capaian target pada tahun yang berbeda Metode Pengukuran: Jumlah lokasi festival dan event sejenisnya yang diselenggarakan, diberi dukungan, maupun event dan luar yang diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD	259,606,667,064	175	28	49,148,076,173	35	50,787,574,942	35	51,789,177,010	35	53,604,858,220	35	54,276,980,719	35	-Bidang PA -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua
2	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang Sah dan Legal Ditetapkan Kepala Daerah	Dokumen	DO: Jumlah dokumen resmi perencanaan pengembangan daya tarik wisata di tingkat provinsi yang telah melalui proses penyusunan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibahas bersama pemangku kepentingan Metode Pengukuran: Jumlah dokumen rencana pengembangan daya tarik wisata	827,625,468	5	149,779,352	1	157,268,320	1	165,131,736	1	173,388,322	1	182,057,738	1	Bidang Datin Bangdes	
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	DO: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Metode Pengukuran: Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata	6,227,627,916	150	7	1,051,441,483	30	1,104,013,557	30	1,259,214,235	30	1,372,174,947	30	1,440,783,694	30	- Bidang Datin Bangdes - P1000 - UP AGW - UPK Monas - UPK Kota Tua
4	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	DO: Pengembangan destinasi pariwisata dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (3A). Tiga unsur tersebut perlu dipersiapkan untuk dapat mewujudkan destinasi pariwisata yang dapat memberi kenyamanan yang baik kepada wisatawan. Melalui penyediaan prasarana dan sarana diharapkan destinasi pariwisata dapat menjadi	50,415,681,775	15	28	9,311,842,294	15	9,777,434,409	15	10,016,306,129	15	10,517,121,436	15	10,792,977,507	15	- Bidang Datin Bangdes - P1000 - UP AGW - UPK Monas - UPK Kota Tua

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
					lebih berdaya saing dan dapat memperpanjang lama tinggal (length of stay) wisatawan dengan tetap mempertahankan karakter lokal dan mengutamakan kelestarian lingkungan														
					Metode Pengukuran: Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi pariwisata di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta jajaran yang disediakan dan dipelihara														
5	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	DO: Jumlah dokumen hasil perencanaan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.281.539.824	15	-		3	3.472.559.340	3	3.396.187.307	3	3.615.996.672	3	3.796.796.505	3	Bidang Datin Bangdes
6	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha yang Dibina dan Diawasi	Pelaku Usaha	DO: Jumlah usaha pariwisata yang telah dibina dan diawasi melalui aktivitas pengawasan industri pariwisata termasuk penunjangnya seperti pemberian penghargaan dan sebagainya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD	27.015.369.479	28.500	-	4.870.551.121	5.500	5.114.078.677	5.600	5.369.782.611	5.700	5.688.271.741	5.800	5.972.685.329	5.900	-Bidang IP -Sudin 6 Wilayah
7	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Unit Usaha	DO: Fasilitasi kegiatan pendampingan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Catatan: Sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2021 Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak lagi menjadi satu kewajiban diubah dengan izin Usaha	2.118.379.066	1.500	-	364.823.307	300	383.064.472	300	402.217.696	300	472.328.581	300	495.945.010	300	- Bidang IP
					Metode Pengukuran : Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi pendampingan penerbitan perizinan berusaha berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)														

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
8	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Ditingkat Provinsi	Dokumen	DO: Penyediaan layanan konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi Metode Pengukuran: Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	3.225.253.878	1.500	-	536.613.600	300	563.444.280	300	641.616.494	300	723.697.319	300	759.882.185	300	- Bidang IP
9	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui pariwisata melalui sarana dan prasarana yang dapat menjadi media komunikasi kepada publik. Sarana dan prasarana yang dimaksud termasuk duta wisata, souvenir, dan key opinion leader Metode Pengukuran: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penguatan promosi yang bertujuan untuk memperluas pasar pariwisata atau menguatkan brand pariwisata melalui sarana dan prasarana media komunikasi kepada public	Dokumen	DO: Aktivitas yang bertujuan memperluas pasar pariwisata atau menguatkan brand pariwisata melalui sarana dan prasarana yang dapat menjadi media komunikasi kepada publik. Sarana dan prasarana yang dimaksud termasuk duta wisata, souvenir, dan key opinion leader Metode Pengukuran: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penguatan promosi yang bertujuan untuk memperluas pasar pariwisata atau menguatkan brand pariwisata melalui sarana dan prasarana media komunikasi kepada public	145.690.536.698	405	29	26.780.179.947	81	28.219.188.945	81	29.480.148.392	81	30.054.155.812	81	31.156.863.602	81	-Bidang PA -Sudin 6 Wilayah
10	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	DO: Aktivitas yang bertujuan memperluas pasar pariwisata atau menguatkan brand pariwisata melalui pemberian fasilitas. Fasilitas yang dimaksud seperti pemberian insentif, pengikutsertaan pada pameran, dan sebagainya Metode Pengukuran: Jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	46.898.115.023	60	4	8.483.360.151	12	8.909.443.280	12	9.357.022.080	12	9.827.190.481	12	10.321.099.031	12	Bidang PA
11	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	DO: Monitoring memastikan kegiatan pemasaran pariwisata berjalan sesuai rencana dan efisien, sedangkan evaluasi menilai hasil serta dampaknya terhadap target dan indikator kinerja. Keduanya saling melengkapi untuk mengidentifikasi masalah, memberi umpan balik, dan menyusun strategi perbaikan. Dengan demikian, strategi pemasaran dapat dikelola secara adaptif dan berkelanjutan Metode Pengukuran: Jumlah dokumen penilaian hasil atas pemasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi	2.978.953.724	10	-	463.513.327	2	486.688.994	2	611.023.443	2	691.574.615	2	726.153.345	2	Bidang Datin Bangdes

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	
					Kreatif berseta UKPD yang diperoleh melalui hasil survei/Google Analytics pariwisata DKI Jakarta/data statistik pada media sosial yang dikelola atau metode lainnya														
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	DO: Keterlibatan lintas pelaku, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha (quadruple-helix) dalam berbagi tugas dan peran, sehingga menghasilkan upaya yang kolaboratif dan sinergis dalam penumbuhan/kembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi sebagai kunci utama pengembangan kota kreatif Metode Pengukuran: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif melalui keterlibatan dalam event ekonomi kreatif. Satu laporan mencerminkan satu event	63.745.814.025	175	18	11.673.312.984	35	12.256.978.633	35	12.869.827.565	35	13.263.318.943	35	13.682.375.900	35	-Bidang Ekraf -Sudin 6 Wilayah
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	DO: Keterlibatan lintas pelaku, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha (quadruple-helix) dalam berbagi tugas dan peran, sehingga menghasilkan adanya peningkatan usaha kreatif Metode Pengukuran: Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula dalam bentuk pendampingan dan pemasaran pengembangan kewirausahaan terpadu	21.660.183.850	110	4	3.730.240.567	22	3.916.752.596	22	4.412.590.226	22	4.683.219.737	22	4.917.380.724	22	-Bidang Ekraf
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Dokumen Promosi yang Dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	DO: Pelaksanaan perluasan akses pasar produk kreatif baik pasar ekspor dan pasar domestik Metode Pengukuran: Jumlah laporan pelaksanaan perluasan akses pasar produk kreatif baik pada pasar ekspor maupun pasar domestik oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui rancangan tidak terbatas pada pelaksanaan pameran, bazar, dan sebagainya	65.423.317.255	20	3	11.932.721.217,00	4	12.529.357.278	4	13.155.825.142	4	13.563.616.399	4	14.241.797.219	4	-Bidang Ekraf
15	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	DO: Pengembangan riset ekonomi kreatif berserta aktivitas pendukung riset oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.571.450.524	15	4	2.380.488.297	3	2.499.512.712	3	2.724.488.347	3	2.910.712.765	3	3.056.248.403	3	-Bidang Datin Bangdes

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
					Metode Pengukuran: Jumlah dokumen hasil pengembangan riset ekonomi kreatif beserta aktivitas pendukung														
16	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Produk	DO: Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pelindungan Hak Kekayaan Intelektual. Metode Pengukuran: Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	3.659.096.664	1.450	-	662.204.280	250	695.314.494	300	730.080.219	300	766.584.230	300	804.913.441	300	-Bidang Ekraf
17	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	DO: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata adalah kegiatan pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kepada para tenaga kerja bidang pariwisata dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata Metode Pengukuran : Jumlah orang yang mengikuti sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja bidang pariwisata melalui fasilitasi oleh Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.409.838.876	3.750	700	1.265.924.008	750	1.425.460.948	750	1.496.733.995	750	1.571.570.695	750	1.650.149.230	750	P4 Ekraf
18	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	DO: Kegiatan fasilitasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka akelerasi pertumbuhan ekonomi kreatif Metode Pengukuran: Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.095.019.678	10	1	5.267.562.331	2	3.416.364.339	2	3.587.182.556	2	3.816.541.684	2	4.007.368.768	2	-Bidang Ekraf
19	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Pendampingan Penciptaan Produk Kreatif (Inkubasi)	Jumlah Produk Kreatif	Produk	DO: Pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.832.082.978	1.500	-	0	300	1.727.036.800	300	1.913.388.640	300	2.020.320.750	300	2.171.336.788	300	-Bidang Ekraf

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
	Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				Metode Pengukuran : Jumlah SDM ekonomi kreatif yang kompetensinya dikembangkan melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
20	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Orang	DO: Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan Pariwisata. Pelatihan atau Bimtek diberikan kepada masyarakat di sekitar destinasi wisata dan desa wisata dengan muatan pengetahuan tentang pengembangan usaha Pariwisata Metode Pengukuran: Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	3.733.072.587	2.750	-	0	550	774.689.849	550	938.424.342	550	985.345.559	550	1.034.612.837	550	Sudin 6 Wilayah
21	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	DO: Pengembangan kapasitas SDM pelaku pariwisata dilaksanakan berdasarkan kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dimana kemampuan SDM dilihat berdasarkan pada Unit-unit Kompetensi yang dikuasainya. Pelatihan yang diberikan kepada setiap SDM berdasarkan pada unit-unit kompetensi, atau berdasarkan pada klaster (beberapa unit kompetensi dalam satu pelatihan) atau secara menyerupai satu kesatuan SKKNI (uraian nama 32 SKKNI dapat dilihat dalam Permen 1/2018). Jenis pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing Metode Pengukuran: Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kompetensi berbasis SKKNI bagi profesi tenaga kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi oleh Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20.208.987.671	3.750	700	3.454.447.624	750	3.875.650.949	750	4.069.433.497	750	4.272.905.171	750	4.536.550.430	750	P4 Ekraf
22	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	DO: Program pelatihan pelaku ekonomi kreatif berbasis kompetensi (17 subsektor ekraf, UU 24 tahun 2019) yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap	4.221.911.400	750	100	960.491.720	150	756.687.957	150	794.522.355	150	834.248.472	150	875.960.896	150	P4 Ekraf

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	Rp.	Output	
					<p>sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi (PBK) yang pelaksanaan sesuai dengan Permenaker No 8 Tahun 2014</p> <p>Metode Pengukuran: Jumlah SDM ekonomi kreatif yang kompetensinya dikembangkan melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>														
23	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	<p>DO: Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ekonomi kreatif, melalui Bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan wirausaha digital mandiri, untuk menciptakan SDM yang unggul, dan berdaya saing serta siap berwirausaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas luasnya</p> <p>Metode Pengukuran: Jumlah penghitungan peserta SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD</p>	5.820.487,764	2.750	570	1.298.231,949	550	946.189,105	550	1.118.498,560	550	1.174.423,488	550	1.283.144,662	550	Sudin 6 Wilayah
24	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	<p>DO: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif adalah kegiatan pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kepada para tenaga kerja bidang ekonomi kreatif dengan satuan orang oleh badan atau lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (mark). Berdasarkan NSPK Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan</p> <p>Metode Pengukuran: Jumlah</p>	1.372.847,104	750	100	297.662,000	150	249.455,666	150	261.928,450	150	275.024,872	150	288.776,116	150	P4 Ekraf

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
					orang yang mengikuti sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja bidang ekonomi kreatif melalui fasilitasi oleh Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	DO: Penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah untuk penyusunan, rencana kerja, rencana kerja perubahan dan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Metode Pengukuran: Realisasi penyelesaian jumlah perencanaan perangkat daerah (RKA/DPA dan RKAP/DPPA) yang disusun sesuai kaidah perencanaan Pembangunan	669.148.539	11	2	87.842.147	2	92.234.255	2	96.845.968	2	101.688.266	2	290.537.903	3	Sekdis
26	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	DO: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK Metode pengukuran: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	577.442.336.205	227	277	115.488.467.241	277	115.488.467.241	277	115.488.467.241	277	115.488.467.241	277	115.488.467.241	277	Sekdis
27	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	DO: Belanja atas pelaksanaan transaksi keuangan, antara lain biaya administrasi bank, biaya transfer, penyediaan buku cek/biliet giro, materai Metode pengukuran: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	446.249.980	220	9	80.760.000	44	84.798.000	44	89.037.900	44	93.499.795	44	98.164.285	44	Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -PAEkraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
28	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	DO: Pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan disiplin pegawai Metode pengukuran: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	58.602.159	1			0	13.596.394	1	14.276.214	0	14.990.025	0	15.739.526	0	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -PAEkraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
29	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	DO: Pengadaan pakaiian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi ASN petugas lapangan dan non ASN Metode pengukuran: Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.580.443.221	50	1	449.983.560	10	466.482.738	10	496.106.874	10	520.912.219	10	646.957.830	10	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -PAEkraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
30	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	DO: Penyelenggaran peningkatan kompetensi pegawai terkait dengan tugas dan fungsi teknis ursusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Metode pengukuran: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.946.546.778	500		353.180.784	100	365.839.823	100	389.381.815	100	408.850.905	100	429.293.451	100	Sekdis

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
31	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	DO: Belanja bahan/komponen/suku cadang instalasi listrik bangunan kantor dan aset Pemprov DKI Jakarta lainnya seperti kabel, lampu, saklar, stop kontak, dan sebagainya Metode Pengukuran: Jumlah paket bahan/komponen/suku cadang instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan seperti kabel, lampu, saklar, stop kontak, dan sebagainya	1.276.957.532	25	9	222.048.392	5	233.150.811	5	244.808.352	5	257.048.769	5	319.901.208	5	-Sekdis -P1000 -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua
32	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	DO: Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor untuk menunjang operasional kantor dan aktivitas lapangan seperti alat tulis kantor atau peralatan kerja lainnya Metode Pengukuran: Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor untuk menunjang operasional kantor dan aktivitas lapangan seperti alat tulis kantor atau peralatan kerja lainnya	6.775.053.427	55	19	1.217.065.186	11	1.277.918.446	11	1.341.814.368	11	1.408.905.086	11	1.529.350.341	11	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	DO: Penyediaan alat rumah tangga yang menunjang aktivitas kerumah tanggaan kantor seperti barang pakai habis kebersihan dan sebagainya Metode Pengukuran: Jumlah paket alat rumah tangga yang disediakan dalam rangka menunjang aktivitas kerumah tanggaan kantor seperti barang pakai habis kebersihan dan sebagainya	7.940.400.117	55	10	1.427.963.568	11	1.499.361.747	11	1.574.329.834	11	1.653.046.326	11	1.785.698.642	11	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
34	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	DO: Penyediaan : (1) makanan dan minuman tanpa undangan untuk petugas dengan jangka 24 jam (dengan surat tugas); (2) bahan logistik penunjang kantor seperti elpji, obat-obatan P3K, galon, teh, kopi, suplemen, hand sanitizer, dan sebagainya; dan (3) penyediaan tiket kapal wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu Metode Pengukuran: Jumlah paket belanja penyediaan bahan logistik penunjang kantor seperti elpji, obat-obatan P3K, galon, teh, kopi, suplemen, hand sanitizer, dan sebagainya	2.509.537.473	55	15	445.114.298	11	467.370.012	11	490.738.513	11	515.275.439	11	591.039.211	11	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
35	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	DO: Pembayaran biaya cetakan, penggandaan dokumen, dan kebutuhan barang cetakan Metode Pengukuran: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	558.299.340	55	5	91.989.370	11	96.588.839	11	101.418.281	11	106.489.195	11	161.813.655	11	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
36	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	DO: Penyediaan BBM untuk KDO, KDOK, pompa, genset, alat kerja, dan bahan habis pakai lainnya Metode Pengukuran: Jumlah paket penyediaan BBM untuk KDO, KDOK, pompa, genset, alat kerja, dan bahan habis pakai lainnya	4.279.758.823	560	23	765.479.750	112	803.753.737	112	843.941.423	112	886.138.494	112	980.445.419	112	-Sekdis -Sudin 5 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
37	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	DO: Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu (tanpa undangan) Metode Pengukuran: Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman untuk tamu (tanpa undangan)	1.499.541.181	220	2	269.680.000	44	280.164.000	44	297.322.200	44	312.188.310	44	340.186.671	44	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	DO: Penyediaan makanan dan minuman (dengan undangan) Metode Pengukuran: Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman (dengan undangan)	4.197.829.018	220	20	759.701.259	44	797.686.322	44	837.570.638	44	879.449.170	44	923.421.629	44	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
39	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	DO: Belanja terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Metode Pengukuran: Jumlah laporan belanja terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	821.312.921	220	2	148.636.940	44	156.068.787	44	163.872.226	44	172.065.838	44	180.669.130	44	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
40	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	DO: Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk menunjang operasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD Metode Pengukuran: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6.762.859.788	25	9	1.223.907.185	5	1.285.102.544	5	1.349.357.671	5	1.416.825.555	5	1.487.666.833	5	-UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua
41	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	DO: Pengadaan mebel untuk urusan kantor Metode Pengukuran: Jumlah penyediaan mebel baru untuk urusan kantor pada tahun berjalan	4.800.549.618	55		871.312.309	11	900.877.020	11	960.621.820	11	1.008.652.912	11	1.059.085.557	11	-Sekdis -P1000 -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
42	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	DO: Pengadaan aset pendukung gedung kantor dan aktivitas didalamnya seperti komputer, printer, scanner, CCTV, mesin potong rumput gedung kantor, dan	6.697.002.547	275	108	1.182.772.565	55	1.241.911.193	55	1.304.006.753	55	1.447.957.091	55	1.520.354.945	55	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4 Ekraf

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
	Pemerintah Daerah				sebagainya Metode Pengukuran: Jumlah aset pendukung gedung kantor dan aktivitas didalamnya seperti komputer, printer, scanner, CCTV, mesin potong rumput gedung kantor, dan sebagainya yang disediakan													-UPK Monas -UPK Kota Tua	
43	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	DO: Pengadaan sarana dan prasarana yang melekat pada gedung seperti: Mekanikal (lift, proteksi kebakaran, dll); Elektrikal (jaringan kelistrikan, trafo, genset gedung, dll); Plumbing (jaringan air bersih, jaringan air limbah, dll); Arsitektural seperti partisi ruangan, vertical blind, dan sebagainya yang terkait sarana dan prasarana ruangan Metode Pengukuran: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	391.081.770	25		0	5	72.450.165	5	101.072.674	5	106.126.308	5	111.432.623	5	-Sekdis -P1000 -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua
44	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	DO: Pengadaan sarana dan prasarana yang tidak melekat pada gedung seperti APAR, AC split, pompa air, dan sebagainya (kecuali pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP) Metode Pengukuran: Jumlah sarana dan prasarana yang tidak melekat pada gedung seperti APAR, AC split, pompa air, dan sebagainya yang disediakan	635.317.697	75	10	96.426.575	15	101.247.904	15	106.310.299	15	161.625.814	15	169.707.105	15	-Sekdis -P1000 -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua
45	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	DO: Penyediaan jasa layanan telepon, air, dan listrik (TALI) pada kantor dan taman Metode Pengukuran: Jumlah paket penyediaan jasa layanan telepon, air, dan listrik (TALI) pada kantor dan taman	73.112.347.896	300	5	13.334.805.743	60	13.715.499.470	60	14.611.274.443	60	15.341.838.166	60	16.108.930.074	60	-Sekdis -P1000 -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua
46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	DO: Pembayaran sewa mesin fotokopi Metode Pengukuran: Jumlah laporan penyediaan sewa mesin fotokopi	7.979.596.120	220	23	1.444.105.797	44	1.516.311.087	44	1.592.126.641	44	1.671.732.973	44	1.755.319.622	44	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -PA Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
47	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	DO: Penyedian tenaga kerja non ASN yang meliputi petugas penunjang operasional kantor, petugas keamanan, dan petugas kebersihan	339.476.918.027	600	33	63.877.200.089	120	64.158.200.993	120	67.071.060.094	120	70.424.613.098	120	73.945.843.753	120	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
					Metode Pengukuran: Jumlah laporan penyediaan tenaga kerja non ASN yang meliputi petugas penunjang operasional kantor, petugas keamanan, dan petugas kebersihan														
48	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	DO: Penyediaan jasa : (1) Pemeliharaan KDO/KDK, meliputi suku cadang, bahan, dan jasa pemeliharaan; (2) Biaya-biaya terkait Pajak Kendaraan Bermotor	3.401.629.375	635	83	603.155.861	127	623.313.654	127	689.979.337	127	724.478.304	127	760.702.219	127	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
49	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	DO: Pemeliharaan mebel untuk urusan kantor	296.550.074	110		38.834.490	22	40.776.215	22	68.815.026	22	72.255.777	22	75.868.566	22	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
50	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	DO: Pemeliharaan aset pendukung gedung kantor dan aktivitas didalamnya seperti komputer, printer, scanner, CCTV, mesin potong rumput gedung kantor, dan sebagainya	916.844.477	275	113	151.662.668	55	159.245.801	55	192.208.091	55	201.818.496	55	211.909.421	55	-Sekdis -Sudin 6 Wilayah -UP AGW -P4Ekraf -UPK Monas -UPK Kota Tua
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Reabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	DO: Penyediaan jasa pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran jasa perbaikan atau rehabilitasi gedung, penyediaan material pengganti, dan pembayaran jasa pengendalian hama gedung kantor	16.168.161.438	5	12	2.915.386.172	5	3.041.155.481	5	3.239.213.255	5	3.401.173.917	5	3.571.232.613	5	-Sekdis -P1000 -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua

No	Kegiatan	SubKegiatan	Indikator	Satuan	Metadata Indikator	Anggaran Indikatif	Target Renstra	Kondisi Awal	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
									Rp.	Output									
52	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	DO: Pemeliharaan sarana dan prasarana yang melekat pada gedung seperti: Mekanikal (lift, proteksi kebakaran, dll); Elektrikal (jaringan kelistrikan, trafo, genset gedung, dll); Plumbing (jaringan air bersih, jaringan air limbah, dll); Arsitektural seperti partisi ruangan, vertical blind, dan sebagainya yang terkait sarana dan prasarana ruangan Metode Pengukuran: Jumlah pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang melekat pada gedung seperti: Mekanikal (lift, proteksi kebakaran, dll); Elektrikal (jaringan kelistrikan, trafo, genset gedung, dll); Plumbing (jaringan air bersih, jaringan air limbah, dll); Arsitektural seperti partisi ruangan, vertical blind, dan sebagainya yang terkait sarana dan prasarana ruangan	1.306.351.633	25	7	222.696.571	5	230.831.400	5	270.522.970	5	284.049.118	5	298.251.574	5	-Sekdis -P1000 -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua
53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	DO: Pemeliharaan sarana dan prasarana yang tidak melekat pada gedung seperti APAR, AC split, pompa air, dan sebagainya (kecuali pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP) Metode Pengukuran: Jumlah sarana dan prasarana yang tidak melekat pada gedung seperti APAR, AC split, pompa air, dan sebagainya yang mendapatkan pemeliharaan	6.757.098.595	75	115	1.212.049.292	15	1.252.651.757	15	1.361.585.264	15	1.429.664.528	15	1.501.147.754	15	-Sekdis -P1000 -UP AGW -UPK Monas -UPK Kota Tua

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 25 Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Tujuan / Sasaran / Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				(1)
(2)	(3)	(4)	(5)	
2-1	Terbangunnya Pusat Ekonomi Dan Bisnis Yang Inovatif Dengan Prinsip Ekonomi Berkelanjutan			
2-1-3	Hadirnya Kota Destinasi Dunia Dengan Ragam Amenitas Dan Aktivitas Yang Menarik			
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya tarik Destinasi wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi - Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi - Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	

No	Tujuan / Sasaran / Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
			- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	
			- Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			- Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	
			- Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	
			- Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
			- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
			- Pendampingan Penciptaan Produk Kreatif (inkubasi)	
			- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			- Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
			- Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

No	Tujuan / Sasaran / Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui IKU

Tabel 26 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui IKU

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	N/A	1,25%	23,65%	15,98%	13,9%	10,76%	
2	Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata	Skor	86,65	87	88	89	90	91	
3	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Perizinan	Usaha Pariwisata	20.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	Jumlah Event MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang Diselenggarakan di Jakarta yang Difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta UKPD	Event	15	24	28	30	32	34	
5	Jumlah Pengunjung E-Tourism	Pengunjung Website dan Medsos	33.876.617	40.990.707	45.089.778	49.598.755	54.558.631	60.014.494	
6	Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	Produk/Jasa	300	300	300	300	300	300	
7	Jumlah Event Kreatif	Event		75	80	82	84	86	
8	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Orang	4.688	900	900	900	900	900	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK

Tabel 27 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui IKK

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Pengunjung Event	Orang	1,316,537	2,435,200	2,678,720	2,812,656	2,953,289	3,100,953	
2	Nilai Kepuasan Pengunjung <i>Tourist Information Center</i> (TIC)	Nilai	-	80	81	82	83	84	
3	Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata yang Dikaji Dan Dikembangkan	Lokasi	5	2	2	2	2	2	
4	Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata yang Terkelola Dengan Baik	Lokasi	3	3	3	3	3	3	
5	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha	Persen	-	86%	87%	88%	89%	90%	
6	Nilai Ketertarikan Masyarakat terhadap Pariwisata DKI Jakarta	Nilai	87,78	88	88,5	89	89,5	90	
7	Nilai Potensi Transaksi	Rupiah	150 M	100 M	110 M	120 M	130 M	140 M	
8	Jumlah Konten Promosi yang Dipublikasikan	Konten	2,092	3,200	3,360	3,528	3,704	3,890	
9	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terlibat Event Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif	900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

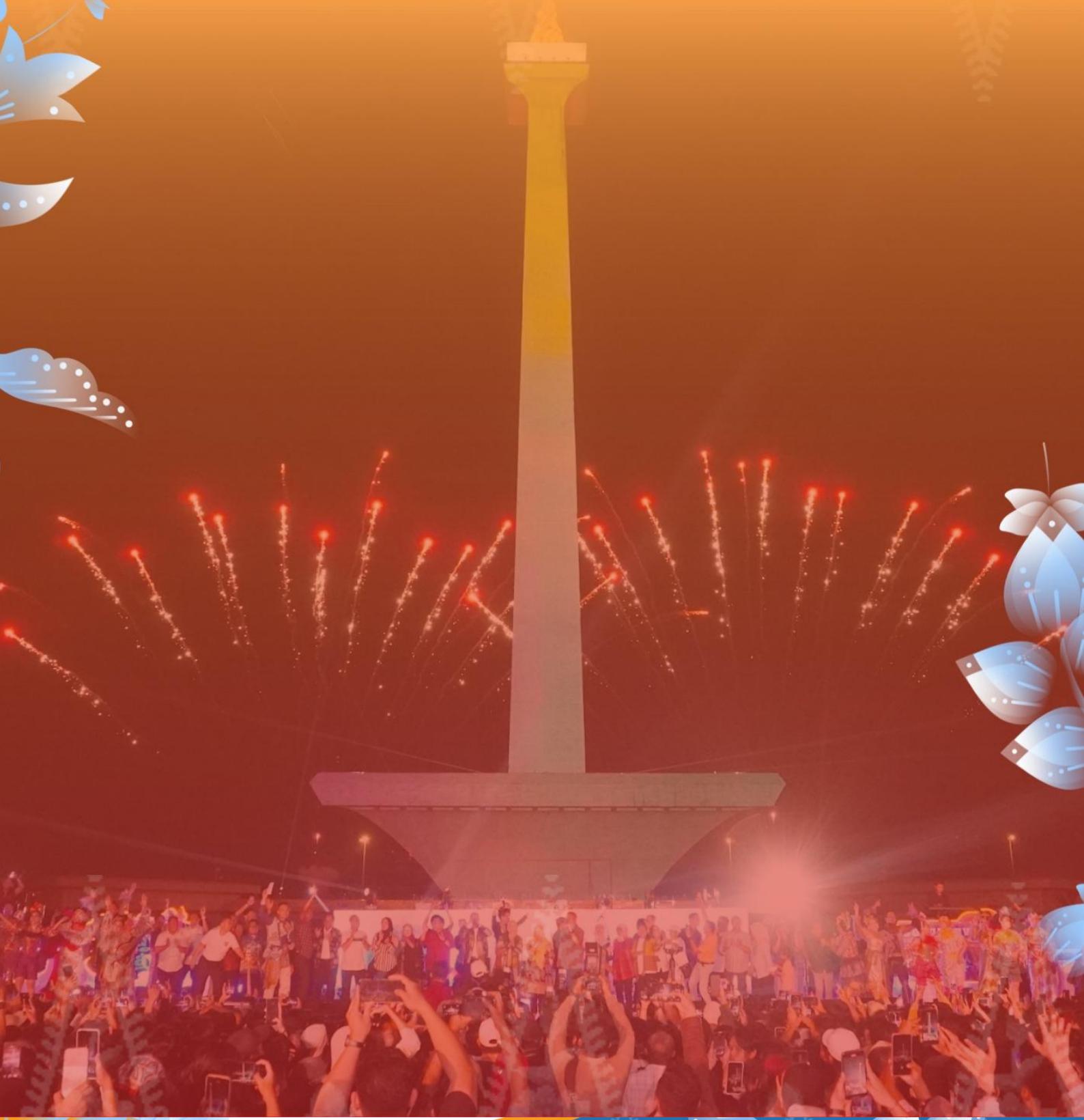
No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Jumlah Wirausaha yang Didampingi dan Dipasarkan Produknya	Wirausaha	2,000	2,100	2,205	2,315	2,431	2,553	
11	Nilai Potensi Transaksi Ekonomi Kreatif	Rupiah	-	150 M	160 M	170 M	180 M	190 M	
12	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Orang	473	500	500	500	500	500	
13	Jumlah Subsektor Ekonomi Kreatif Yang Dikaji dan Dikembangkan	Subsektor	3	2	2	2	2	2	
14	Jumlah Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2,720	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
15	Jumlah Subsektor Ekraf Yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Subsektor	3	2	2	2	2	2	
16	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
17	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	4	4	4	4	
18	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaiuan	Indeks	4	4	4	4	4	4	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	4	4	4	4	
20	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	4	4	4	4	4	4	
21	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	
22	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	

BAB V



PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta disusun dengan landasan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, dengan tetap mengedepankan sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen ini menjadi acuan bagi penetapan program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pengalokasian sumber daya; dan juga rujukan dalam penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan agar implementasi berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin adaptivitas dan akuntabilitas, pelaksanaan Renstra dimonitor dan dievaluasi (monev) secara periodik, sementara tinjauan tengah periode dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian arah, efektivitas strategi, serta kecukupan sumber daya terhadap target yang ditetapkan. Rekomendasi monev dan *review* Renstra pada pertengahan periode menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, termasuk penyesuaian target, strategi, dan rencana kerja tahunan bila diperlukan.

Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kepastian arah, meningkatkan konsistensi perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–evaluasi, serta menjadi dasar akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota destinasi wisata yang unggul dan berlandaskan kebudayaan. Dengan komitmen bersama, pembelajaran berkelanjutan, serta adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis, seluruh sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan tercapai secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi Lembaga

Bank Dunia. (2024). Final Report Advancing Sustainable Urban Tourism. Retrieved from <https://pre-webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2024-10/expert-group-meeting-final-report-advancing-sustainable-urban-tourism.pdf?VersionId=nZA6MJJpLzMrS2lw3oZXc2xxjHAsz7NB>

Centre for Liveable Cities Singapore. (2017). Urban Systems Studies: A City of Culture: Planning for The Arts. Retrieved from <https://knowledgehubclc.gov.sg/publications-library/a-city-of-culture-planning-for-the-arts>

Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report: Unlocking Opportunity. Retrieved from <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE22>

GDS-Movement. (2023). GDS Index Rankings 2023. Retrieved from <https://www.gds.earth/gds-index/2023-league-tables/>

ICCA. (2022). 2022 ICCA Business Analytics Country & City Rankings Public Abstract. Retrieved from https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/iccawe/b/ICCA_Rankings_2023_230707_795d8dd3-147a-45e2-b97f-075234e8f0f6.pdf

Kearney. (2023). The 2023 Global Cities Report. Retrieved from <https://www.kearney.com/service/global-business-policy-council/gcr/2023-full-report>

Publikasi Lembaga Pemerintah

Badan Pusat Statistik. (2023). Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-tabel/2/Nzc3lzl=jumlah-kunjungan-wisatawan-keobyek->

Badan Pusat Statistik. (2024). Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (persen): 2022. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-tabel/3/YVRaR1RHODBVSG9yYIdGa2JFZ3IWbW81U1M4MFFUMDkjMw==/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--persen---2024.html?year=2024>

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2019). Laporan Studi Penyusunan PDRB Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Retrieved July 8, 2025, Retrieved from https://statistik.jakarta.go.id/media/2020/01/BUKU-LAPORAN-PENYUSUNAN-PDRB-EKRAF-DKI-2016-2018_rev18.pdf

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2020). Impact of Covid-19: Unemployment in DKI Jakarta Transcends Two Digits. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/en/pressrelease/2020/11/05/493/dampak-covid-19--pengangguran-dki-jakarta-tembus-dua-digit.html>

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2025a). Statistik Hotel dan Tingkat penghunian Kamar hotel Provinsi DKI Jakarta 2024. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/publication.html>

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2025b). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi DKI Jakarta Februari 2024. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/publication.html>

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2025c). Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2024. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/publication.html>

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2025d). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha 2020-2024. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/befbf2fbdd2fe415799964768/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-dki-jakarta-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html?>

Bappeda Provinsi DKI Jakarta. (2024). Jakarta RISE #20. Retrieved from <https://bappeda.jakarta.go.id/news/Jakarta-Rise-20-Path-Towards-Global-City>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 [Dokumen internal].

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 Provinsi DKI Jakarta [Dokumen internal].

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 [Dokumen internal].

Situs Internet

ANTARA News. (2023, August 25). A Pilot City of ASEAN Smart Cities Network: Jakarta. Retrieved, from <https://en.antaranews.com/news/135822/a-pilot-city-of-asean-smart-cities-network-jakarta>

Antaranews.com. (2025). Ekonomi Kreatif Maju Jika Tak Ada Ego Sektoral. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/805512/triawan-munaf-ekonomi-creatif-maju-jika-tak-ada-ego-sektoral>

Asia News Network. (2023). Jakarta Air Pollution May Cast a Shadow Over Sports Tourism. Retrieved from <https://asianews.network/jakarta-air-pollution-may-cast-a-shadow-over-sports-tourism/>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Periksa Pengelolaan Aset Pemda, Ini Hasil Temuan BPK. Warta Pemeriksa. Retrieved from <https://warta.bpk.go.id/?p=57252>

Databoks.katadata.co.id (2023). Ruang Terbuka Hijau Jakarta Hanya 5,2% Pada 2023, Ini Luas Per Kotanya. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/9cb21c877a5cc76/ruang-terbuka-hijau-jakarta-hanya-52-pada-2023-ini-luas-per-kotanya>

Kementerian Pariwisata. (2021). Peluang Terbuka Luas, SDM Tersertifikasi Terbatas. Retrieved from <https://mice.kemenparekraf.go.id/news/607708f2-8c6c-453a-addc-781413c963d3>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024).

Langkah Nyata Kesetaraan Gender dalam Birokrasi. Retrieved from <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/langkah-nyata-kesetaraan-gender-dalam-birokrasi>

Kompas. (2024). Transfer Of State Institutions And Capital City. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/en-pemindahan-lembaga-negara-dan-ibu-kota>

Kompas.id. (2024). Welcoming The Hope Of Jakarta As A Global City. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/english/2024/01/16/en-menyongsong-asa-jakarta-kota-global>

Oxford Economics. (2024). A Capital is Born: The Impact of Indonesia Moving its Capital City. Retrieved from <https://www.oxfordeconomics.com/resource/a-capital-is-born-the-impact-of-indonesia-moving-its-capital-city/>

Southeast Asia Development Solutions (SEADS). (2023). Indonesia and Malaysia Share Top Spot in Global Muslim Travel Index 2023. Retrieved from <https://seads.adb.org/news/indonesia-and-malaysia-share-top-spot-global-muslim-travel-index-2023>

UNDP. (2021). 5 Lessons for Smart Cities in ASEAN: The Example. Retrieved from <https://www.undp.org/policy-centre/singapore/blog/5-lessons-smart-cities-asean-example-bandung-indonesia>

United Nations. (2017). UNAI Presents Digital Discussion Series On Sustainable Tourism. Retrieved from <https://www.un.org/en/academic-impact/unai-presents-digital-discussion-series-sustainable-tourism>

UNWTO. (2017). The Need For Multi-Stakeholder Cooperation to Enhance Responsible Tourism Underlined at The 3rd Internasional Congress on Ethics and Tourism. Retrieved from <https://www.unwto.org/archive/europe/press-release/2017-05-11/need-multi-stakeholder-cooperation-enhance-responsible-tourism-underlined-3>

UNWTO. (2021). What is "Sustainable Tourism". Retrieved from <https://en.unwto-ap.org/faq/10712/>

Rukmana, D. (2024). The Implications Of Indonesia's Capital Relocation. Retrieved from

<https://gjia.georgetown.edu/2024/05/11/thinking-through-the-socio-political-implications-of-indonesias-capital-relocation-with-dr-deden-rukmana/>

Walhi Jakarta. (2022). Selain Polusi Udara, Ini Persoalan Lingkungan Hidup Jakarta Yang Lain. Retrieved from <https://walhijakarta.org/selain-polusi-udara-ini-persoalan-lingkungan-hidup-jakarta-yang-lain/>

World Resources Institute. (2024). Southeast Asian Cities Have Some of the Most Polluted Air in the World. El Niño is Making it Worse. Retrieved from <https://www.wri.org/insights/air-pollution-southeast-asia-cities-jakarta-el-nino>

World Travel & Tourism Council (WTTC). (2025). Indonesia's International Visitor Spend to Reach a Record-Breaking IDR 344TN in 2025. Retrieved from <https://wttc.org/news/indonesias-international-visitor-spend-to-reach-a-record-breaking-idr-344tn-2025>



★ Kehidupan Urban yang Semarak dengan Keberagaman★



csgar.ui.ac.id



021-78721280



Gedung Science Techno Park
(STP), Lt. 5, Universitas
Indonesia, Pondok Cina,
Depok, Kota Depok, Jawa
Barat, 16424